SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 361 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi melalui penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh guna memenuhi hak-hak dasar manusia secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung diperlukan langkah-langkah kebijakan dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;

c. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Bandung Nomor 287 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026 sudah tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan saat ini, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7940);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bandung adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

Tujuan penyusunan RPKD untuk :

a. menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
b. menjadi pedoman penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
c. menentukan arah dan prioritas Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
d. menetapkan lokasi prioritas intervensi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
e. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pihak swasta, masyarakat dan pihak lainnya dalam sinkronisasi dan kolaborasi intervensi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Pasal 3

RPKD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 4

(1) RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
   a. pendahuluan;
   b. kondisi umum daerah;
   c. profil kemiskinan daerah;
   d. prioritas program;
   e. lokasi prioritas; dan
   f. penutup.

(2) Sistematika penulisan RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap RPKD.

(2) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat Menugaskan TKPK.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara rutin berkala paling sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen RPKD.

Pasal 6

Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RPKD bersumber dari :

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 287), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 361

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 361 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling mendalam dan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kemiskinan dapat menyebabkan keterbelakangan dalam berbagai sektor kehidupan sehingga memerlukan penanganan dari multi pihak. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terencana dan terkoordinasi melalui berbagai kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tujuan kesatu "menghilangkan segala bentuk kemiskinan di mana pun". Hal ini menandakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah lokal, tetapi merupakan tantangan global yang memerlukan kerja sama antar sektor. Di Indonesia, komitmen terhadap tujuan tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, yang menegaskan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas nasional.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Persentase penduduk miskin di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sempat mengalami peningkatan. Di Kabupaten Bandung, pandemi ini memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan. Banyak usaha kecil dan menengah yang terpaksa tutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, yang memperburuk tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Bandung juga mengalami penurunan drastis, yang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kemudian pasca pandemi COVID-19, persentase penduduk miskin di tingkat nasional maupun provinsi telah mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin nasional telah mencapai 9,03% dan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat telah mencapai 7,46%. Penurunan tersebut juga dialami oleh Kabupaten Bandung, di mana

persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung mengalami penurunan menjadi 6,19% pada tahun 2024. Sedangkan jika meninjau data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung trennya masih cenderung fluktuatif dalam lima tahun ke belakang. Maka perlu adanya upaya penanggulangan kemiskinan berkelanjutan agar tren garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga konsisten membaik sehingga selaras dengan tren penurunan persentase penduduk miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung memiliki landasan kuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif ditetapkan sebagai salah satu isu strategis. Isu ini menekankan pentingnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan minoritas. Pendekatan inklusif ini sejalan dengan visi jangka panjang Kabupaten Bandung, yaitu "Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera, dan Berkelanjutan," yang menempatkan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sebagai salah satu sasaran utama pembangunan daerah.

Selaras dengan arah pembangunan jangka panjang tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045 menegaskan kembali komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap penguatan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan sebagai isu strategis prioritas. Visi yang diusung dalam RPJMD, yakni *"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"*, mengandung makna bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan transformasi ekonomi berbasis inklusi sosial agar masyarakat berpendapatan rendah memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan layak.

Dalam konteks Perencanaan Tematik Kabupaten Bandung, kebijakan penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam *Sub-tema SDM BEDAS* yang berfokus pada transformasi sosial melalui penguatan layanan dasar dan

perlindungan sosial bagi kelompok sasaran prioritas. Sub-tema ini menempatkan peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, serta ketahanan sosial masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan manusia yang produktif dan tangguh terhadap guncangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sektoral semata, melainkan sebagai agenda lintas sektor yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, pada tingkat implementasi, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai sub tema prioritas dalam perencanaan tematik, yaitu "Kesejahteraan Sosial Melalui Penanganan Kemiskinan." Fokus ini memperkuat posisi kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berupaya memastikan bahwa kebijakan sosial dan ekonomi berjalan beriringan—di mana peningkatan pendapatan masyarakat miskin, penyediaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial adaptif menjadi satu kesatuan strategi yang saling mendukung.

Secara konseptual, arah kebijakan tersebut menggambarkan perubahan paradigma dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Program penanggulangan kemiskinan kini tidak hanya bertujuan menurunkan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat, memperluas inklusi ekonomi, dan mengatasi akar penyebab kemiskinan struktural. Pendekatan transformasi sosial yang diusung melalui tema SDM BEDAS menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*people-centered development*), sehingga intervensi diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian kelompok rentan.

Dengan integrasi yang jelas antara RPJPD, RPJMD, dan perencanaan tematik daerah, serta kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung memiliki landasan strategis yang kuat. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan teknokratis, tetapi juga merupakan instrumen koordinatif untuk memastikan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki arah dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

1.2 TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung;
3. Menentukan arah dan prioritas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung;
4. Menetapkan lokasi prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung;
5. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, pihak swasta, masyarakat dan pihak lainnya dalam sinkronisasi dan kolaborasi intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

Wilayah menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

2.1.1.1 LETAK, LUAS DAN BATAS WILAYAH

Secara geografis, letak Kabupaten Bandung berada antara 6° 41’ 00” - 7° 19’ 00” Lintang Selatan dan antara 107° 22’ 00” - 108° 50’ 00” Bujur Timur. Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044, luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung adalah sebesar 174.084,34 ha (4,69% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat). Wilayah Kabupaten Bandung secara administrasi berbatasan dengan beberapa kabupaten/kota sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat.

Luas daerah Kabupaten Bandung secara rinci menurut kecamatan dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Bandung per Kecamatan

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
1	WP Soreang – Kutawaringin – Katapang	1	Soreang	2.537,04	1,46	10
		2	Kutawaringin	4.705,50	2,70	11
		3	Katapang	1.561,94	0,90	7
		4	Rancabali	15.286,64	8,78	5
		5	Pasirjambu	19.807,79	11,38	10
		6	Ciwidey	5.519,18	3,17	7
2	WP Baleendah	1	Baleendah	4.182,97	2,40	8
		2	Dayeuhkolot	1.115,30	0,64	6
		3	Bojongsoang	2.822,38	1,62	6
3	WP Banjaran	1	Banjaran	3.903,25	2,24	11
		2	Pangalengan	21.656,39	12,44	13
		3	Cangkuang	2.375,09	1,36	7
		4	Cimaung	5.955,56	3,42	10
		5	Arjasari	6.277,55	3,61	11
		6	Pameungpeuk	1.514,15	0,87	6
4	WP Majalaya	1	Majalaya	2.431,45	1,40	11

No.	Wilayah Pengembangan	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
				Ha	%	
		2	Ciparay	5.366,72	3,08	14
		3	Pacet	9.482,01	5,45	13
		4	Kertasari	13.654,39	7,84	8
		5	Paseh	4.789,21	2,75	12
		6	Ibun	5.477,22	3,15	12
		7	Solokanjeruk	2.435,27	1,40	7
5	WP Cicalengka	1	Cicalengka	4.351,07	2,50	12
		2	Nagreg	4.282,97	2,46	8
		3	Cikancung	3.872,63	2,22	9
6	WP Cileunyi - Rancaekek	1	Cileunyi	3.063,24	1,76	6
		2	Rancaekek	4.486,63	2,58	14
7	WP Cilengkrang - Cimenyan	1	Cimenyan	4.758,98	2,73	9
		2	Cilengkrang	3.525,17	2,02	6
8	WP Margahayu - Margaasih	1	Margaasih	1.832,39	1,05	6
		2	Margahayu	1.054,26	0,61	5
Kabupaten Bandung				174.084,34	100,00	280

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

2.1.1.2 KONDISI TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Bandung terletak di kawasan Cekungan Bandung dan sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi atau pegunungan. Titik tertinggi berada di Kecamatan Kertasari dengan ketinggian mencapai 1.512 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan titik terendah berada di Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot pada ketinggian 664 mdpl. Sekitar 19% wilayah Kabupaten Bandung memiliki ketinggian kurang dari 700 mdpl, yang menjadi lokasi utama kawasan perkotaan seperti Majalaya, Soreang, Banjaran, Rancaekek, Dayeuhkolot, Margahayu, Cileunyi, Baleendah, dan Bojongsoang. Daerah yang berada di wilayah pegunungan meliputi Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu, dan Pangalengan di bagian selatan, serta Cimenyan dan Cilengkrang di bagian utara. Beberapa gunung yang terdapat di Kabupaten Bandung antara lain Gunung Patuha (2.334 mdpl), Gunung Malabar (2.321 mdpl), Gunung Papandayan (2.262 mdpl), dan Gunung Manglayang. Secara rinci, informasi mengenai luasan topografi di Kabupaten Bandung disajikan pada tabel 2.2.

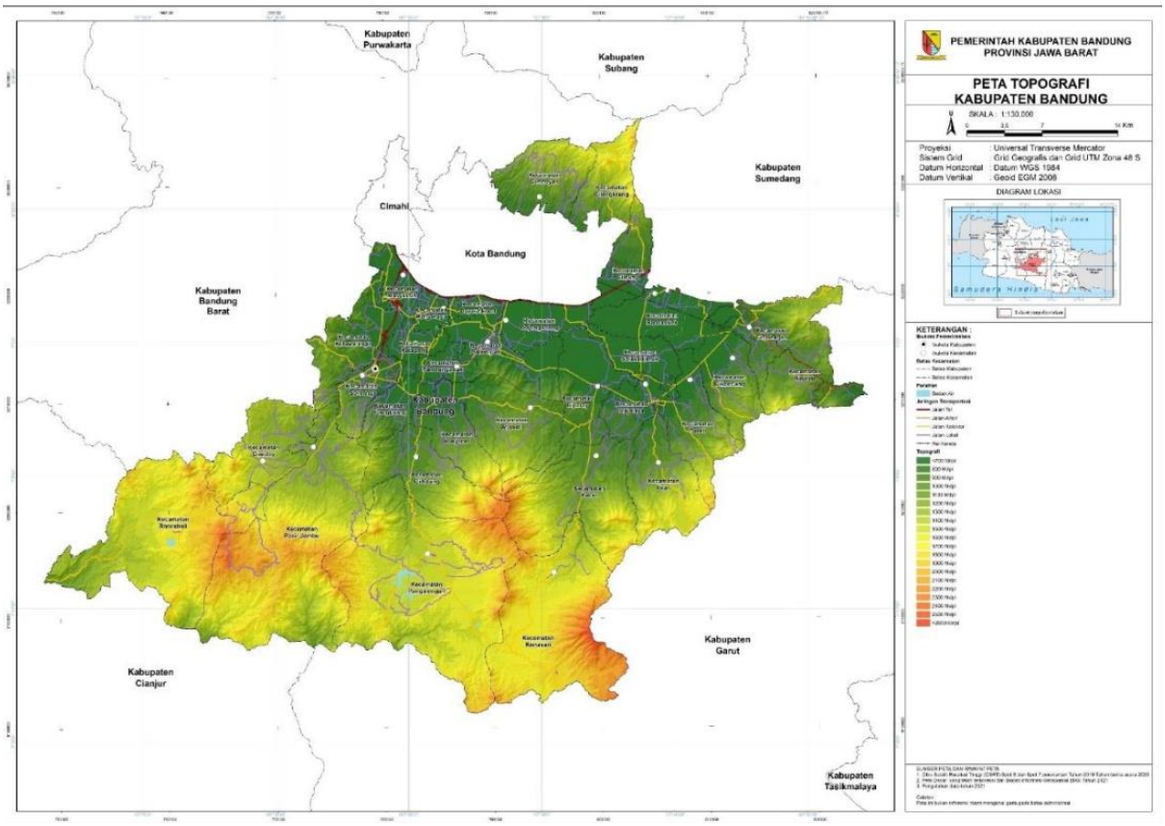
Tabel 2.2 Luasan Topografi Wilayah Kabupaten Bandung

No	Topografi	Luas (Ha)
1	<700 mdpl	33.842,52
2	800 mdpl	12.354,06
3	900 mdpl	12.228,65
4	1.000 mdpl	9.804,18
5	1.100 mdpl	9.120,41
6	1.200 mdpl	10.011,61
7	1.300 mdpl	10.138,25
8	1.400 mdpl	9.479,07
9	1.500 mdpl	14.381,89
10	1.600 mdpl	14.026,96
11	1.700 mdpl	12.605,05
12	1.800 mdpl	9.118,17
13	1.900 mdpl	6.178,06

No	Topografi	Luas (Ha)
14	2.000 mdpl	4.472,98
15	2.100 mdpl	2.964,81
16	2.200 mdpl	1.818,57
17	2.300 mdpl	1.098,42
18	2.400 mdpl	292,21
19	2.500 mdpl	99,49
20	>2.600 mdpl	48,97
	Total	174.084,34

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

Kondisi topografi Kabupaten Bandung secara detail dalam bentuk Peta Topografi disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Topografi Kabupaten Bandung

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

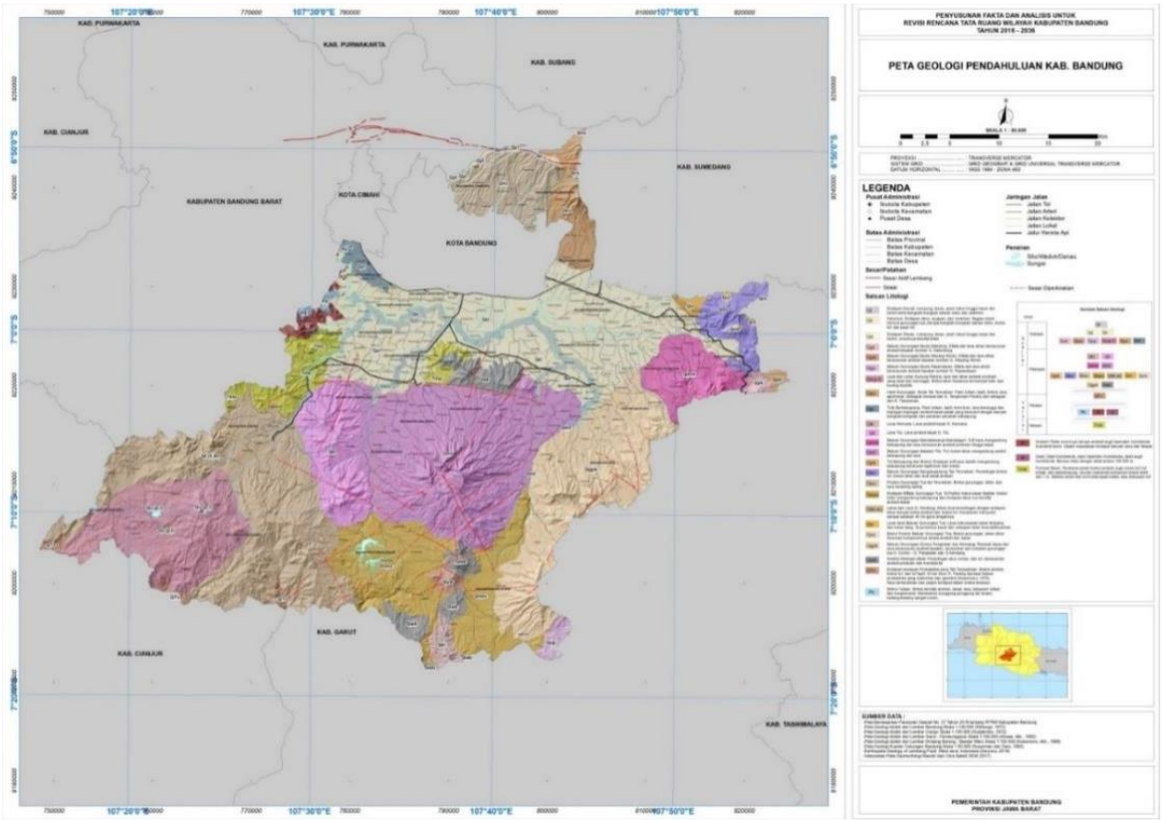
2.1.1.3 KONDISI GEOLOGIS

Dilihat berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang berada dalam Kawasan Cekungan Bandung, yang dikelilingi oleh deretan pegunungan sebagai berikut:

- Di sebelah utara terdapat Bukit Tunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta.
- Di sebelah selatan terdapat beberapa gunung yaitu: Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m, dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut.
- Di Bagian barat Kawasan Cekungan Bandung, terdapat deretan intrusi andesit dan dasit yang membentuk punggung- punggung tidak teratur.

- Adapun di bagian timur Kawasan Cekungan Bandung, diapit oleh Gunung Krenceng dan Gunung Mandalawangi.

Kondisi morfologi Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Cekungan Bandung tersebut menjadikan Kabupaten Bandung tergolong ke dalam wilayah yang potensial sebagai tempat akumulasi air tanah.

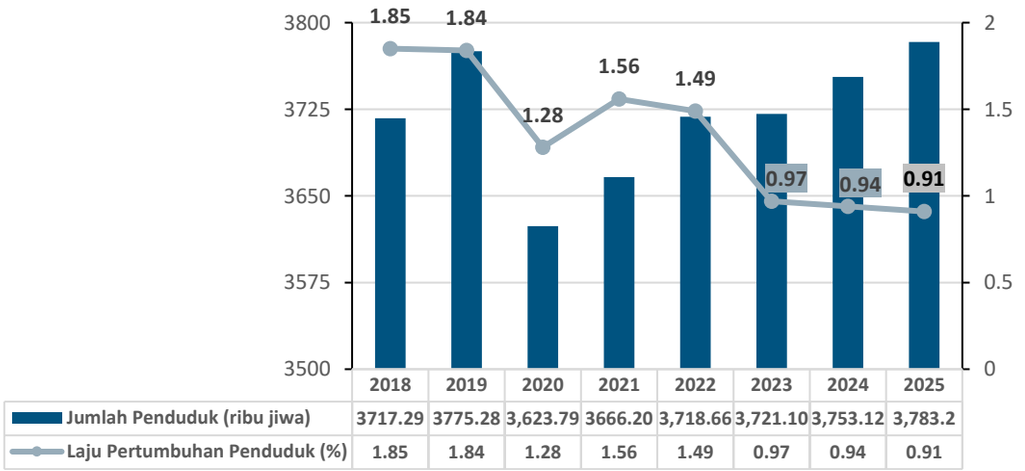


Gambar 2.2 Peta Geologi Kabupaten Bandung

Sumber: RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045

2.2 ASPEK DEMOGRAFIS

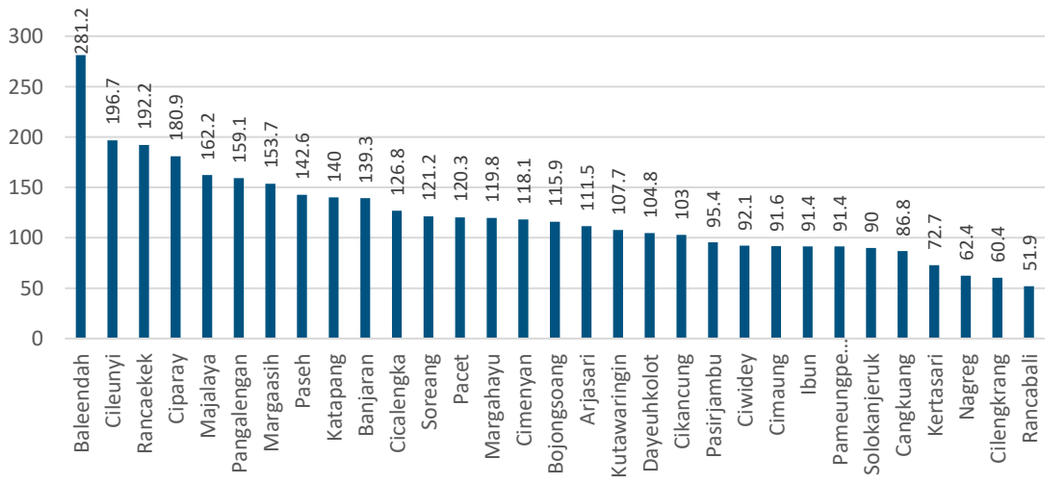
Gambaran aspek demografis Kabupaten Bandung antara lain dijelaskan melalui beberapa penjelasan, di antaranya jumlah penduduk, angka ketergantungan (*dependency ratio*), sebaran dan kepadatan penduduknya. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung berdasarkan data BPS tahun 2025 adalah sebanyak 3.783,2 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,91%. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan data yang digunakan merupakan data hasil sensus kependudukan oleh BPS di tahun 2020. Gambaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat melalui Gambar 2.3 sebagai berikut.



Gambar 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2018-2025

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025

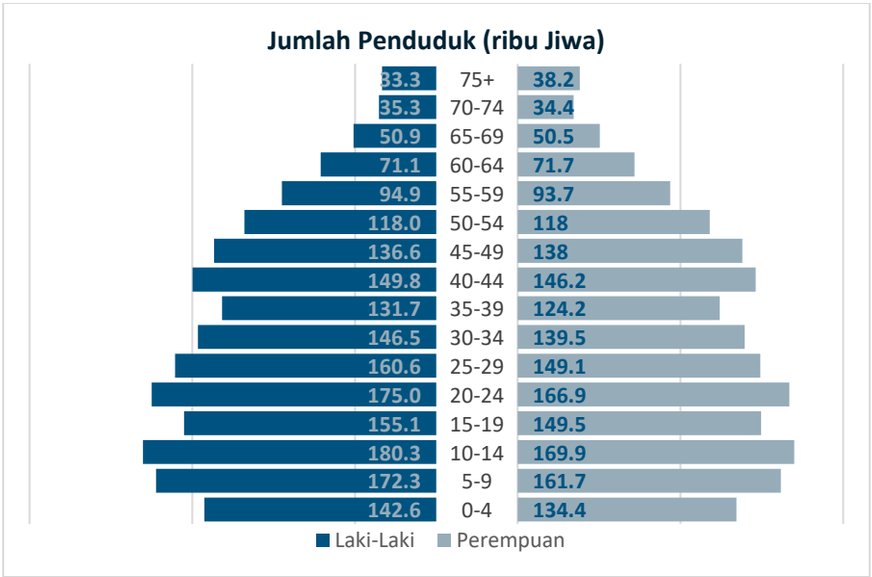
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung paling banyak berturut-turut berada di Kecamatan Baleendah sebanyak 281,2 ribu jiwa, Kecamatan Cileunyi sebanyak 196,7 ribu jiwa, dan Kecamatan Rancaekek sebanyak 192,2 ribu jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit secara berturut-turut berada di Kecamatan Rancabali sebanyak 51,9 ribu jiwa, Kecamatan Cilengkrang sebanyak 60,4 ribu jiwa, dan Kecamatan Nagreg sebanyak 62,4 ribu jiwa. Sebaran jumlah penduduk Kabupaten Bandung per kecamatan tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut.



Gambar 2.4 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Tahun 2025

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2025

Apabila ditinjau dari proporsi penduduk perempuan dan laki-laki, Kabupaten Bandung memiliki proporsi yang hampir seimbang di mana penduduk laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 1.954 ribu jiwa sedangkan penduduk Perempuan sebanyak 1.885,8 ribu jiwa. Berdasarkan segi usia, penduduk Kabupaten Bandung didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun. Sebanyak 2635,9 ribu jiwa atau 68,65% dari total penduduk Kabupaten Bandung berada pada usia produktif yang memiliki potensi besar untuk diberdayakan. Grafik piramida penduduk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Bandung, 2025

Perlu diperhatikan pula bahwa proporsi anak usia 0-4 tahun atau balita yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 sebesar 277 ribu jiwa atau sekitar 7,22% dari total penduduk. Jumlah balita memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dalam pemenuhan gizi seimbang sehingga dapat mencegah terjadinya *stunting* pada balita. Pemenuhan gizi pada balita juga diharapkan secara jangka panjang dapat menciptakan generasi penerus Kabupaten Bandung yang sehat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan di masa mendatang.

2.3 PERTUMBUHAN EKONOMI

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan basis data utama untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah. Dengan menggunakan komponen PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap PDRB Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Bandung, baik PDRB ADHB maupun ADHK, cenderung menunjukkan tren pertumbuhan positif namun mengalami penurunan di tahun 2020 yang bertepatan dengan dampak pandemi COVID-19. Laju pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bandung pada tahun 2024 berturut-turut adalah sebesar 7,57% dan 5,04% per tahun. Informasi mendetail mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Bandung lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)	
			PDRB ADHB	PDRB ADHK
2020	Rp123.602,78	Rp81.060,97	-0,31	-1.80
2021	Rp130.476,83	Rp83.949,37	5,56	3,56
2022	Rp143.002,07	Rp88.437,96	9,60	5,35
2023	Rp153.950,74	Rp92.830,17	7,66	4,97
2024	Rp165.609,36	Rp97.509,91	7,57	5,04
RATA-RATA			6,016	3,424

Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2024 dan BPS Jawa Barat, 2025

Secara lebih detail, PDRB ADHB dan ADHK tahun 2024 di Kabupaten Bandung berdasarkan lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024

Lapangan Usaha		PDRB ADHB Tahun 2024		PDRB ADHK Tahun 2024	
		PDRB ADHB (Milyar Rupiah)	%	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	11.218,21	6,77%	5.539,35	5,68%
B	Pertambangan dan penggalian	2.690,47	1,62%	1.659,43	1,70%
C	Industri pengolahan	87.627,73	52,91%	51.002,18	52,30%
D	Pengadaan listrik dan gas	137,78	0,08%	96,87	0,10%
E	Pengadaan air; Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	58,50	0,04%	34,59	0,04%
F	Konstruksi	9.998,54	6,04%	6.337,59	6,50%
G	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor	22.293,04	13,46%	12.989,46	13,32%
H	Transportasi dan pergudangan	7.178,96	4,33%	3.697,58	3,79%
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3.830,88	2,31%	2.261,69	2,32%
J	Informasi dan komunikasi	3.000,08	1,81%	3.253,54	3,34%
K	Jasa keuangan dan asuransi	1.138,69	0,69%	676,71	0,69%
L	Real estat	2.146,55	1,30%	1.530,28	1,57%
M,N	Jasa perusahaan	772,51	0,47%	469,27	0,48%
O	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	3.005,56	1,81%	1.759,24	1,80%
P	Jasa pendidikan	5.562,33	3,36%	3.189,70	3,27%
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan	1.443,14	0,87%	870,85	0,89%
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.506,39	2,12%	2.141,56	2,20%
	TOTAL	165.609,36	100%	97.509,91	100%

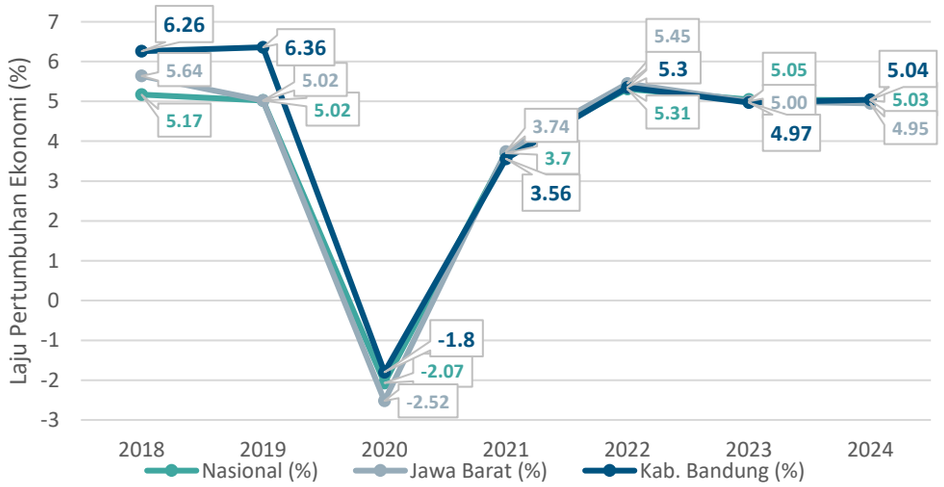
Sumber: Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2025, 2025

Ditinjau dari nilai rata-rata kontribusi sektor dan PDRB Kabupaten Bandung, nilai kontribusi sektor PDRB ADHB paling besar di tahun 2024 ialah sektor industri pengolahan (52,91%); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,64%); sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (6,77%); serta sektor konstruksi (6,04%). Kondisi tersebut juga tercermin PDRB ADHK Kabupaten Bandung tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling besar yang mencapai 52,30%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,32%; sektor konstruksi sebesar 6,5%; serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,68%.

Di samping itu, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat menggambarkan pertumbuhan volume produk ekonomi yang dihasilkan dan kecepatan peningkatan volume yang dihasilkan pada kategori tertentu. LPE Kabupaten Bandung sempat mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup tinggi pada tahun 2020 akibat disrupsi pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Kemudian pada tahun 2021 hingga tahun 2022 LPE kembali mengalami

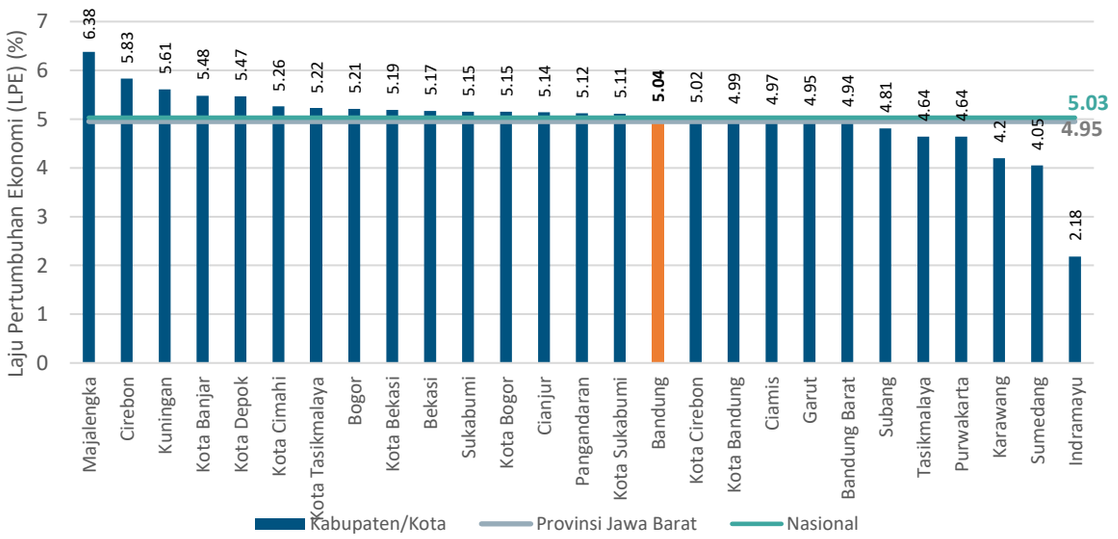
pertumbuhan positif yang menunjukkan perekonomian Kabupaten Bandung yang sudah mulai pulih. Namun pada tahun 2023 LPE Kabupaten Bandung mengalami penurunan menjadi 4,97% pada tahun 2023 dari 5,35% pada tahun 2022. Adapun LPE Kabupaten Bandung pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,04%, sehingga berada sedikit di atas LPE Nasional dan LPE Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya pertumbuhan LPE Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Adapun secara regional, di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 LPE Kabupaten Bandung (5,04%) termasuk kabupaten/kota dengan capaian LPE yang sedikit lebih tinggi dari capaian LPE Provinsi Jawa Barat (4,95%) maupun capaian LPE nasional (5,03%). Secara lebih rinci, LPE kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2.6 Pertumbuhan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Tahun 2018-2024

Sumber: BPS, 2025



Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

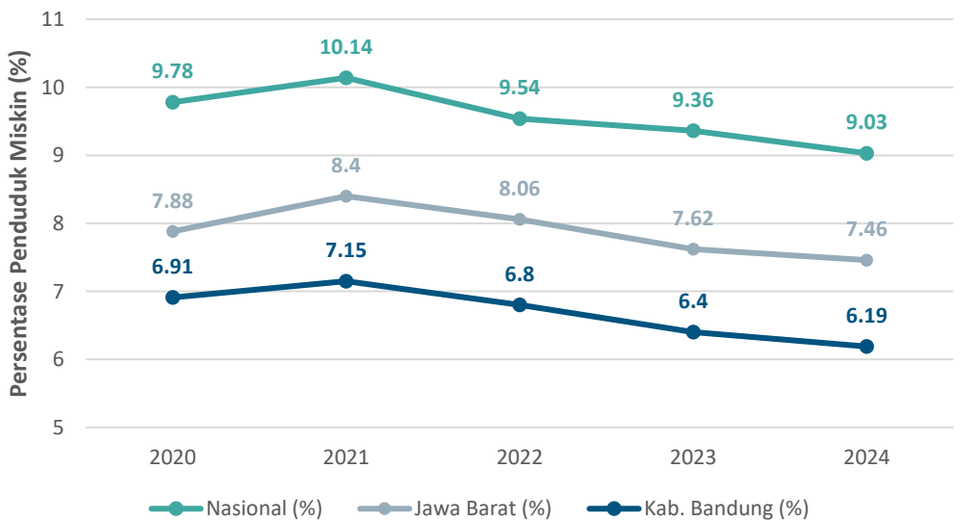
Sumber: BPS Jawa Barat, 2025

BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 PROFIL UMUM KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG

3.1.1 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0)

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan di mana berturut-turut persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung menjadi 6,91% dan 7,15%. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19. Namun demikian, pada tahun 2022 sampai dengan 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung terus mengalami penurunan. Jika meninjau capaian tingkat provinsi dan nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 selalu berada di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

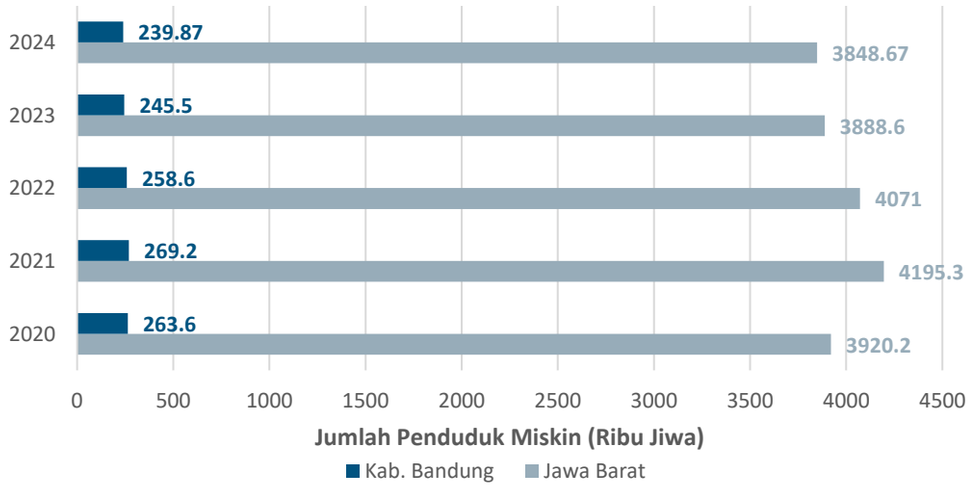


Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

3.1.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung sebanyak 232.200 jiwa atau turun sebanyak 13.900 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 berturut-turut menjadi 263.600 jiwa dan 269.200 jiwa. Namun demikian pada tahun 2022 hingga tahun 2024 kembali mengalami penurunan jumlah penduduk miskin. Adapun pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 239,87 ribu jiwa, berkurang sebanyak 5,63 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023 (245,5 ribu jiwa). Jika meninjau capaian tingkat provinsi, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung merupakan 6,23% dari jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Barat.



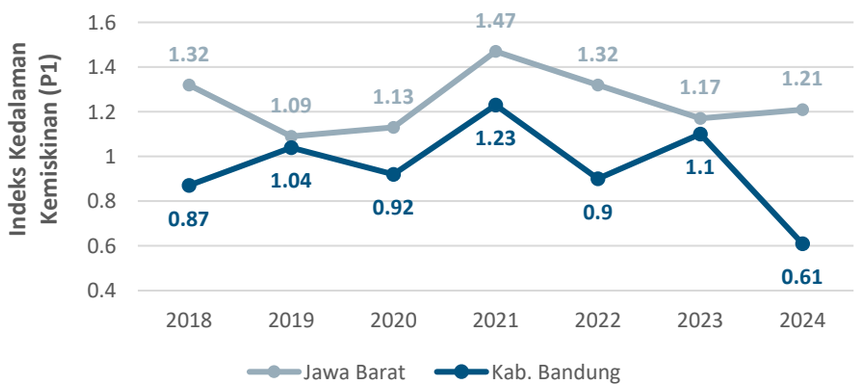
Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

3.1.3 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka P1 digunakan sebagai gambaran dalam menentukan prioritas intervensi pemerintah daerah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung dari tahun 2018 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif, di mana terjadi peningkatan di tahun ganjil dan terjadi penurunan di tahun genap. Pada tahun 2024, capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung adalah sebesar 0,61. Adapun capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan capaian pada tahun 2023 (1,1 poin). Jika meninjau capaian tingkat provinsi, dalam tujuh tahun terakhir Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bandung selalu berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

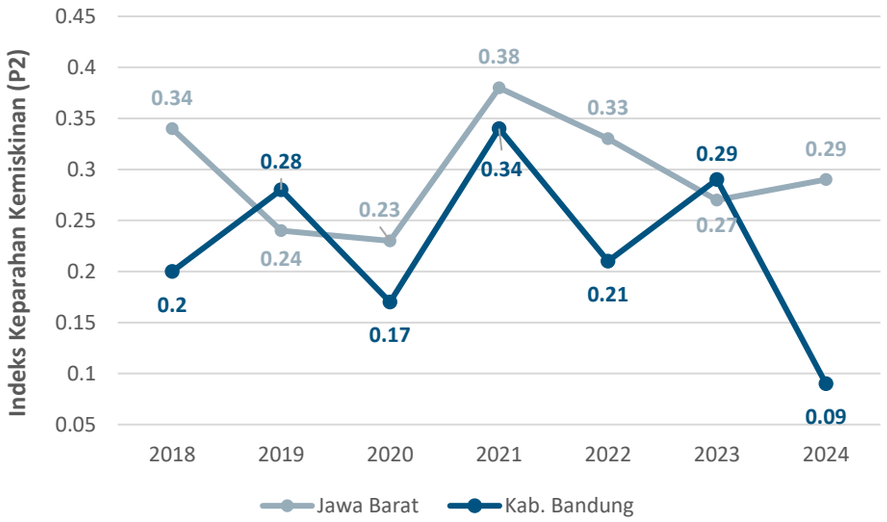


Gambar 3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

3.1.4 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 dapat diartikan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran/belanja di antara masyarakat miskin semakin besar, sebaliknya semakin kecil nilai P2, dapat diartikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar masyarakat miskin dalam suatu wilayah juga semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung dalam rentang waktu tahun 2018-2024 cenderung fluktuatif, di mana terjadi peningkatan di tahun ganjil dan terjadi penurunan di tahun genap. Pada tahun 2021, P2 Kabupaten Bandung mencapai nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir yaitu berada di angka 0,34. Sedangkan pada tahun 2024, P2 Kabupaten Bandung menunjukkan capaian yang positif yakni mencapai nilai terendah dalam tujuh tahun terakhir, tepatnya berada di angka 0,09.

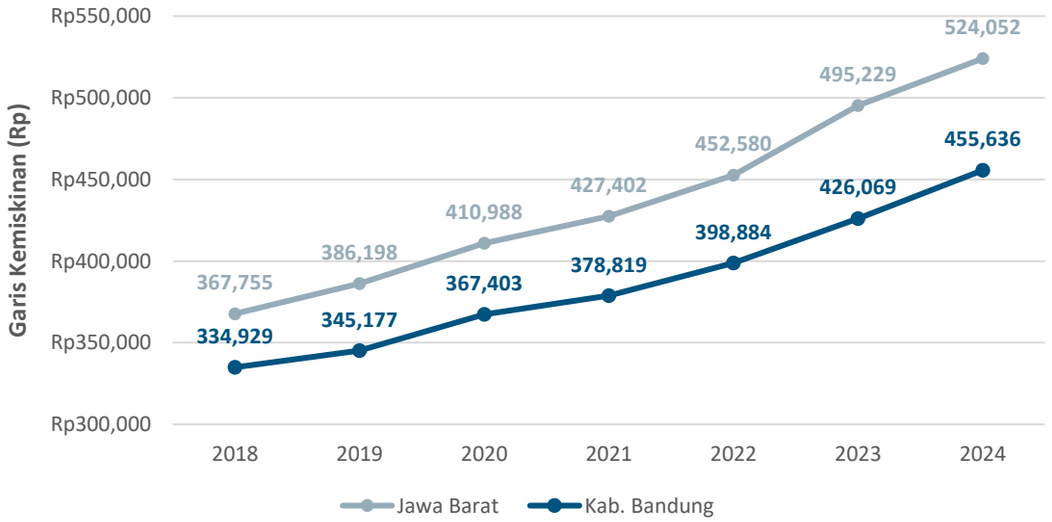


Gambar 3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

3.1.5 GARIS KEMISKINAN

Dalam menghitung angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebesar Rp455.636,00. Angka ini dapat diartikan bahwa penduduk Kabupaten Bandung dengan pengeluaran per bulan di bawah Rp455.636,00 tergolong penduduk miskin. Adapun angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu tujuh tahun ke belakang. Jika meninjau capaian tingkat provinsi, dalam tujuh tahun terakhir Garis Kemiskinan Kabupaten Bandung selalu berada di bawah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan tren garis kemiskinan Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Gambar 3.5 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Tahun 2018-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

3.1.6 KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN BANDUNG

Standar yang digunakan untuk menghitung kemiskinan ekstrem mengacu pada standar World Bank, yang mendefinisikan kemiskinan ekstrem berdasarkan pengeluaran per kapita. Di mana penduduk yang hidup dengan kurang dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari, atau sekitar Rp10.739 per orang per hari dikategorikan sebagai miskin ekstrem. Artinya, sebuah keluarga dengan empat anggota yang memiliki pengeluaran bulanan di bawah Rp1.288.680 termasuk dalam kategori ini.

Terkait kemiskinan ekstrem, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. Pada Inpres tersebut diarahkan bahwa OPPKPKE dilaksanakan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

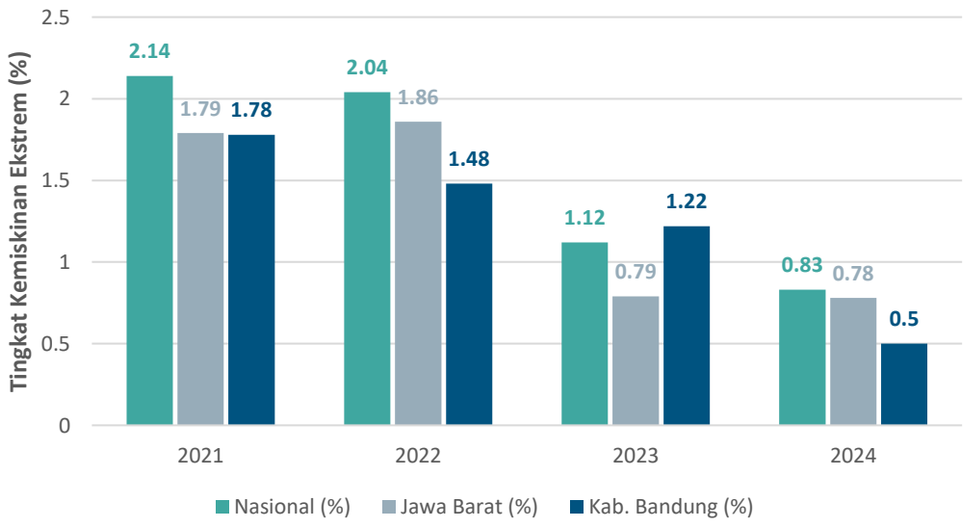
a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam pelaksanaannya, diarahkan pula untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk OPPKPKE dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan tiga strategi kebijakan dimaksud di atas. Selain itu, terdapat arahan khusus untuk para Bupati/Wali Kota untuk:

a. menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dalam rangka OPPKPKE, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by narne by address*);
b. melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

c. mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka OPPKPKE; dan
d. menyampaikan laporan hasil OPPKPKE kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Meninjau capaian kemiskinan ekstrem, persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut relevan dengan tren penurunan persentase kemiskinan ekstrem nasional pada kurun waktu yang sama. Persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Bandung pada tahun 2024 adalah sebesar 0,5%, menurun cukup signifikan yakni 0,72% dibandingkan tahun 2023 (1,22%).



Gambar 3.6 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

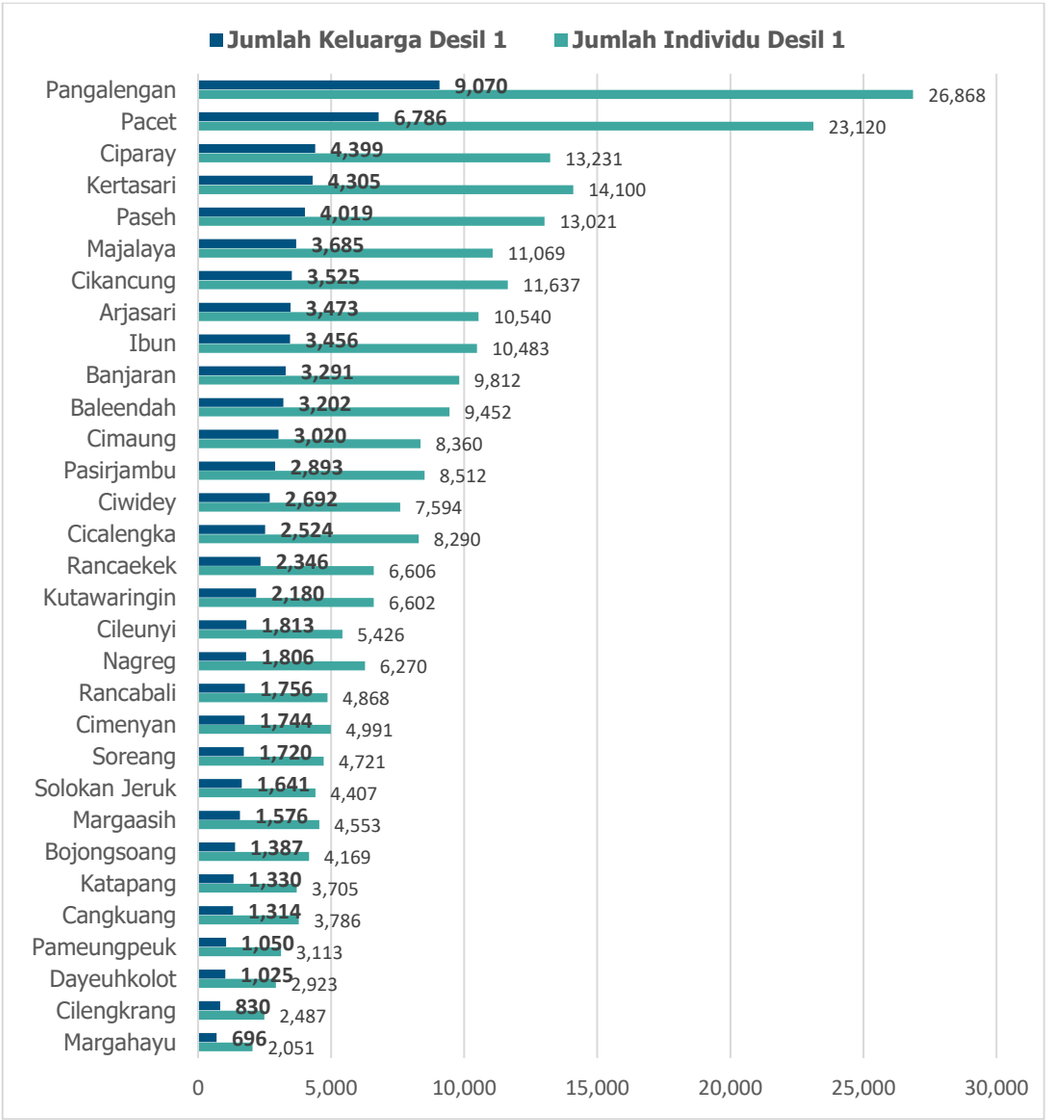
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Adapun dasar hukum dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah sebagai berikut.

a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menginstruksikan penggunaan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi;
b. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE), menginstruksikan strategi dan pembagian tugas bagi Kementerian/Lembaga terkait hingga Bupati/Wali Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hingga dokumen ini disusun, Kabupaten Bandung belum memperoleh akses terhadap dataset lengkap DTSEN, sehingga data yang digunakan mengacu pada data agregat DTSEN yang terdapat pada Dashboard Agregat DTSEN OPPKPKE Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diakses pada tautan https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres per tanggal 20 November

2025. Berikut jumlah keluarga dan individu desil 1 per kecamatan di Kabupaten Bandung berdasarkan DTSEN Tahun 2025.



Gambar 3.7 Jumlah Keluarga dan Individu Desil 1 per Kecamatan di Kabupaten Bandung Berdasarkan DTSEN Tahun 2025

Sumber: Kemenko PM, 2025 (diolah)

Berdasarkan data DTSEN, jumlah keluarga dan individu Desil 1—yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—menunjukkan sebaran yang cukup bervariasi antar kecamatan di Kabupaten Bandung. Secara umum, jumlah keluarga dan individu Desil 1 terbanyak terdapat di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis pedesaan dan kepadatan penduduk tinggi.

Kecamatan Pangalengan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah keluarga dan individu Desil 1 tertinggi, masing-masing sebanyak 9.070 keluarga dan 26.868 individu. Kondisi tersebut diikuti oleh Kecamatan Pacet dengan 6.786 keluarga dan 23.120 individu, serta Kecamatan Ciparay dengan 4.399 keluarga dan 13.231 individu. Selanjutnya, Kecamatan Kertasari dan Paseh juga menunjukkan angka yang relatif tinggi, masing-masing mencatat lebih dari 4.000 keluarga Desil 1 dan di atas 13.000 individu. Pola ini menegaskan

bahwa wilayah-wilayah tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pada kelompok kecamatan dengan tingkat kemiskinan menengah, seperti Majalaya, Cikancung, Arjasari, Ibun, Banjaran, Baleendah, dan Cimaung, jumlah keluarga Desil 1 berada pada kisaran 3.000–3.700 keluarga, dengan jumlah individu Desil 1 berkisar antara 8.000–11.600 individu. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut masih memiliki kantong-kantong kemiskinan yang cukup signifikan, meskipun secara umum memiliki akses ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan kelima kecamatan pada posisi tertinggi.

Sebaliknya, kecamatan-kecamatan dengan jumlah keluarga dan individu Desil 1 relatif lebih rendah umumnya berada di kawasan perkotaan atau pinggiran, seperti Margahayu, Cilengkrang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, dan Katapang. Di wilayah-wilayah ini, jumlah keluarga Desil 1 tercatat di bawah 1.500 keluarga, dengan jumlah individu Desil 1 kurang dari 4.000 orang. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, layanan pendidikan, serta infrastruktur dasar. Namun demikian, meskipun jumlahnya lebih kecil secara absolut, tingkat kerentanan sosial di kawasan padat penduduk tetap perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Secara keseluruhan, distribusi keluarga dan individu Desil 1 di Kabupaten Bandung memperlihatkan adanya kesenjangan spasial kemiskinan, di mana wilayah selatan dan sebagian wilayah tengah masih menjadi konsentrasi utama kemiskinan. Data ini menjadi dasar penting bagi Kabupaten Bandung dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis wilayah, dan disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing kecamatan.

3.2 ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN

3.2.1 BIDANG KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

3.2.1.1 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Kabupaten Bandung mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari 6,4 persen di tahun 2023 menjadi 6,19 persen di tahun 2024. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung relatif lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 7,46 persen di tahun 2024.



Gambar 3.8 Analisis Karakteristik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu 11,93 persen sedangkan Kota Depok menjadi kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah sebesar 2,34 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung menduduki peringkat ketujuh kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung meskipun lebih besar daripada Kota Bandung dan Kota Cimahi yang memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,87% dan 4,39%, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota perbatasan lainnya seperti Kabupaten Sumedang (9,1%) dan Kabupaten Garut (9,68%).

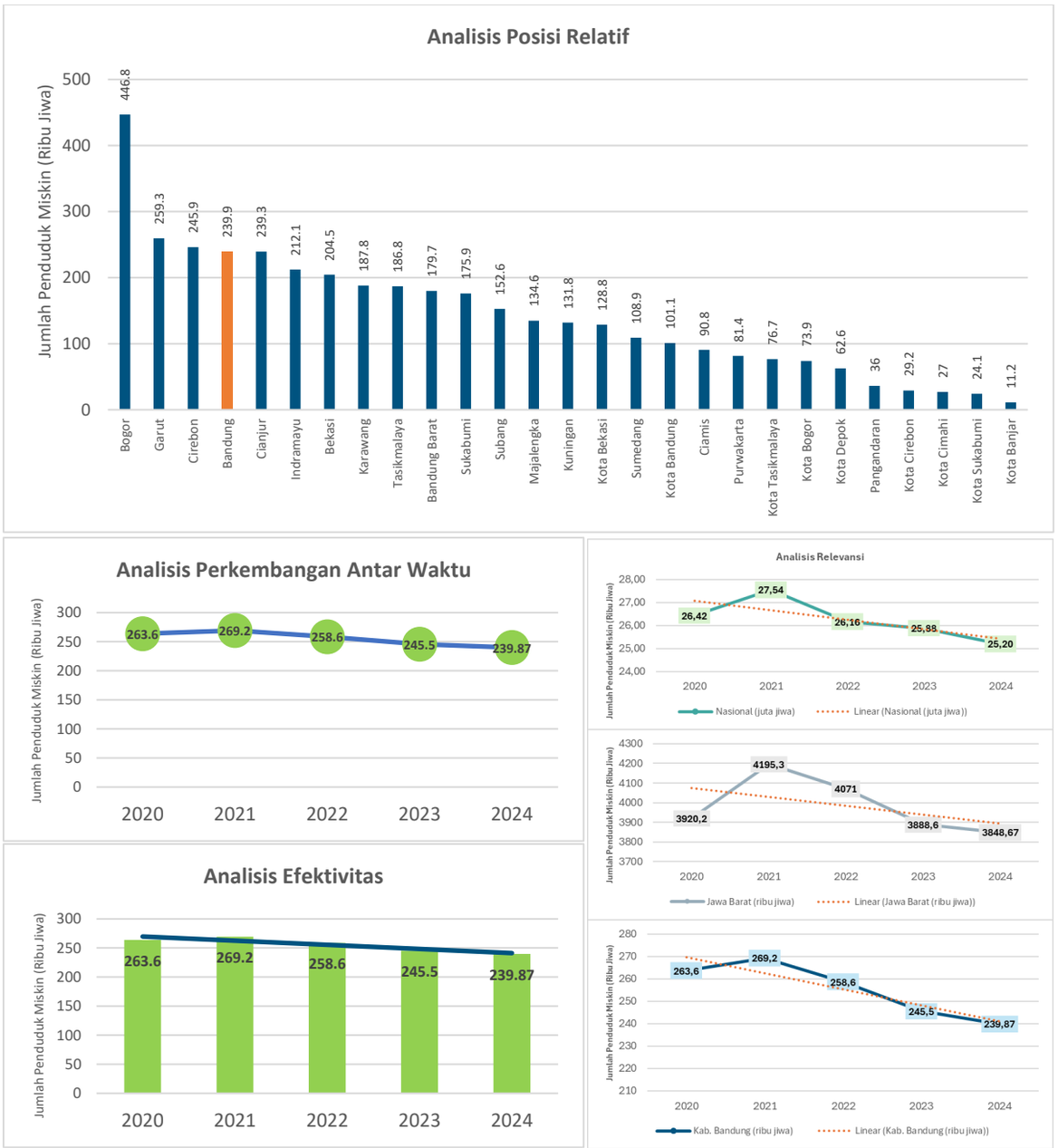
Tren persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung pada saat pandemi COVID-19 berlangsung sempat mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,91% dari 5,94% pada tahun 2019, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 7,15%. Walaupun demikian, persentase penduduk miskin di tahun 2020 dan 2021 ini berada di bawah capaian Nasional yaitu di angka 9,78%. Di tahun 2022, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung menunjukkan perbaikan sehingga berada pada besaran 6,8%. Penurunan persentase penduduk miskin disebabkan adanya perbaikan perekonomian sehingga lebih banyak sektor ekonomi yang kembali bangkit dan menyerap tenaga kerja secara masif. Pada tahun 2023-2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung terus mengalami tren positif, yakni menurun hingga 6,4% pada tahun 2023 dan 6,19% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas, persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung Tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan efektivitas program dan kegiatan percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin berdasarkan data BPS.

Analisis Relevansi menggambarkan kesesuaian perkembangan kondisi suatu pemerintah kabupaten/kota terhadap pemerintah provinsi dan nasional. Grafik di atas menunjukkan analisis relevansi persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung terhadap rata-rata Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan fluktuasi persentase penduduk miskin Kabupaten Bandung dari tahun 2020-2024 memiliki pola yang sama dengan perkembangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung memiliki relevansi dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dari grafik terlihat pada Tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Bandung masih berada pada angka 6,91%, sedangkan Provinsi Jawa Barat berada pada angka 7,88% dan Nasional berada pada angka 9,78%. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan Kabupaten Bandung menjadi 6,19%, Provinsi Jawa Barat pada angka 7,46% dan Nasional 9,03%.

3.2.1.2 JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung berdasarkan data BPS tahun 2024 sebanyak 239,87 ribu jiwa atau 6,19% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung ini merupakan yang terbanyak keempat di Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang besar sehingga jumlah penduduk miskinnya pun menjadi besar, meskipun secara persentase berada pada urutan tujuh terendah. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk miskin 446,8 ribu jiwa. Kabupaten Bandung sendiri menempati urutan keempat jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat setelah Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon.



Gambar 3.9 Analisis Karakteristik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

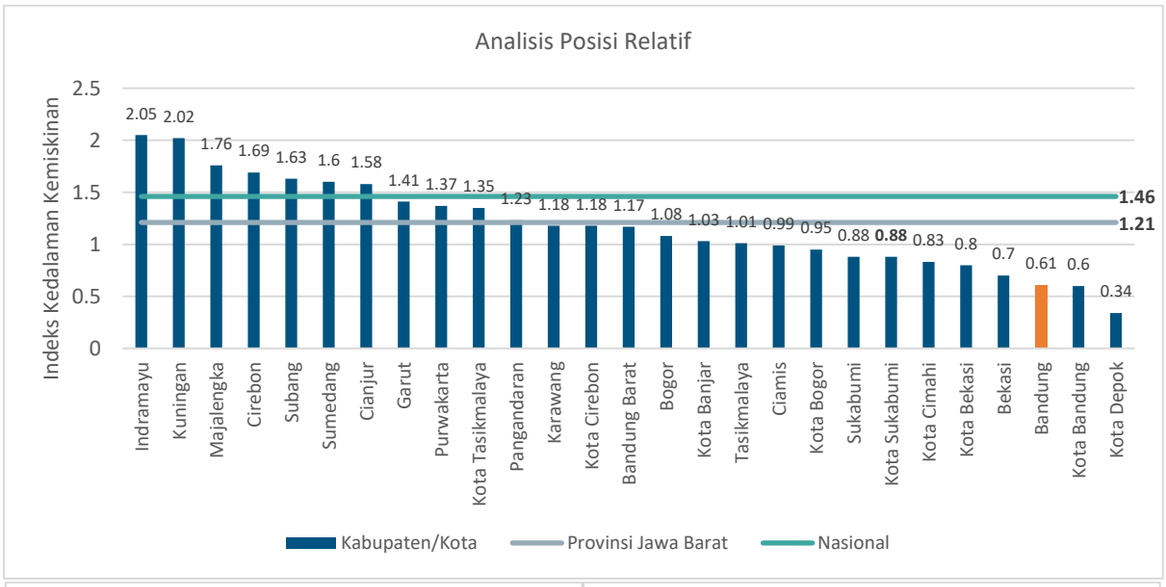
Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung pada tahun 2020 hingga tahun 2021 menunjukkan adanya tren peningkatan, namun sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung terus menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 ada peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 (232,2 ribu jiwa). Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin Kabupaten Bandung meningkat menjadi 263,6 ribu jiwa dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 269,2 ribu jiwa. Peningkatan ini sebagai akibat adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada aktivitas ekonomi baik disektor formal maupun informal. Banyaknya sektor perekonomian yang mengalami perlambatan mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga meningkat.

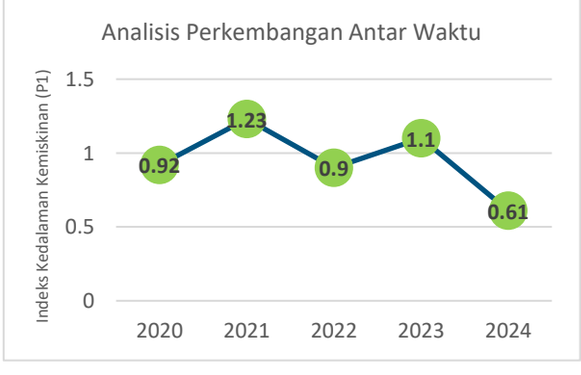
Berdasarkan hasil analisis efektivitas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung menunjukkan tren penurunan. Adanya perbaikan

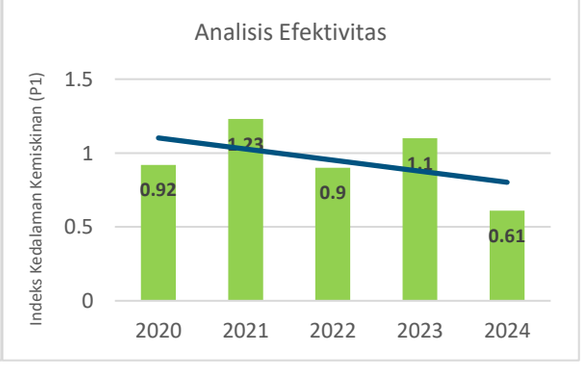
perekonomian pasca pandemi COVID-19 telah berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2022. Hal tersebut juga ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan kemiskinan yang secara terintegrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan *stakeholder* lainnya. Secara relevansi, tren kenaikan dan penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung menunjukkan kemiripan dengan kondisi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi antara kondisi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung dengan kondisi penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

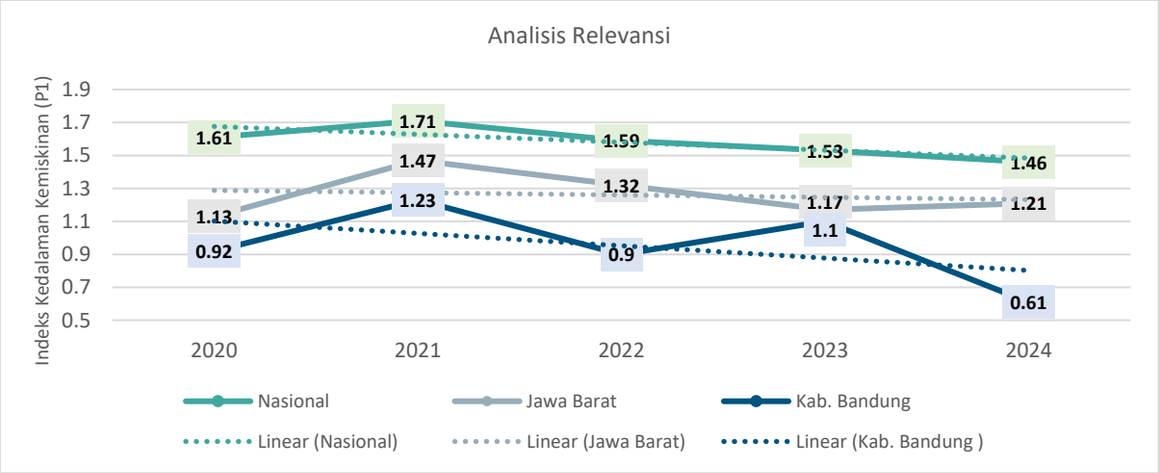
3.2.1.3 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2024 adalah sebesar 0,61. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bandung berada pada posisi ketiga terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bandung lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan Jawa Barat (1,21) dan Indonesia (1,46). Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bandung tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.









Gambar 3.10 Analisis Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Perkembangan antarwaktu indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Di tahun 2021, terjadi peningkatan P1 yang cukup tinggi yakni dari 0,92 di tahun 2020 menjadi 1,23 di tahun 2021. Peningkatan P1 ini menunjukkan bahwa Pandemi COVID-19 berdampak pada merosotnya pendapatan masyarakat miskin sehingga daya beli menurun drastis. Penurunan P1 yang cukup signifikan terjadi di tahun 2022 di mana penurunan yang terjadi sebesar 0,33 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023, P1 mengalami peningkatan kembali menjadi 1,1 poin. Meski begitu, pada tahun 2024 P1 mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan (0,49 poin dibandingkan tahun 2023) yakni menjadi 0,61 poin, sekaligus menjadi capaian terbaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

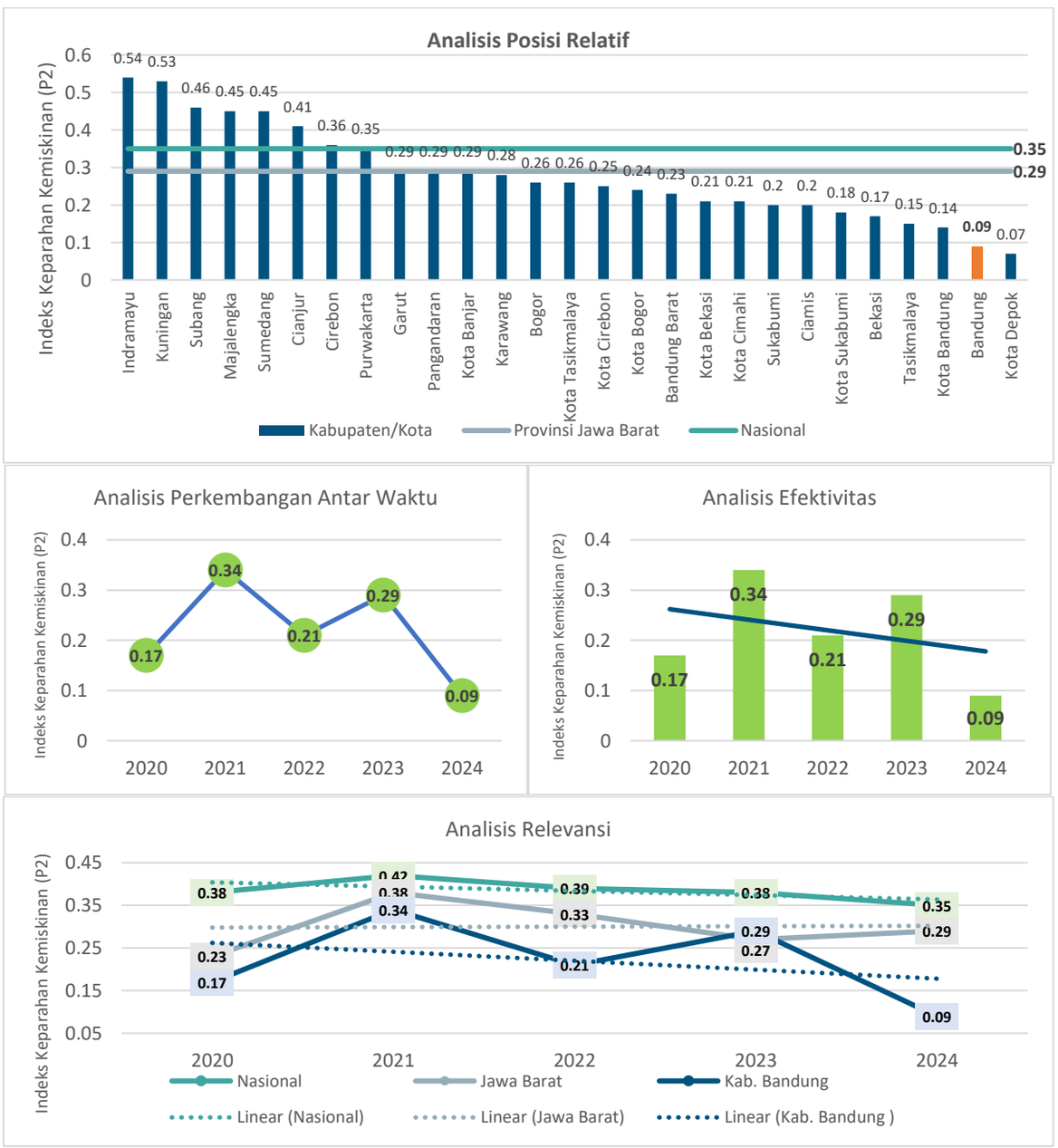
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bandung periode 2020-2024 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung yang dijalankan secara komprehensif cukup efektif untuk menurunkan P1 di Kabupaten Bandung. Untuk itu, program penurunan kemiskinan di Kabupaten Bandung perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan agar P1 Kabupaten Bandung lebih konsisten mengalami penurunan, tidak fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis relevansi, kenaikan dan penurunan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Bandung cukup relevan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu 2020-2022, namun ada perbedaan tren pada tahun 2023-2024. Meski begitu, secara keseluruhan, capaian P1 Kabupaten Bandung selalu lebih rendah (baik) dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3.2.1.4 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan yang dikenal dengan istilah P2, adalah kesenjangan pengeluaran antar sesama masyarakat miskin atau perbandingan jumlah pengeluaran RTM (Rumah Tangga Miskin) yang satu dibandingkan dengan RTM lainnya dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka P2 berarti tingkat kesenjangan pengeluaran/ belanja di antara

masyarakat miskin semakin besar, sebaliknya semakin kecil P2, berarti kesenjangan pengeluaran antar masyarakat miskin dalam suatu wilayah juga semakin kecil.

Berdasarkan data BPS, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung di tahun 2024 sebesar 0,09. Capaian ini lebih baik dari capaian Nasional yaitu sebesar 0,35 dan capaian Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 0,29. P2 yang semakin kecil berarti semakin baik, begitu pula sebaliknya semakin besar maka semakin tidak baik karena ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin melebar. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Jawa Barat, P2 Kabupaten Bandung menempati capaian posisi kedua terendah. Kabupaten dengan nilai P2 terendah di Jawa Barat adalah Kabupaten Depok sedangkan nilai P2 tertinggi adalah Kota Tasikmalaya dengan nilai indeks keparahan kemiskinan masing-masing sebesar 0,07 dan 0,54.



Gambar 3.11 Analisis Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Dari perkembangan antar waktu, terlihat perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam rentang waktu dari tahun 2020-2024 cukup fluktuatif. Ketimpangan pengeluaran pada penduduk miskin meningkat pada 2021 menjadi 0,34 dibandingkan tahun 2020 (0,17). Angka tersebut kembali turun di tahun 2022 menjadi 0,21, lalu kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,29. Pada tahun 2024, P2 Kabupaten Bandung memiliki capaian yang baik yakni dengan kembali turun menjadi 0,09. Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bandung harus tetap mewaspadai peningkatan Indeks Keparahan Kemiskinan ini pada tahun-tahun selanjutnya, seperti *second round effect* dari kenaikan harga BBM dan ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan harga energi dan komoditas juga perlu dicarikan solusinya dengan strategi yang terarah agar besaran Indeks Keparahan Kemiskinan ini tidak kembali meningkat.

Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa program penurunan kemiskinan di Kabupaten Bandung perlu dilanjutkan dan terus ditingkatkan agar P2 Kabupaten Bandung lebih konsisten mengalami penurunan, tidak fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis relevansi, kenaikan dan penurunan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bandung cukup relevan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun waktu 2020-2022, namun ada perbedaan tren pada tahun 2023-2024. Meskipun demikian, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bandung menunjukkan perbaikan yang signifikan pada tahun 2024 dan dengan upaya yang tepat sasaran diharapkan tren penurunan akan terus terjadi.

3.2.1.5 RASIO GINI

Rasio Gini adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat. Nilai rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin besar ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Indikator ini sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerataan. Dengan memantau perubahan rasio Gini dari waktu ke waktu, pemangku kepentingan dapat menilai apakah pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif dan mampu mengurangi kesenjangan sosial.



Gambar 3.12 Analisis Karakteristik Rasio Gini Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis posisi relatif, nilai Rasio Gini Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,364. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Bandung berada pada kategori ketimpangan sedang, dan relatif lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat (0,421) maupun Nasional (0,379). Posisi Kabupaten Bandung berada pada kelompok menengah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi, di antaranya Kabupaten Bandung Barat (0,4), Kota Cimahi (0,402), dan Kota Bandung (0,44). Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Sumedang (0,337) dan Kabupaten Garut (0,324) menunjukkan nilai Rasio Gini yang lebih rendah, yang artinya lebih baik.

Selanjutnya, apabila dilihat dari analisis perkembangan antar waktu, Rasio Gini Kabupaten Bandung selama periode 2020–2024 memperlihatkan tren fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020 nilai Rasio Gini tercatat terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 0,348 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 nilai Rasio Gini sedikit meningkat menjadi 0,364. Meskipun terjadi sedikit kenaikan di tahun terakhir, secara umum tingkat ketimpangan di Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan.

Dari hasil analisis efektivitas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang diarahkan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup positif. Nilai Rasio Gini Kabupaten Bandung dalam tiga tahun terakhir yang secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat menandakan bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Bandung telah relatif efektif dalam menekan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, analisis relevansi antara tren Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan nasional menunjukkan pola yang relatif stabil, meskipun Kabupaten Bandung menunjukkan tren fluktuatif cenderung menurun sedangkan Provinsi Jawa Barat dan nasional menunjukkan tren fluktuatif cenderung meningkat. Kestabilan arah perkembangan ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten telah berjalan sinergis dan saling mendukung.

3.2.2 BIDANG KETENAGAKERJAAN

Analisis bidang ketenagakerjaan yang merupakan indikator daerah, juga sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%).

3.2.2.1 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah

angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Bandung Tahun 2024 dilihat dari posisi relatifnya berada pada urutan ke-7 terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat atau sebesar 6,36%. Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Kabupaten Bandung Tahun 2024 dilihat dari posisi relatif dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.13 Analisis Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS (diolah)

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan TPT yang cukup signifikan dari 5,51 persen di tahun 2019 menjadi 8,58 persen di tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi karena dampak Pandemi COVID-19. Meskipun demikian, di

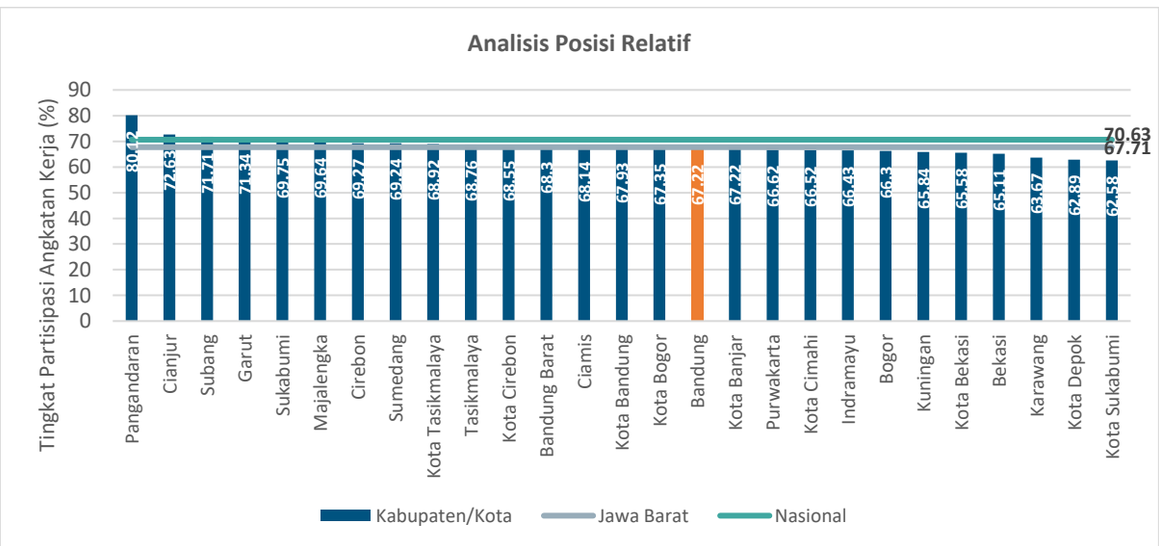
tahun 2021 hingga 2024 terjadi penurunan pada TPT yang menunjukkan bahwa perekonomian pasca pandemi COVID-19 telah mengalami peningkatan kembali. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung pada Agustus 2024 adalah sebesar 6,36 persen atau turun sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 6,52 persen.

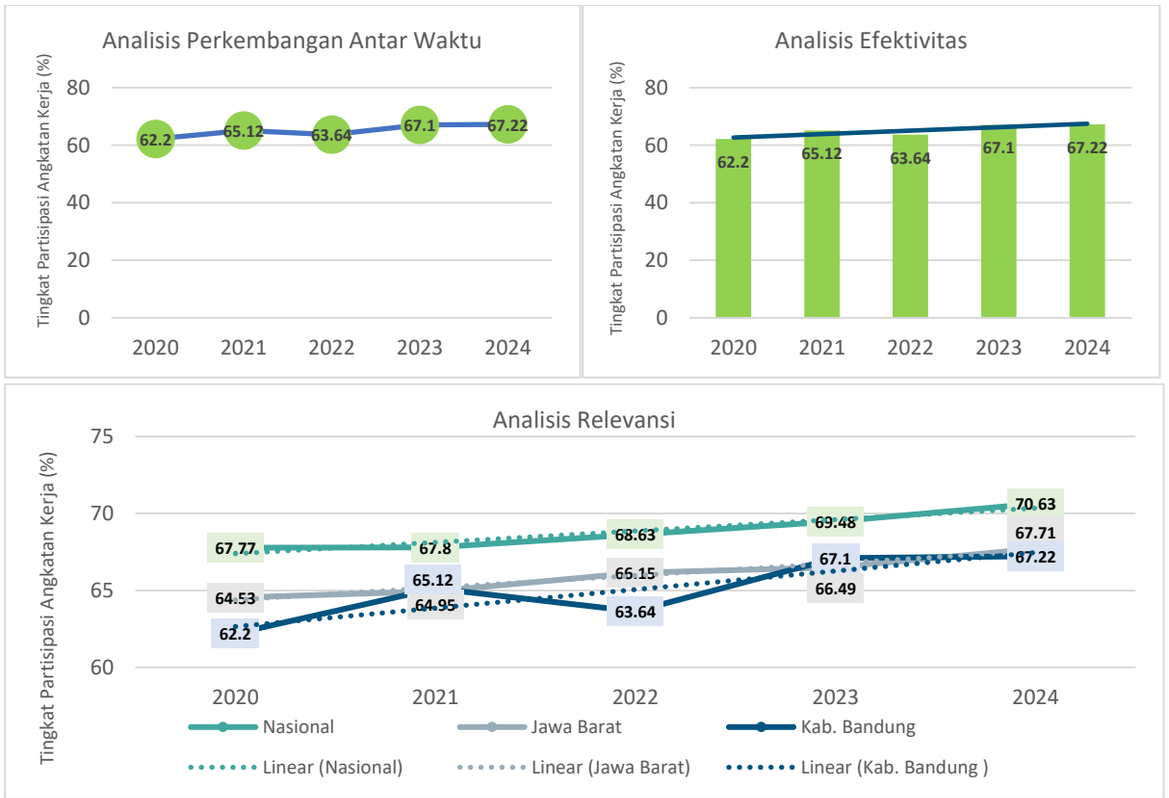
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung dari tahun 2020 sampai 2024 selalu lebih rendah dibandingkan capaian TPT Jawa Barat namun lebih tinggi dibandingkan capaian TPT Nasional. Pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, TPT di Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Walaupun demikian peningkatan TPT ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung, namun juga terjadi di Jawa Barat maupun di Indonesia. Guna memperbaiki kondisi ketenagakerjaan khususnya yang dilihat dengan menggunakan TPT, pemerintah Kabupaten Bandung perlu menjadikan TPT sebagai prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan dan ditangani agar indikator ini terus membaik.

Berdasarkan analisis efektivitas, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung memiliki tren penurunan yang mengindikasikan efektifnya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung dalam menurunkan TPT. Sedangkan apabila ditinjau dari analisis relevansi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, terdapat relevansi antara capaian TPT di Kabupaten Bandung dengan capaian TPT di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3.2.2.2 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.





Gambar 3.14 Analisis Karakteristik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bandung Tahun 2020-2024

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan data BPS, TPAK Kabupaten Bandung Tahun 2024 sebesar 67,22%. Capaian TPAK ini masih lebih rendah dari capaian TPAK Nasional dan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 70,63 % dan 67,71%. Pada tahun 2024, TPAK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Pangandaran, yaitu sebesar 80,12%, sedangkan yang terendah adalah Kota Sukabumi yaitu sebesar 62,58 %. TPAK Kabupaten Bandung dari tahun 2020-2024 memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2024 ini, yaitu sebesar 67,22%.

Jika dilihat dari analisis efektivitas pada grafik di atas tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bandung dari tahun 2020–2024, tren TPAK Kabupaten Bandung mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sudah efektif untuk meningkatkan tingkat partisipasi Angkatan kerja. Adapun apabila dilihat dari relevansinya dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sudah relevan dengan Provinsi Jawa Barat namun kurang relevan dengan kebijakan di tingkat Nasional.

3.2.3 BIDANG KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Meningkatnya derajat Kesehatan penduduk menjadi program pembangunan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Program tingkat nasional harus bersinergi dengan tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kabupaten. Semakin baik indikator-indikator kesehatan suatu masyarakat maka

semakin baik pula tingkat kesehatan masyarakat. Artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sudah semakin baik dan hal tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesehatan merupakan salah satu komponen dasar yang pelayanannya bersifat wajib dipenuhi oleh pemerintah. Kualitas Kesehatan penduduk berkorelasi positif dengan produktivitas penduduk. Secara agregat dalam satu Kabupaten/Kota secara tidak langsung aspek kesehatan penduduk akan berpengaruh terhadap perekonomian wilayah.

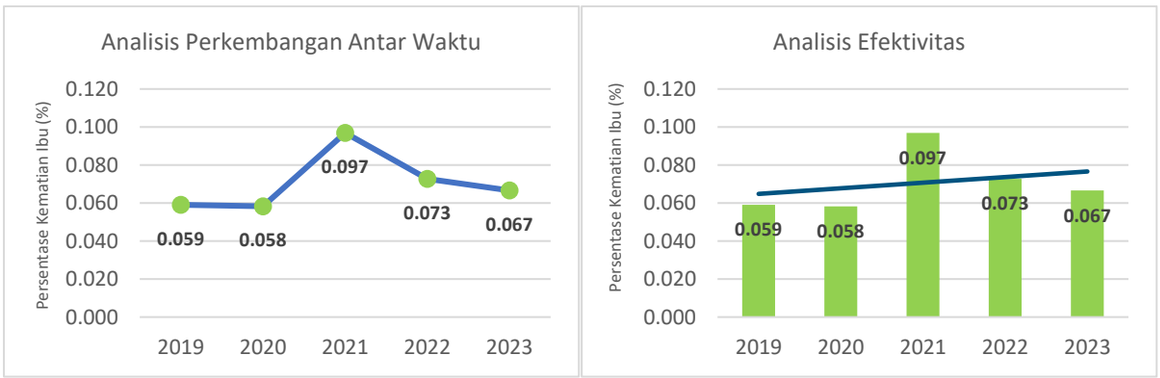
Upaya untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, dalam rangka mengurangi tindakan kuratif. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan profesional terus dilakukan agar penyediaan layanan kesehatan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan infrastruktur yang sudah baik saja. Indikator kesehatan dapat menunjukkan sejauh mana upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa indikator yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS khususnya dalam bidang kesehatan, dapat digunakan untuk melihat gambaran derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Bandung. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan apakah suatu negara, dalam tataran lebih luas atau provinsi dan kabupaten/kota dalam tataran daerah memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik atau tidak. Indikator yang umum dipakai adalah: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)/Tingkat Kesakitan, Umur Harapan Hidup dan *Stunting*.

3.2.3.1 ANGKA KEMATIAN IBU

Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu (AKI) ialah kematian perempuan ketika hamil atau dalam 42 hari setelah terminasi kehamilan (melahirkan/keguguran/aborsi) yang disebabkan oleh hal-hal terkait dengan kehamilan atau pemeliharaannya, per 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Indikator kematian ibu dapat bermanfaat untuk pengembangan program-program seperti: program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*); program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan; penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan; penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyambut kelahiran; di mana semua program tersebut bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Namun dalam analisis di bawah ini, data yang digunakan adalah data persentase kematian ibu.

Definisi persentase kematian ibu yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup dalam satu tahun di Kabupaten Bandung. Adapun persentase yang dimaksud bukanlah data AKI, karena jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Bandung tidak mencapai 100.000 jika ditotalkan, maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan perhitungan AKI. Oleh karena itu pada analisis ini tidak bisa menggunakan definisi operasional Angka Kematian Ibu (AKI), sehingga analisis posisi relatif dan analisis relevansi tidak bisa dilakukan, di mana

kedua analisis tersebut seharusnya menyandingkan AKI nasional, AKI Provinsi Jawa Barat, dan AKI kabupaten/kota se-Jawa Barat. Berikut hasil analisis persentase kematian ibu dalam lima tahun ke belakang.



Gambar 3.15 Analisis Karakteristik Persentase Kematian Ibu di Kabupaten Bandung

Sumber: Olah Data untuk Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2023, 2024 (diolah)

Apabila melihat hasil analisis perkembangan antar waktu pada gambar di atas, perkembangan persentase kematian ibu di Kabupaten Bandung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif, dengan peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021. Selain itu dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan kesehatan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang belum cukup berhasil karena masih memperlihatkan kecenderungan peningkatan persentase kematian ibu berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2023. Meski demikian persentase kematian ibu pada tahun 2022 hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan. Diharapkan penurunan tersebut dapat konsisten dicapai pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.3.2 JUMLAH KEMATIAN BAYI

Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) merujuk pada jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB dapat menjadi indikator terhadap ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan layanan kesehatan, terutama yang terkait dengan perinatal. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan ibu, dan status gizi keluarga juga memengaruhi AKB. Oleh karena itu, AKB dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Mengacu pada data yang tersedia di Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, mulai tahun 2017 tidak dikeluarkan informasi mengenai Angka Kematian Bayi. Maka dari itu, kematian bayi ditinjau menurut penyebab kematian bayi (+neonatal) di Kabupaten Bandung selama 5 tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

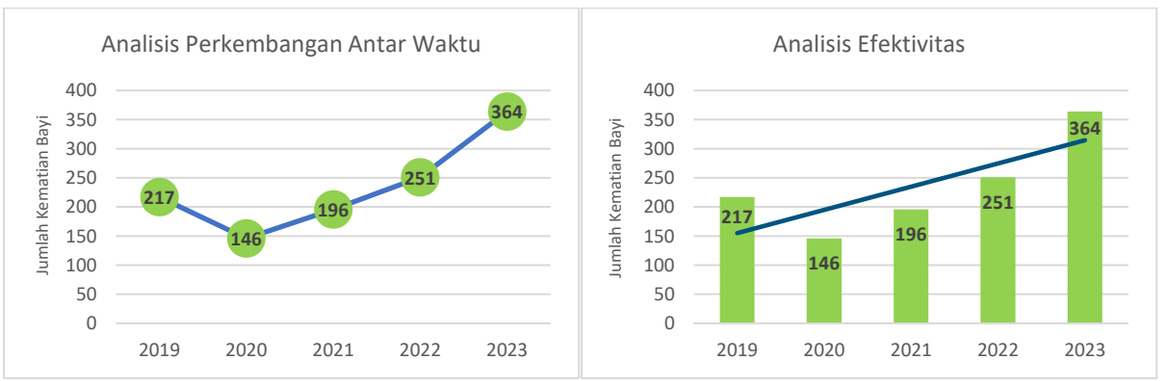
Tabel 3.1 Pola Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023

Penyebab Kematian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Asfiksia	36	34	43	43	92
BBLR	43	45	88	138	155
TN	0	0	0	0	0

Penyebab Kematian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Infeksi	0	0	0	0	55
Kecacatan	13	7	16	19	18
Ikterus	0	0	0	0	-
Sepsis	1	3	1	4	-
Hipotermia	0	0	0	0	-
Pneumonia	4	4	5	11	-
Diare	4	4	9	5	-
Sebab lain	116	49	19	31	44
Total	217	146	196	251	364
Lahir Mati	90	72	115	94	173

Sumber: Olah Data untuk Profil Kesehatan Kab. Bandung 2023, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kasus kematian bayi mayoritas disebabkan oleh BBLR, Asfiksia, dan kecacatan. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi (usia kehamilan) yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Beberapa faktor predisposisi yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) disebabkan oleh variabel-variabel yang terkait dengan ibu, seperti usia, jumlah kelahiran sebelumnya (paritas), kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, kekurangan gizi atau malnutrisi, pengalaman trauma, kelelahan, kebiasaan merokok, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Asfiksia adalah kondisi di mana bayi yang baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Tingginya angka kasus asfiksia menunjukkan adanya permasalahan gizi pada ibu hamil, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, perilaku, dan lingkungan kesehatan masyarakat. Rendahnya tingkat sosial ekonomi juga menyebabkan masyarakat enggan membawa bayi mereka ke fasilitas kesehatan meskipun ada tanda-tanda masalah kesehatan.



Gambar 3.16 Analisis Masalah Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Bandung

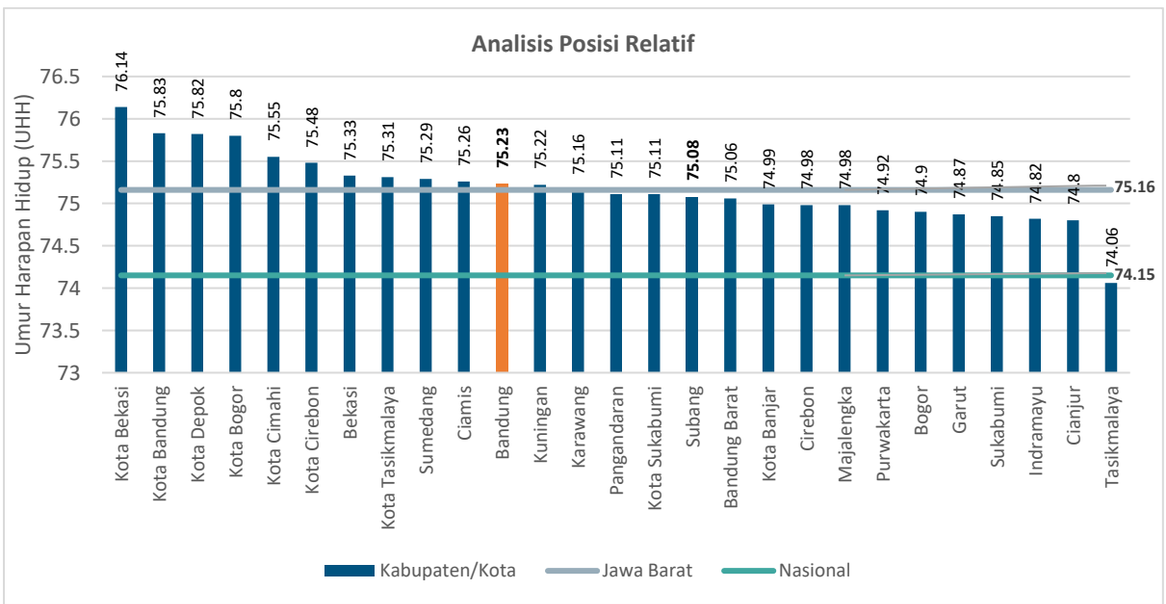
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2022, 2023 (diolah)

Apabila melihat perkembangan antar waktu pada gambar di atas, perkembangan Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Bandung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 fluktuatif, dengan penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, lalu kembali meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Selain itu, dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan kesehatan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang belum cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan

peningkatan Jumlah Kematian Bayi berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2023.

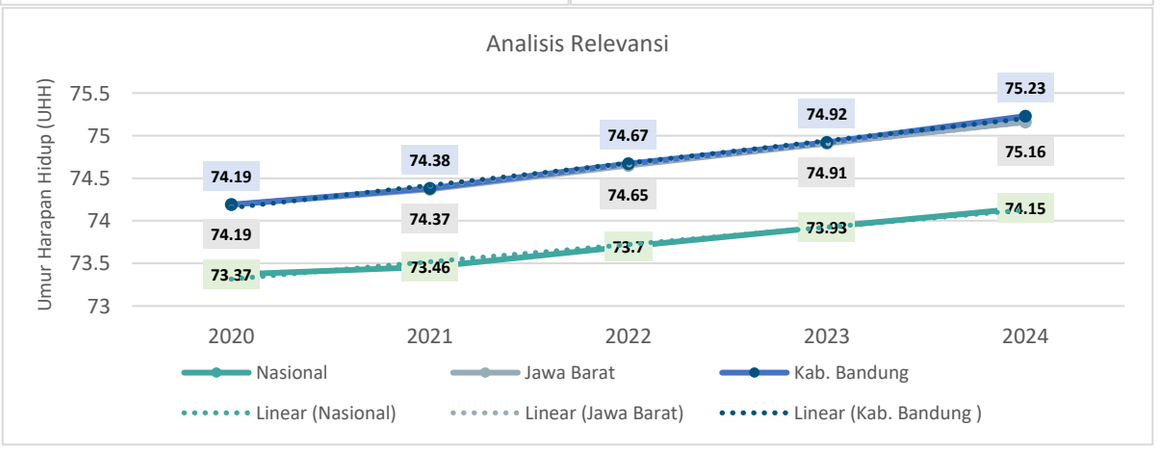
3.2.3.3 UMUR HARAPAN HIDUP

Keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan salah satunya tercermin dari Umur Harapan Hidup (UHH). Keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi cerminan keberhasilan bidang kesehatan. Untuk itulah UHH selalu menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan itu. UHH pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan salah satu komponen dari IPM. UHH masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan IPM suatu daerah naik, sehingga ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.









Gambar 3.17 Analisis Karakteristik Umur Harapan Hidup Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa UHH Kabupaten Bandung pada tahun 2024 yaitu 75,23 tahun sedangkan Provinsi Jawa Barat adalah 75,16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian UHH Kabupaten Bandung sudah lebih baik dari capaian UHH Provinsi Jawa Barat. Sedangkan apabila dianalisis perkembangan antar waktu, UHH Kabupaten Bandung selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Dengan demikian, rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup di Kabupaten Bandung selalu meningkat. Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa layanan Kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bandung kepada masyarakat Kabupaten Bandung efektif pelaksanaannya. Hal ini ditunjukkan dengan tren peningkatan yang positif setiap tahunnya. UHH Kabupaten Bandung dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Barat dan UHH Nasional sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara konsisten bersama-sama mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional dalam peningkatan UHH sudah sangat relevan.

3.2.3.4 PREVALENSI STUNTING

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak mengalami kondisi gagal tumbuh. Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi menyebabkan anak memiliki tinggi di bawah anak seusianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study, 2006).

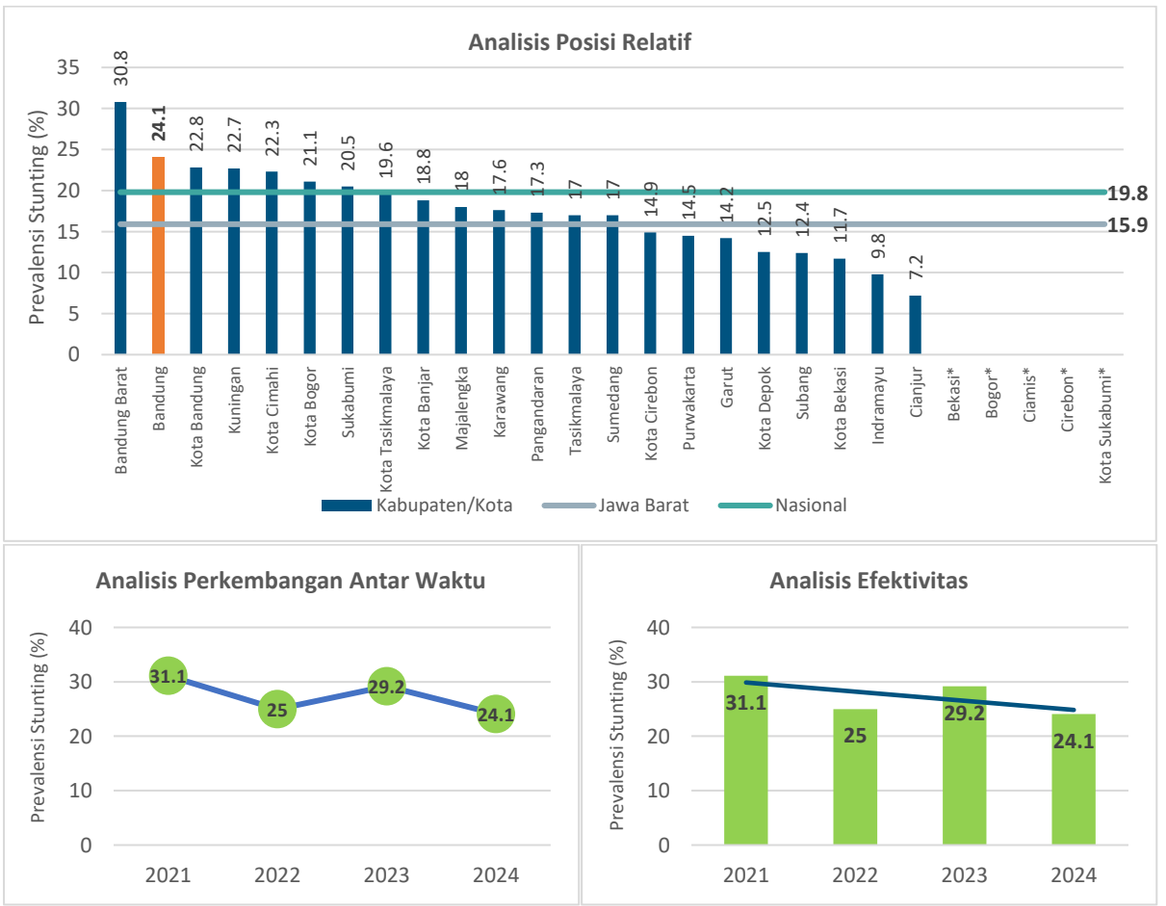
Sehubungan dengan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang memuat strategi nasional (stranas) percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 juga mengatur terkait rencana kegiatan dan indikator-indikator yang harus dipenuhi baik pada level Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga pada level Desa.

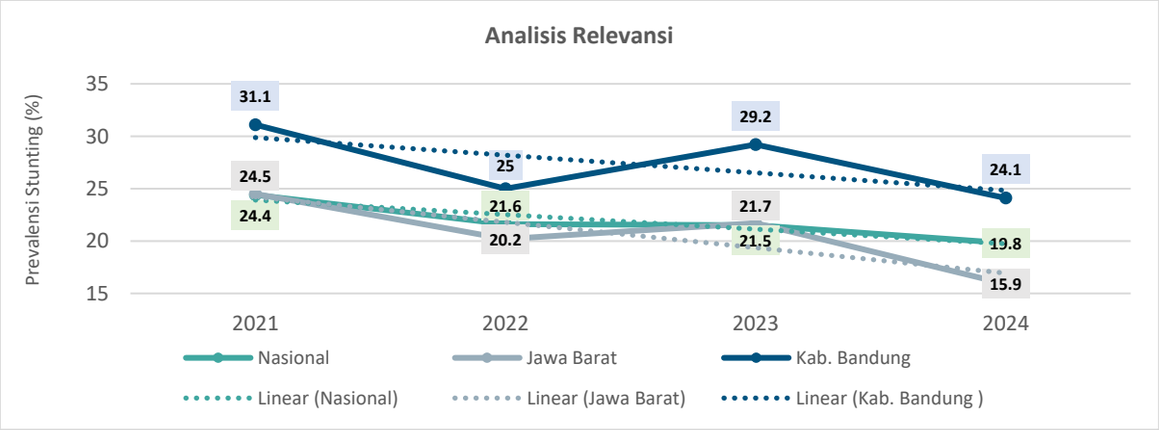
Sesuai arahan dari pemerintah pusat, terdapat perubahan strategi nasional dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), yakni kaitan Aksi Konvergensi. Transformasi Aksi Konvergensi mengacu pada perubahan strategis dalam pendekatan pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah. Transformasi ini bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam intervensi lintas sektor guna mencapai target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting. Mulai tahun 2025, terdapat 31 indikator intervensi konvergensi daerah, yang sasarannya meliputi:

- ibu hamil, ibu nifas & ibu menyusui : 5 indikator
- baduta (usia 0 – 23 bulan) : 10 indikator
- balita (usia 24 – 59 bulan) : 6 indikator
- remaja putri : 2 indikator
- calon pengantin : 2 indikator
- rumah tangga & masyarakat : 6 indikator

Kabupaten Bandung menjadi salah satu kabupaten/kota lokasi prioritas percepatan penurunan *stunting* sejak tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan 28 desa lokus prioritas penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor: 000.7.6/KEP.253-BAPPERIDA/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Intervensi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bandung Tahun 2025. Percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung dilaksanakan secara konvergen melalui Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* beserta inovasinya dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Ditetapkan pula tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS) pada level Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sebagai upaya pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* yang terintegrasi multilevel. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menuju Kabupaten Bandung dan Jawa Barat *Zero New Stunting*.





Gambar 3.18 Analisis Prevalensi Stunting Kabupaten Bandung

Sumber: SSGI Tahun 2024, 2025 (diolah)

Dari gambar di atas, posisi relatif prevalensi *stunting* Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa capaian prevalensi dimaksud pada tahun 2024 adalah sebesar 24,1% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024. Capaian tersebut berada di atas capaian prevalensi *stunting* Provinsi Jawa Barat (15,9%) maupun Nasional (19,8%). Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan prevalensi *stunting* Kabupaten Bandung berdasarkan SSGI dari tahun 20121 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2022 prevalensi stunting menunjukkan adanya penurunan dari 31,1% pada tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terdapat peningkatan kembali menjadi 29,2%. Upaya konvergensi penurunan *stunting* terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga pada tahun 2024, prevalensi *stunting* Kabupaten Bandung mengalami penurunan kembali menjadi 24,1%, capaian terendah dalam empat tahun terakhir. Dari grafik di atas, dapat dtinjau pula efektivitas program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang, di mana Kabupaten Bandung cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan penurunan prevalensi *stunting* berdasarkan SSGI. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, terlihat bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Bandung mengalami penurunan bersama-sama dengan Nasional, namun memang masih berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan *stunting* antara Kabupaten Bandung dan Nasional sudah relevan, namun dengan demikian perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan pendukung penurunan *stunting* sehingga tren penurunan prevalensi stunting ini dapat terjaga konsistensinya.

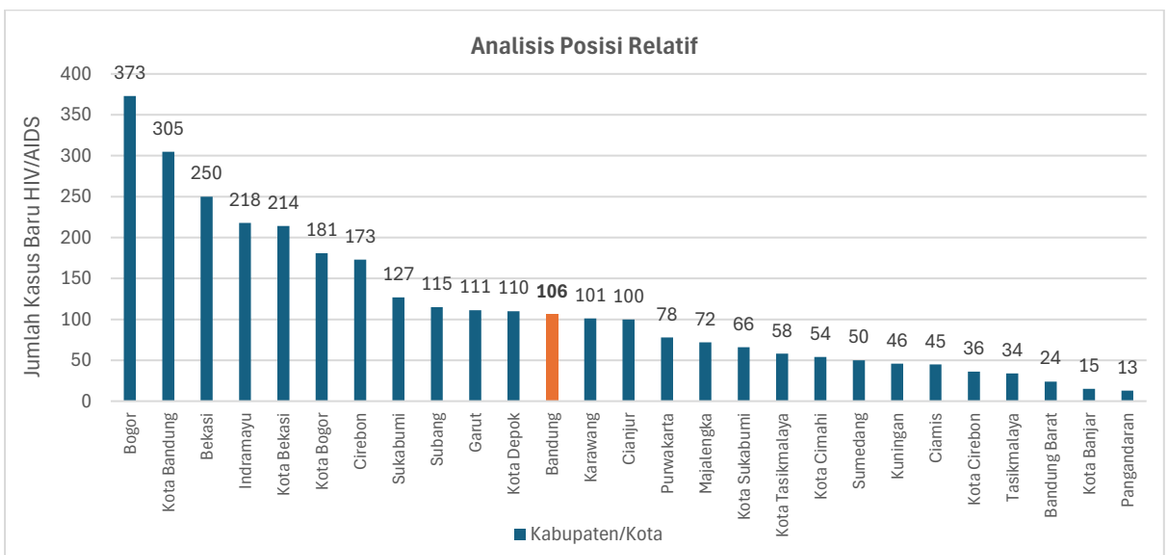
3.2.3.5 JUMLAH KASUS BARU HIV/AIDS

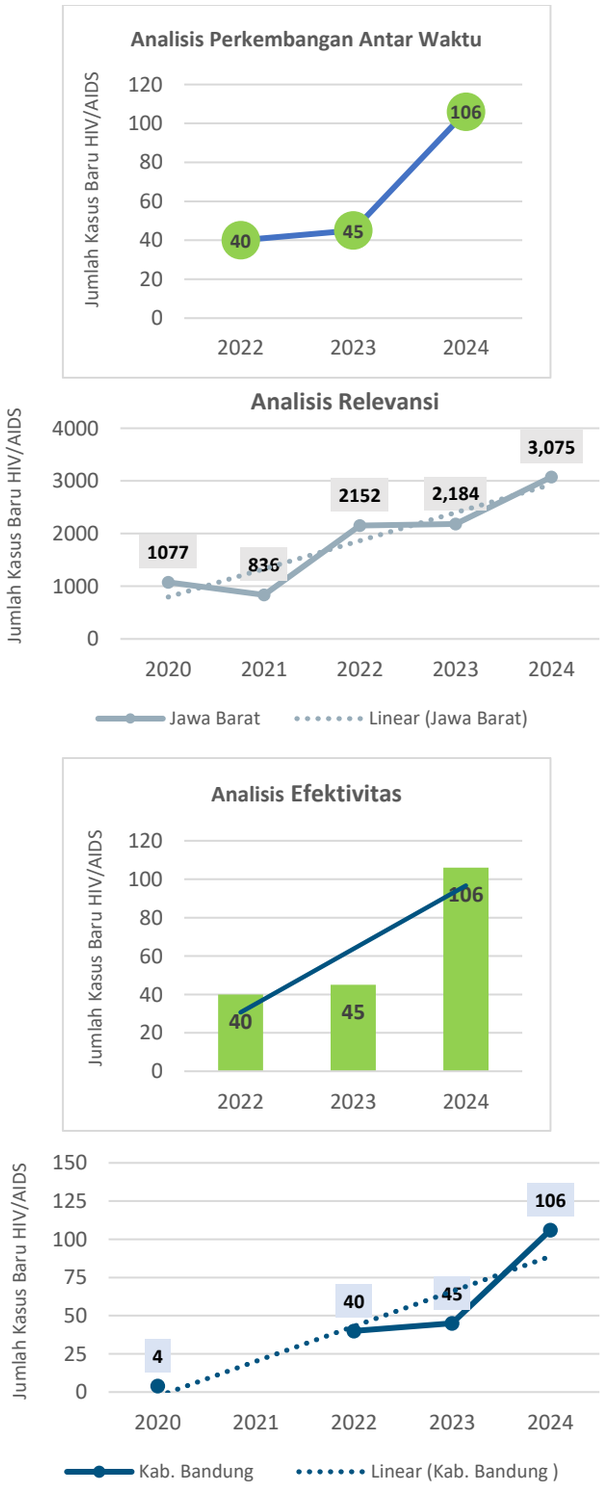
Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4 atau sel T penolong, yang bertugas melawan infeksi. Jika sistem kekebalan tubuh melemah akibat serangan virus ini, seseorang menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit tertentu, kondisi ini disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV, yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh telah rusak parah dan tidak mampu lagi melawan infeksi. Penularan virus HIV umumnya terjadi melalui hubungan seksual yang tidak

aman, berbagi jarum suntik, transfusi darah yang terkontaminasi, atau dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

Upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS merupakan salah satu fokus utama pembangunan kesehatan di Indonesia, yang diatur dalam berbagai kebijakan, termasuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan strategi nasional. Pemerintah melalui Kemenkes mendorong program penanggulangan yang komprehensif, dikenal dengan istilah strategi STOP (Suluh, Temukan, Obati, Pertahankan) HIV/AIDS. Strategi ini meliputi edukasi dan pencegahan penularan (Suluh), penemuan kasus baru secara aktif (Temukan), pengobatan Antiretroviral (ARV) sejak dini (Obati), serta kepatuhan dan retensi pengobatan (Pertahankan) untuk menekan laju infeksi baru dan meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV). Program ini juga menekankan pada upaya penghapusan stigma dan diskriminasi.

Dalam konteks penanggulangan penyakit menular di daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung secara berkelanjutan melaksanakan program pengendalian HIV/AIDS yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer maupun sekunder. Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi, serta disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan epidemiologi lokal. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi peningkatan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), upaya penemuan kasus baru melalui testing dan tracing, penyediaan layanan konseling dan tes HIV (VCT), serta memastikan ketersediaan dan kepatuhan pengobatan ARV bagi ODHIV. Pemantauan dan pelaporan jumlah kasus baru HIV/AIDS menjadi indikator kunci untuk mengevaluasi efektivitas program dan merumuskan langkah intervensi spesifik, terutama di wilayah dengan risiko penularan yang tinggi.





Gambar 3.19 Analisis Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS di Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dari gambar di atas, posisi relatif jumlah kasus baru HIV/AIDS menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Bandung berada pada posisi ke-12 di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 106 kasus baru HIV/AIDS. Capaian tersebut berada di bawah kabupaten/kota perbatasan, seperti Kabupaten Bandung Barat (24 kasus), Kabupaten Sumedang (50 kasus), dan Kota Cimahi (54 kasus). Namun Kabupaten Bandung masih relatif lebih baik dibandingkan capaian kabupaten/kota perbatasan lainnya seperti Kabupaten Garut (111 kasus) dan Kota Bandung (305 kasus). Kemudian apabila melihat perkembangan

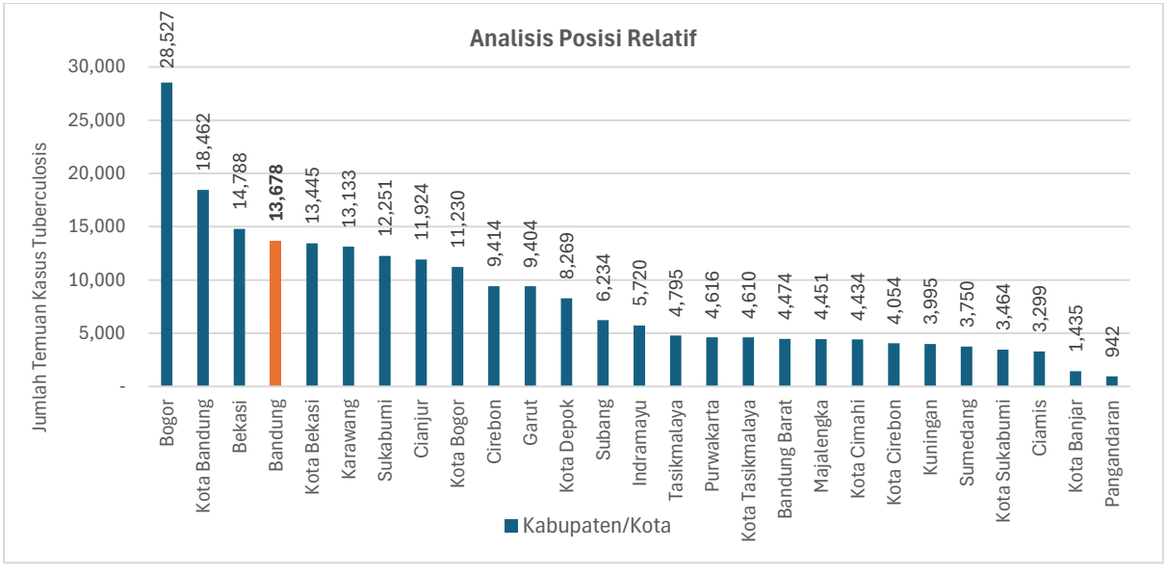
antar waktu, tren temuan kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan sehingga perlu diwaspadai. Pada tahun 2023 tercatat 45 kasus baru HIV/AIDS, jumlah tersebut meningkat cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 106 kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Bandung.

Dari grafik di atas dapat ditinjau pula efektivitas program dan kegiatan dalam rangka penurunan jumlah kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa belum efektifnya program dan kegiatan yang dilakukan karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan tren bukan penurunan. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, terlihat bahwa tren peningkatan jumlah kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Bandung mengalami pola yang mirip dengan tren peningkatan jumlah kasus baru HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan temuan kasus baru HIV/AIDS antara Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat sudah relevan, namun dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dalam penajaman program dan kegiatan yang mendukung penurunan kasus HIV/AIDS.

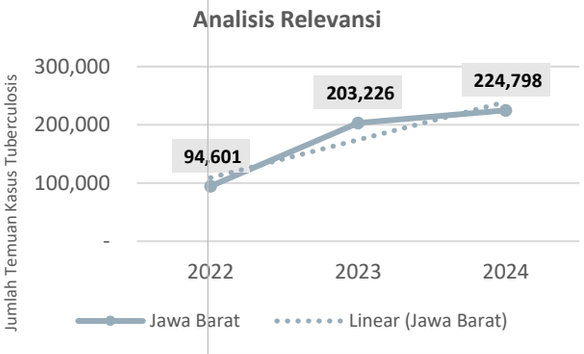
3.2.3.6 JUMLAH TEMUAN KASUS TUBERCULOSIS

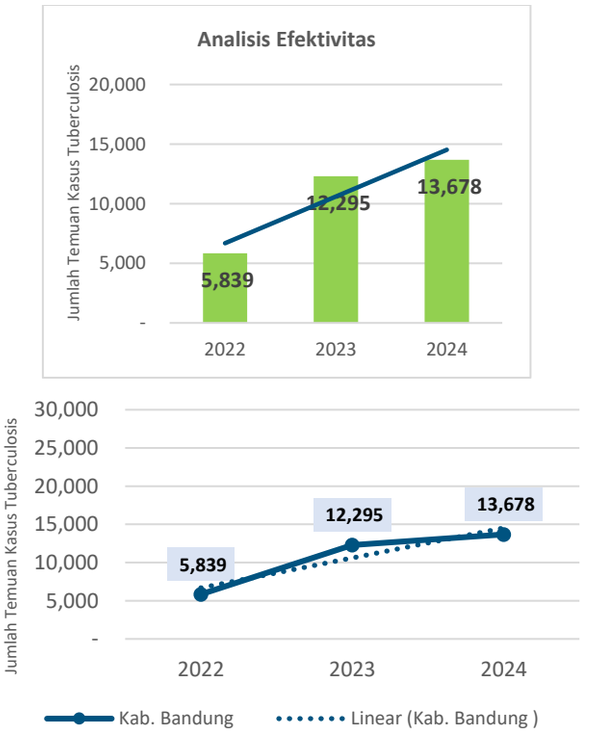
Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis*. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain. TB ditularkan melalui udara, yaitu ketika penderita TB aktif batuk, bersin, atau meludah, dan mengeluarkan kuman ke udara yang kemudian terhirup oleh orang lain. Meskipun dapat diobati dan disembuhkan, TB merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat penyakit infeksi di dunia. Penyakit ini seringkali menjadi masalah kesehatan yang signifikan di tengah masyarakat dengan tingkat kepadatan penduduk dan kemiskinan tinggi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap eliminasi TB pada tahun 2030 melalui target dan strategi nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Strategi nasional Eliminasi TB sebagaimana dimaksud pada Perpres tersebut, di antaranya adalah: (1) penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; (2) peningkatan akses layanan TB yang bermutu dan berpihak pada pasien; (3) intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TB; (4) peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TB; (5) peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TB; dan (6) penguatan manajemen program.


Analisis Posisi Relatif
Jumlah Temuan Kasus Tuberculosis
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
28,527
18,462
14,788
13,678
13,445
13,133
12,251
11,924
11,230
9,414
9,404
8,269
6,234
5,720
4,795
4,616
4,610
4,474
4,451
4,434
4,054
3,995
3,750
3,464
3,299
1,435
942
Bogor
Kota Bandung
Bekasi
Bandung
Kota Bekasi
Karawang
Sukabumi
Cianjur
Kota Bogor
Cirebon
Garut
Kota Depok
Subang
Indramayu
Tasikmalaya
Purwakarta
Kota Tasikmalaya
Bandung Barat
Majalengka
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kuningan
Sumedang
Kota Sukabumi
Ciamis
Kota Banjar
Pangandaran
Kabupaten/Kota


Analisis Perkembangan Antar Waktu
Jumlah Temuan Kasus Tuberculosis
20,000
15,000
10,000
5,000
-
5,839
12,295
13,678
2022
2023
2024


Analisis Relevansi
Jumlah Temuan Kasus Tuberculosis
300,000
200,000
100,000
-
94,601
203,226
224,798
2022
2023
2024
Jawa Barat
Linear (Jawa Barat)



Gambar 3.20 Analisis Jumlah Temuan Kasus Tuberculosis Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

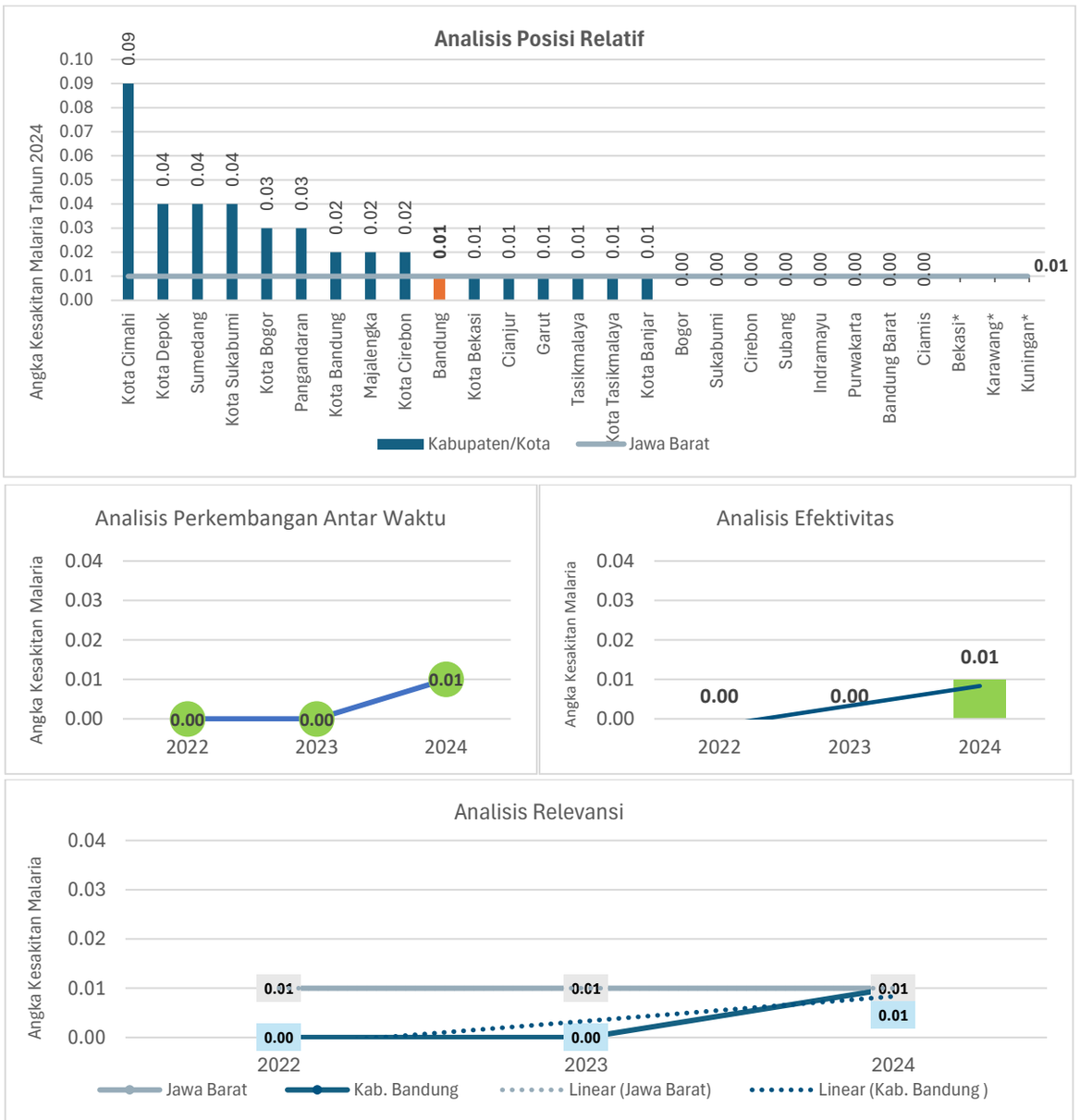
Dapat dilihat dari gambar di atas, berdasarkan analisis posisi relatif jumlah temuan kasus TB pada tahun 2024, Kabupaten Bandung berada pada posisi ke-4 tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah temuan13.678 kasus baru TB. Capaian tersebut berada di bawah capaian kabupaten/kota perbatasan, seperti Kabupaten Sumedang (3.750 kasus), Kota Cimahi (4.434 kasus), Kabupaten Bandung Barat (4.474 kasus), dan Kabupaten Garut (9.404 kasus). Namun Kabupaten Bandung masih relatif lebih baik dibandingkan capaian Kota Bandung (18.462 kasus). Kemudian apabila melihat perkembangan antar waktu, tren jumlah temuan kasus TB di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan sehingga perlu diwaspadai. Pada tahun 2023 tercatat 12.295 temuan kasus TB, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 13.678 temuan kasus TB di Kabupaten Bandung.

Dari grafik di atas dapat ditinjau pula efektivitas program dan kegiatan dalam rangka penurunan jumlah temuan kasus TB di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa belum efektifnya program dan kegiatan yang dilakukan karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan tren. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, terlihat bahwa tren peningkatan jumlah temuan kasus TB di Kabupaten Bandung mengalami pola yang mirip dengan tren peningkatan jumlah temuan kasus TB di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan temuan kasus TB antara Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat sudah relevan.

3.2.3.7 ANGKA KESAKITAN MALARIA

Malaria adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk betina Anopheles. Penyakit ini umumnya menyerang dengan gejala demam tinggi berulang,

menggigil, dan anemia. Indonesia, termasuk beberapa wilayah di Jawa Barat, masih memiliki daerah endemik malaria meskipun sebagian besar wilayah telah mencapai status eliminasi. Penyakit ini seringkali menjadi penghambat pembangunan sosial-ekonomi karena menyebabkan penurunan produktivitas dan membebani sistem kesehatan, sehingga pencegahan dan pengendaliannya menjadi prioritas.



Gambar 3.21 Analisis Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk di Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dari gambar di atas terlihat bahwa posisi relatif angka kesakitan malaria Kabupaten Bandung terhadap kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Bandung berada pada posisi tertinggi ke-9 bersama 6 kabupaten/kota lainnya dengan angka kesakitan malaria sebesar 0,01 kasus per 1.000 Penduduk. Capaian tersebut sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat. Kemudian apabila melihat perkembangan antar waktu, tren angka kesakitan malaria di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan sehingga perlu diwaspadai. Pada tahun 2023 tercatat angka kesakitan malaria Kabupaten Bandung

sebesar 0,00, namun angka tersebut meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2024.

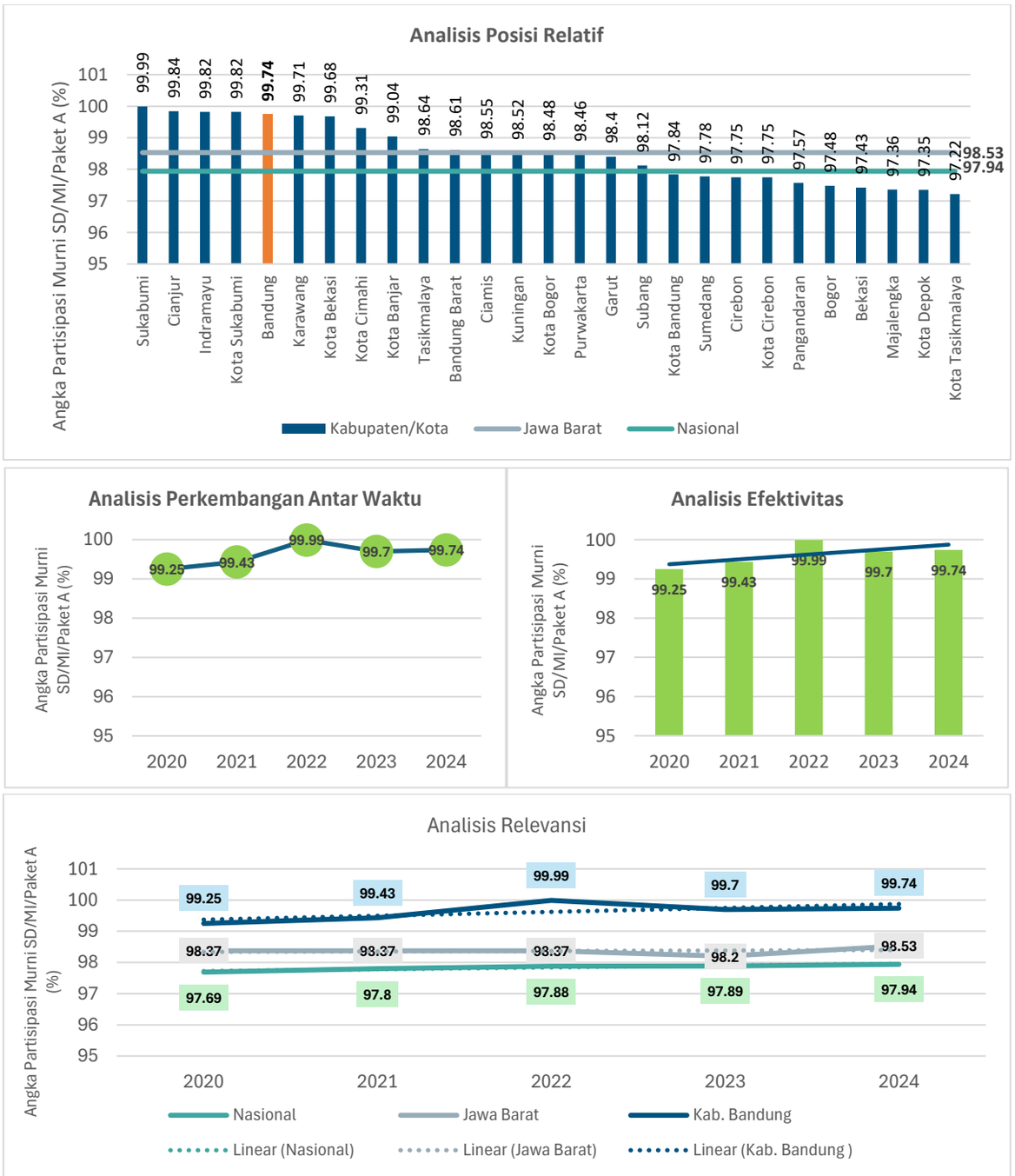
Dari grafik di atas dapat ditinjau pula efektivitas program dan kegiatan dalam rangka penurunan angka kesakitan malaria di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa belum efektifnya program dan kegiatan yang dilakukan karena memperlihatkan adanya peningkatan. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, terlihat bahwa tren angka kesakitan malaria di Kabupaten Bandung mengalami pola yang agak berbeda dengan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan angka kesakitan malaria antara Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat belum cukup relevan, dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dalam penajaman program dan kegiatan yang mendukung penurunan angka kesakitan malaria di Kabupaten Bandung.

3.2.4 BIDANG PENDIDIKAN

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satu yang paling berperan adalah faktor pendidikan. Keterkaitan antara pendidikan dan kemiskinan sangat erat, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan kemampuan diri melalui pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya terpenuhi bagi setiap individu. Rendahnya tingkat pendidikan dapat membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih di era saat ini, pendidikan menjadi modal penting dalam dunia kerja untuk bersaing dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sering kali berhubungan dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

3.2.4.1 ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau populasi usia sekolah yang seharusnya. APM SD/sederajat didefinisikan sebagai persentase anak pada kelompok usia sekolah yang sesuai (biasanya 7-12 tahun) yang terdaftar sebagai siswa di jenjang pendidikan SD/Sederajat, terhadap total populasi anak pada kelompok usia tersebut. APM menunjukkan sejauh mana sistem pendidikan berhasil menyerap anak-anak tepat waktu. Angka ini menjadi indikator penting untuk ditinjau karena pendidikan dasar yang tuntas merupakan fondasi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.



Gambar 3.22 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat Kabupaten Bandung

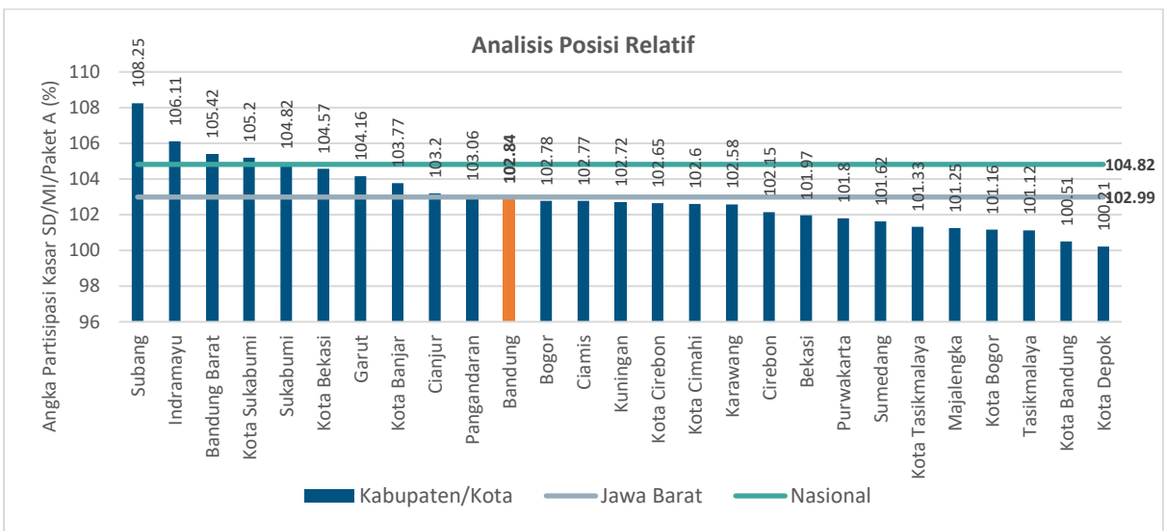
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

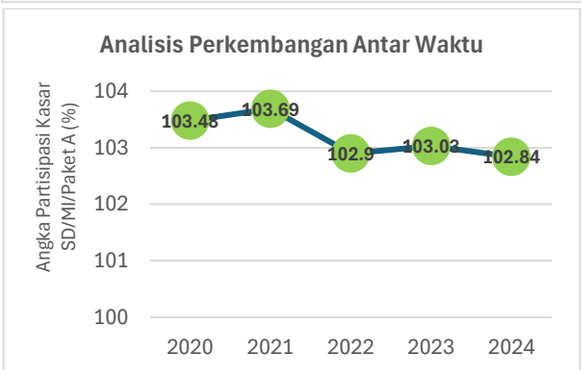
Berdasarkan gambar di atas, posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa capaian APM SD/sederajat pada tahun 2024 adalah sebesar 99,74% berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut berada di atas capaian APM SD/sederajat Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 98,53%. Selain itu, capaian APM SD/sederajat Kabupaten Bandung tahun 2024 juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berbatasan, seperti Kabupaten Sumedang (97,78%), Kota Bandung (97,84%), Kabupaten Garut (98,4%), Kabupaten Bandung Barat (98,61%), dan Kota Cimahi (99,31%). Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APM SD/sederajat Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 0,29% dibandingkan tahun 2022.

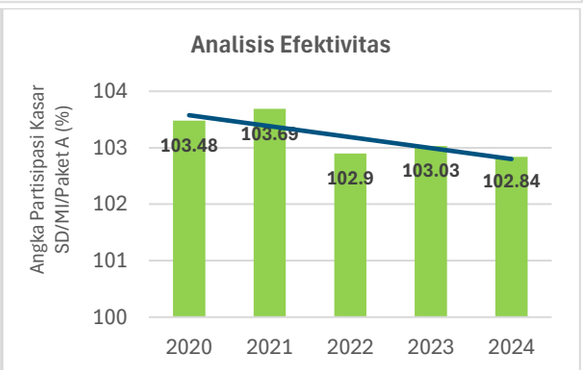
Dari gambar di atas juga dapat dilihat efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan APM SD/sederajat berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung. Kemudian apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APM SD/sederajat Kabupaten Bandung mengalami tren peningkatan yang cukup mirip dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, dengan nilai yang selalu berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

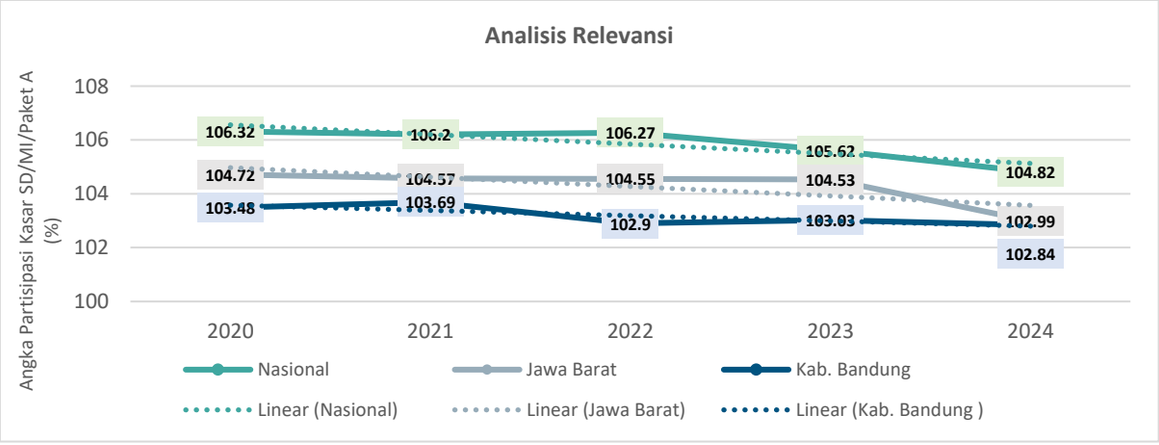
3.2.4.2 ANGKA PARTISIPASI KASAR SD/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya tampung dan tingkat akses pendidikan pada jenjang tersebut. APK SD/Sederajat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa yang terdaftar di jenjang pendidikan SD/Sederajat (berapapun usianya) dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang seharusnya (biasanya 7-12 tahun), dikalikan 100%. Nilai APK dapat melebihi 100%, yang menunjukkan bahwa terdapat siswa di luar kelompok usia resmi (terlalu muda atau terlalu tua) yang terdaftar di jenjang SD, mencerminkan adanya keterlambatan sekolah atau percepatan sekolah.









Gambar 3.23 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

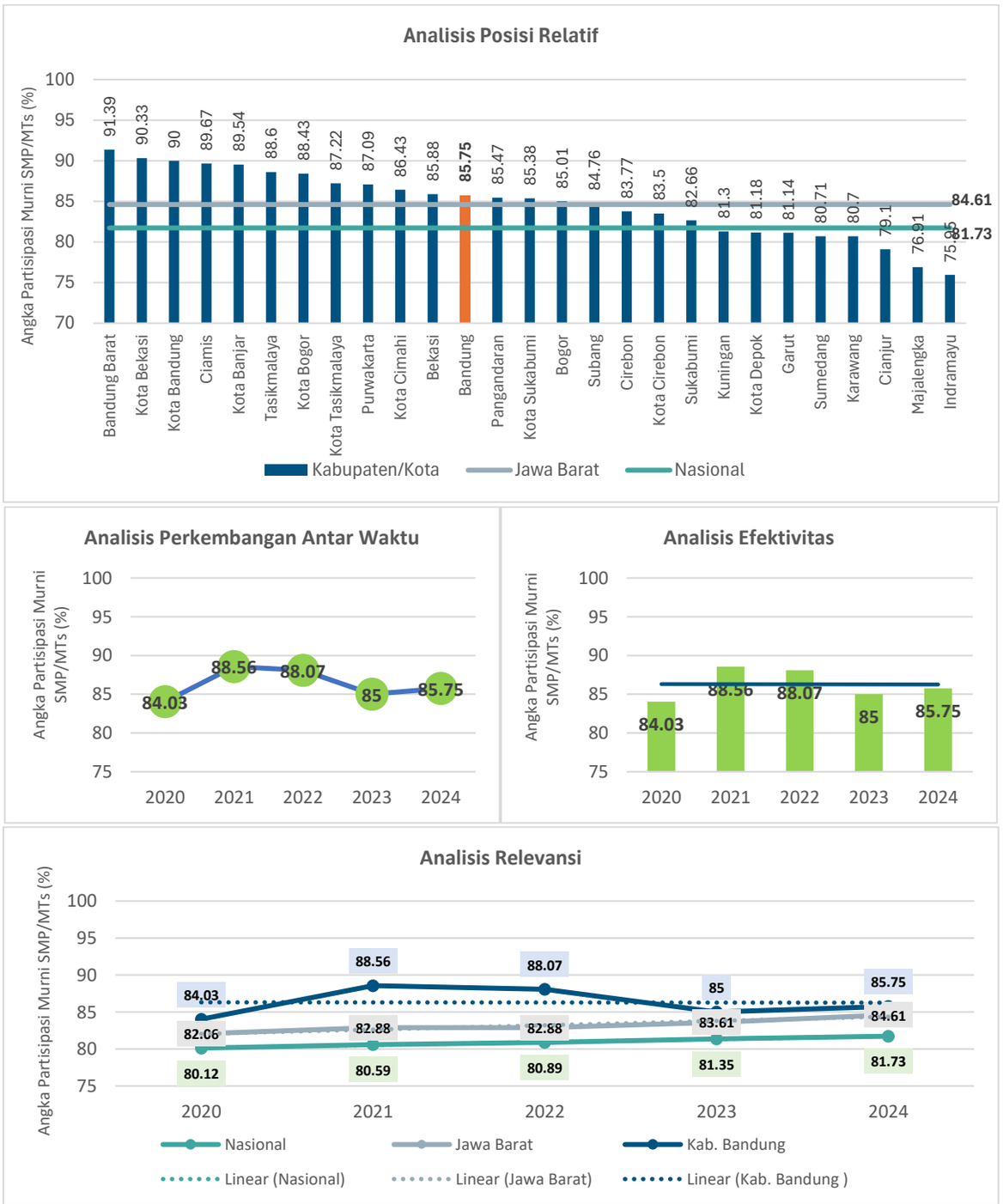
Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas, bahwa pada tahun 2024 posisi relatif APK SD/sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan capaian APK sebesar 102,84%. Capaian tersebut berada di bawah capaian APK SD/sederajat Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 102,99%. Kabupaten Bandung berada pada urutan ke-11 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memiliki APK SD/Sederajat yang lebih baik seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut. Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung menunjukkan nilai capaian APK SD/sederajat yang lebih rendah.

Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APK SD/sederajat Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif, yakni terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2023, namun juga mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2024. Selain itu, dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang ternyata belum cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan penurunan APK SD/sederajat. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APK SD/sederajat Kabupaten Bandung mengalami tren yang mirip dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung sudah cukup relevan.

3.2.4.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI SMP/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat merupakan indikator krusial yang mengukur proporsi anak pada kelompok usia sekolah yang seharusnya (umumnya 13-15 tahun) yang berhasil terdaftar sebagai siswa di jenjang pendidikan SMP/Sederajat, dibandingkan dengan total populasi anak pada kelompok usia tersebut. APM ini mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan dalam mendorong lulusan SD melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara tepat waktu. Menjaga APM SMP tetap tinggi adalah prasyarat untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan merupakan langkah fundamental dalam

program penanggulangan kemiskinan karena meningkatkan peluang kerja di masa depan.



Gambar 3.24 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

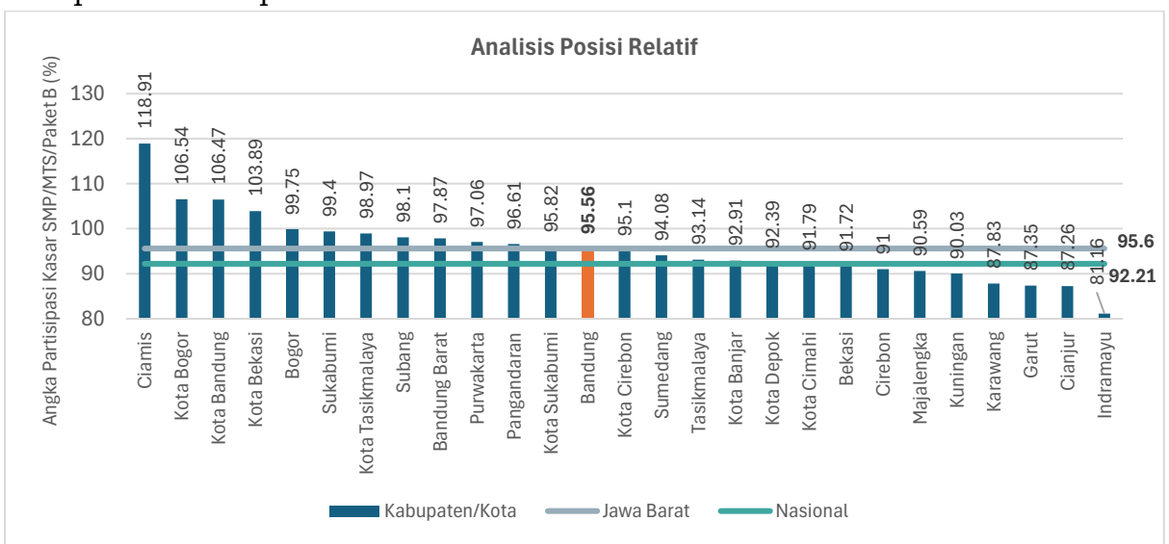
Berdasarkan gambar di atas, posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa capaian APM SMP/sederajat pada tahun 2024 adalah sebesar 85,75%. Capaian tersebut berada di atas capaian APM SMP/sederajat Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 84,61%. Selain itu, capaian APM SMP/sederajat Kabupaten Bandung tahun 2024 juga relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berbatasan, seperti Kabupaten Sumedang (80,71%) dan Kabupaten Garut (81,14%). Namun capaian APM SMP/sederajat Kabupaten Bandung masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya,

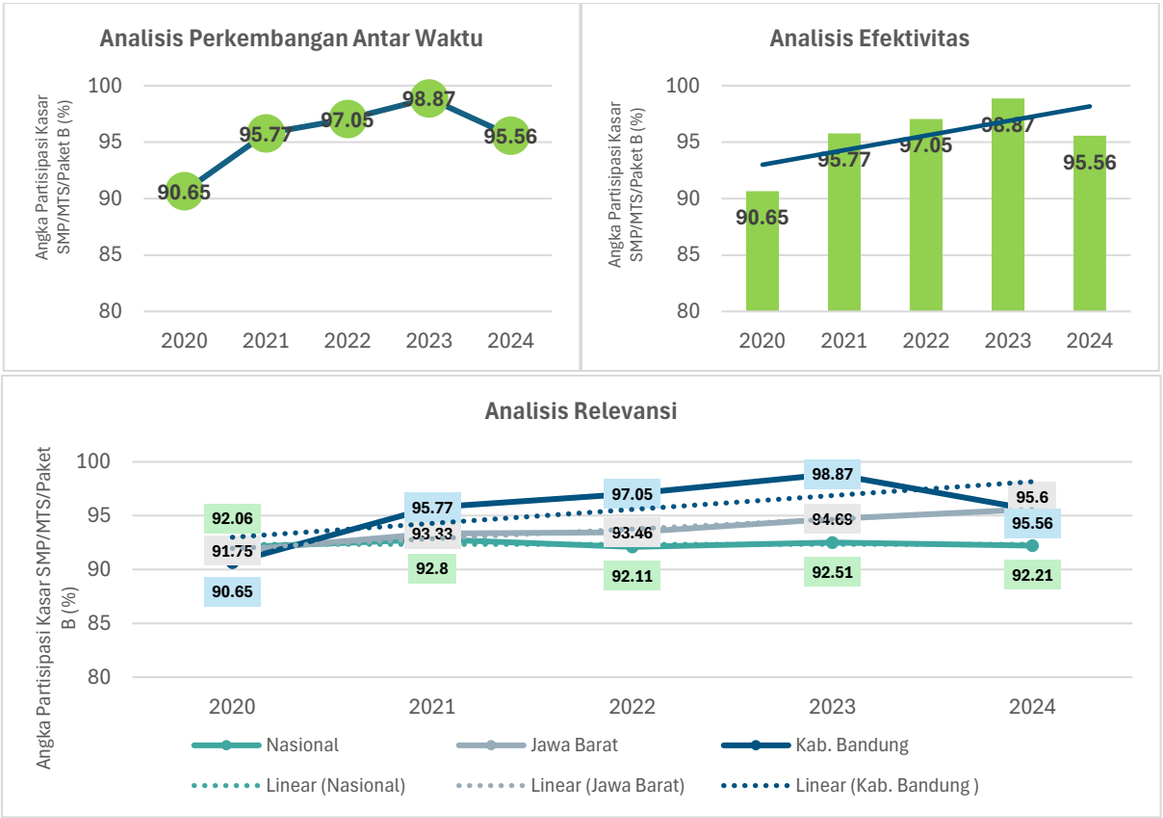
seperti Kota Cimahi (86,43%), Kota Bandung (90%), dan Kabupaten Bandung Barat (91,39%). Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APM SMP/sederajat Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung fluktuatif, yakni terjadi peningkatan pada tahun 2021 dan 2024, namun juga mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023.

Dari gambar di atas juga dapat dilihat efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan pada jenjang SMP/Sederajat di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang ternyata belum cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan penurunan APM SMP/sederajat, namun masih dalam rentang yang cukup stabil. Kemudian apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APM SMP/sederajat Kabupaten Bandung mengalami tren yang cukup mirip dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, dengan nilai yang selalu berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

3.2.4.4 ANGKA PARTISIPASI KASAR SMP/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh siswa yang terdaftar di jenjang SMP/Sederajat (berapa pun usianya) dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang seharusnya (umumnya 13-15 tahun), dikalikan 100%. Nilai APK seringkali melebihi 100%, yang menunjukkan bahwa sistem pendidikan telah menyediakan daya tampung yang cukup tidak hanya untuk anak usia sekolah yang tepat, tetapi juga untuk siswa yang memulai atau melanjutkan sekolah terlambat ataupun lebih cepat.





Gambar 3.25 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/sederajat Kabupaten Bandung

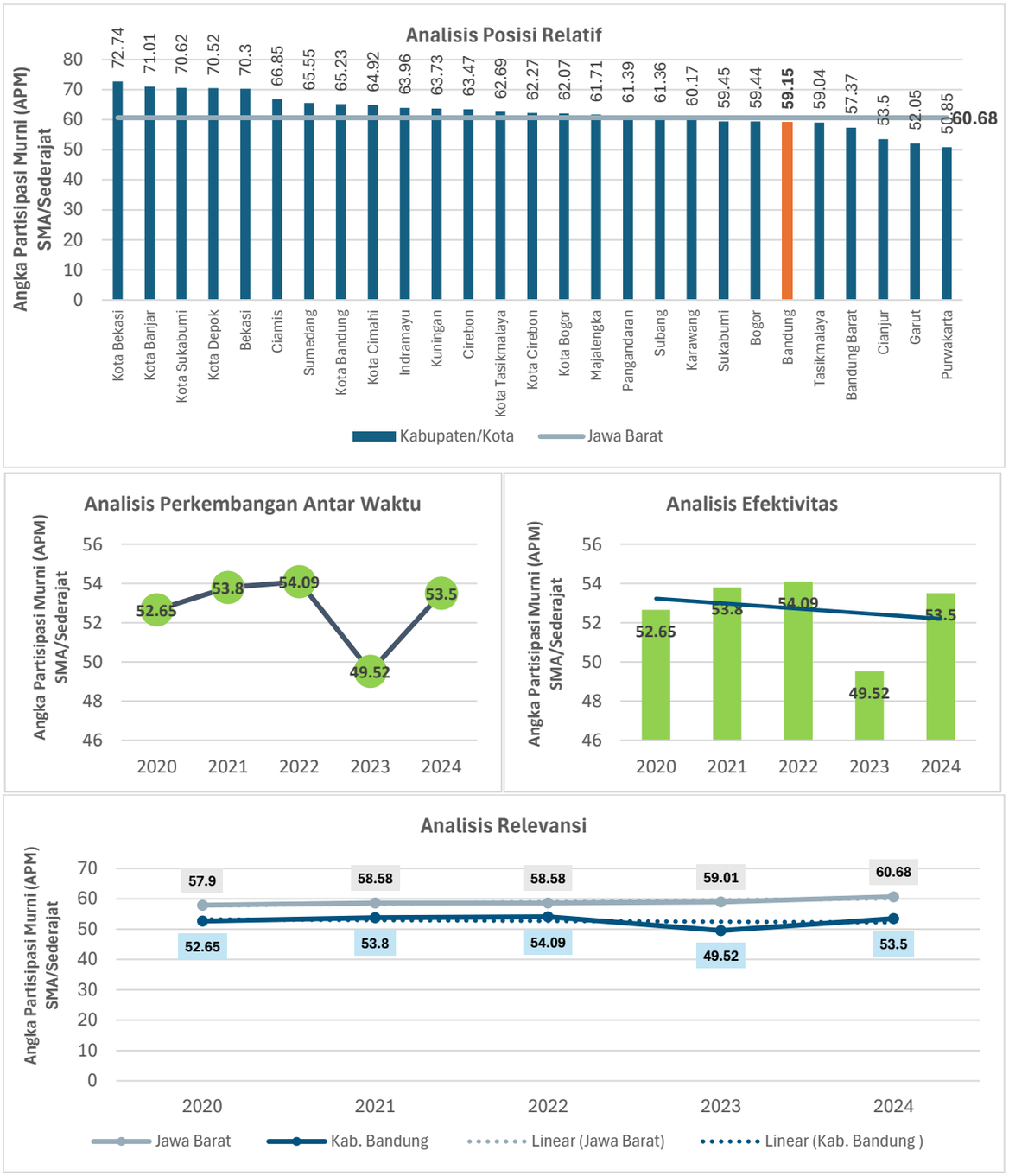
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas, bahwa pada tahun 2024 posisi relatif APK SMP/sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan capaian APK sebesar 95,56%. Capaian tersebut berada sedikit di bawah capaian APK SMP/sederajat Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 95,6%. Kabupaten Bandung berada pada urutan ke-13 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memiliki APK SMP/Sederajat yang lebih baik seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung. Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut menunjukkan nilai capaian APK SMP/sederajat yang lebih rendah.

Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APK SMP/sederajat Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Selain itu, dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan APK SMP/sederajat, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga perlu ada evaluasi efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan pada tahun terkait. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APK SMP/sederajat Kabupaten Bandung mengalami tren yang cukup mirip dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

3.2.4.5 ANGKA PARTISIPASI MURNI SMA/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah menengah atas yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA/sederajat. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keterjangkauan dan pemerataan akses pendidikan menengah.



Gambar 3.26 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan analisis posisi relatif, APM SMA/Sederajat Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sebesar 53,5%, masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai sekitar 60,68%. Posisi ini menunjukkan bahwa, meskipun akses pendidikan menengah di Kabupaten Bandung telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dibandingkan capaian rata-rata

provinsi, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah.

Ditinjau dari perkembangan antar waktu, APM SMA/Sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada periode 2020–2022, APM mengalami peningkatan, dari 52,65% pada tahun 2020 menjadi 54,09% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup tajam menjadi 49,52%, yang mengindikasikan adanya penurunan partisipasi penduduk usia SMA/sederajat dalam pendidikan formal. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi rumah tangga, meningkatnya kecenderungan masuk ke pasar kerja pada usia muda, serta keterbatasan daya dukung keluarga dalam membiayai pendidikan. Pada tahun 2024, APM kembali meningkat menjadi 53,5%, menunjukkan adanya pemulihan, meskipun belum sepenuhnya kembali ke tren kenaikan sebelum tahun 2023.

Berdasarkan analisis efektivitas, capaian APM SMA/Sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pendidikan menengah telah memberikan hasil, namun masih bersifat fluktuatif dan belum stabil. Dibandingkan dengan tren Provinsi Jawa Barat yang relatif lebih konsisten, efektivitas intervensi di Kabupaten Bandung masih perlu diperkuat agar peningkatan APM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya, dari analisis relevansi, terlihat bahwa arah perkembangan APM SMA/Sederajat Kabupaten Bandung relatif sejalan dengan tren provinsi, tetapi dengan tingkat capaian yang masih lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang bersifat spesifik daerah, seperti kesenjangan akses sekolah menengah, faktor ekonomi keluarga, serta risiko putus sekolah pada kelompok masyarakat berpengahasilan rendah.

Secara keseluruhan, capaian APM SMA/Sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah masih memerlukan penguatan, terutama untuk memastikan keberlanjutan partisipasi peserta didik hingga jenjang SMA/sederajat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, seperti penguatan bantuan biaya pendidikan, perluasan program beasiswa bagi keluarga miskin, peningkatan kualitas dan daya tarik pendidikan menengah, serta sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan agar partisipasi pendidikan menengah dapat meningkat secara inklusif dan berkelanjutan.

3.2.4.6 ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SEDERAJAT

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat merupakan indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat tanpa memperhatikan batasan usia. Indikator ini mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam menampung peserta didik, termasuk mereka yang berada di luar usia sekolah ideal, sehingga relevan untuk menilai daya jangkau layanan pendidikan menengah secara keseluruhan.



Gambar 3.27 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan analisis posisi relatif, APK SMA/Sederajat Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,05%, masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai sekitar 80,56%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, posisi Kabupaten Bandung berada pada kelompok menengah ke bawah. Jika ditinjau secara lebih spesifik terhadap kabupaten/kota yang berbatasan langsung, capaian Kabupaten Bandung relatif lebih rendah dibandingkan Kota Bandung dan Kota Cimahi yang mencatat APK di atas rata-rata provinsi. Namun demikian, APK Kabupaten Bandung masih lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah penyangga lainnya, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bandung berada dalam kawasan metropolitan dan wilayah penyangga pusat pertumbuhan, kapasitas penyerapan pendidikan menengah belum

sepenuhnya optimal jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan di sekitarnya.

Ditinjau dari perkembangan antar waktu, APK SMA/Sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, APK tercatat sebesar 62,99%, kemudian meningkat menjadi 64,84% pada 2021 dan 65,05% pada 2022. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 64,29%, yang dapat mengindikasikan adanya hambatan sementara dalam partisipasi pendidikan menengah, baik akibat faktor ekonomi maupun transisi pendidikan pascapandemi. Namun demikian, pada tahun 2024 APK mengalami peningkatan signifikan menjadi 74,05%, yang menunjukkan adanya perbaikan daya tampung dan meningkatnya partisipasi pendidikan SMA/sederajat.

Berdasarkan analisis efektivitas, peningkatan APK SMA/Sederajat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan menengah mulai memberikan dampak positif terhadap perluasan akses pendidikan. Kenaikan yang cukup tajam pada tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan keberhasilan dalam mendorong partisipasi sekolah, termasuk bagi peserta didik di luar usia sekolah ideal. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih perlu dijaga agar peningkatan APK dapat berlangsung secara konsisten.

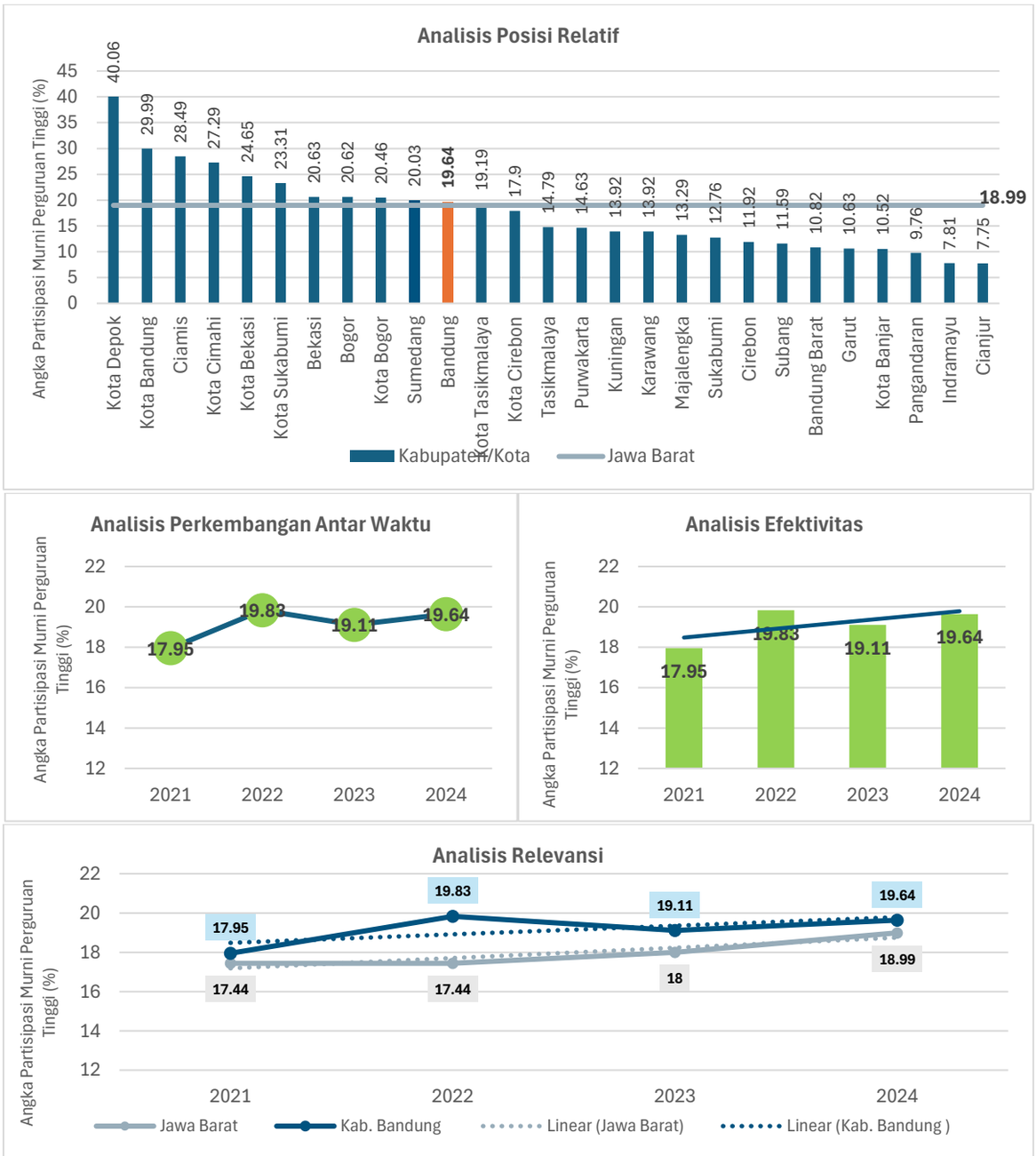
Selanjutnya, melalui analisis relevansi, terlihat bahwa arah tren APK SMA/Sederajat Kabupaten Bandung sejalan dengan tren Provinsi Jawa Barat, yang sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun, kesenjangan capaian antara Kabupaten Bandung dan rata-rata provinsi masih cukup lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan menengah di Kabupaten Bandung memerlukan penguatan kebijakan, terutama dalam menjangkau kelompok masyarakat miskin, wilayah perdesaan, serta daerah dengan risiko putus sekolah yang tinggi.

Secara keseluruhan, capaian APK SMA/Sederajat Kabupaten Bandung menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada tahun 2024. Namun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah perkotaan sekitar dan rata-rata provinsi, diperlukan upaya berkelanjutan melalui perluasan akses sekolah menengah, penguatan dukungan pembiayaan pendidikan, serta sinergi dengan program penanggulangan kemiskinan agar partisipasi pendidikan menengah dapat meningkat secara lebih merata dan inklusif.

3.2.4.7 ANGKA PARTISIPASI MURNI PERGURUAN TINGGI

Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi (APM PT) adalah indikator yang sangat spesifik, mengukur persentase penduduk yang berada dalam kelompok usia pendidikan tinggi yang seharusnya (umumnya 19-23 tahun) dan secara tepat waktu terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT), dibandingkan dengan total populasi pada kelompok usia tersebut. APM PT mencerminkan seberapa efektif sistem pendidikan dan dukungan sosial-ekonomi mendorong anak-anak tepat usia untuk melanjutkan ke jenjang

pendidikan tinggi segera setelah lulus SMA/sederajat. Angka ini menjadi tolok ukur penting dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) karena pendidikan tinggi berkorelasi erat dengan peningkatan daya saing dan peluang keluar dari kemiskinan.



Gambar 3.28 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

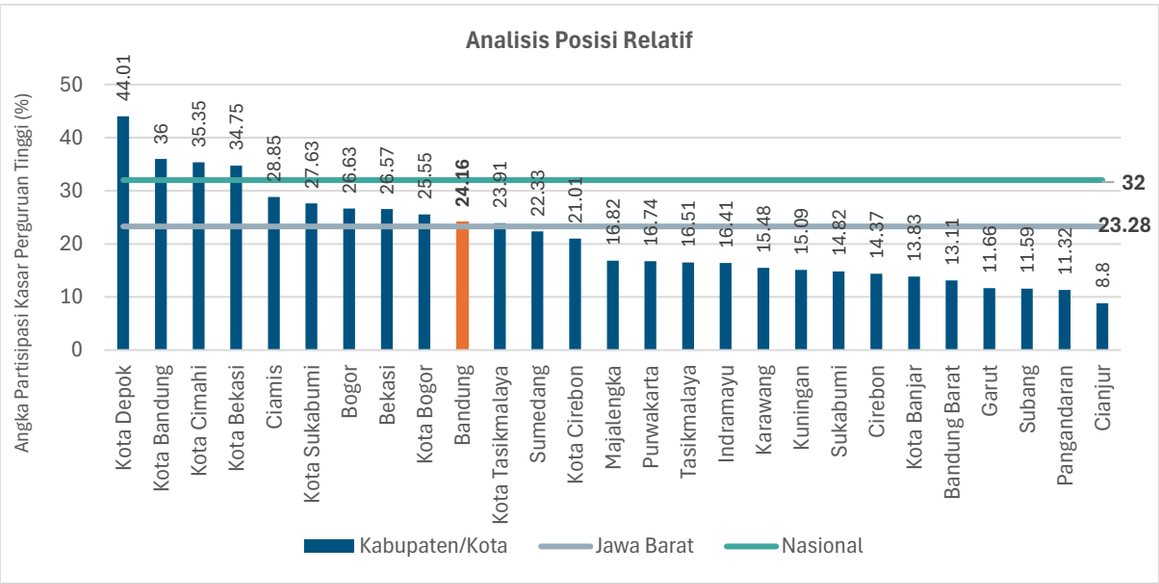
Berdasarkan gambar di atas, posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa capaian APM Perguruan Tinggi pada tahun 2024 adalah sebesar 19,64% berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut berada di atas capaian APM Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 18,99%. Selain itu, capaian APM Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung tahun 2024 juga relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berbatasan, seperti Kabupaten Garut (10,63%) dan Kabupaten Bandung Barat (10,82%). Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APM

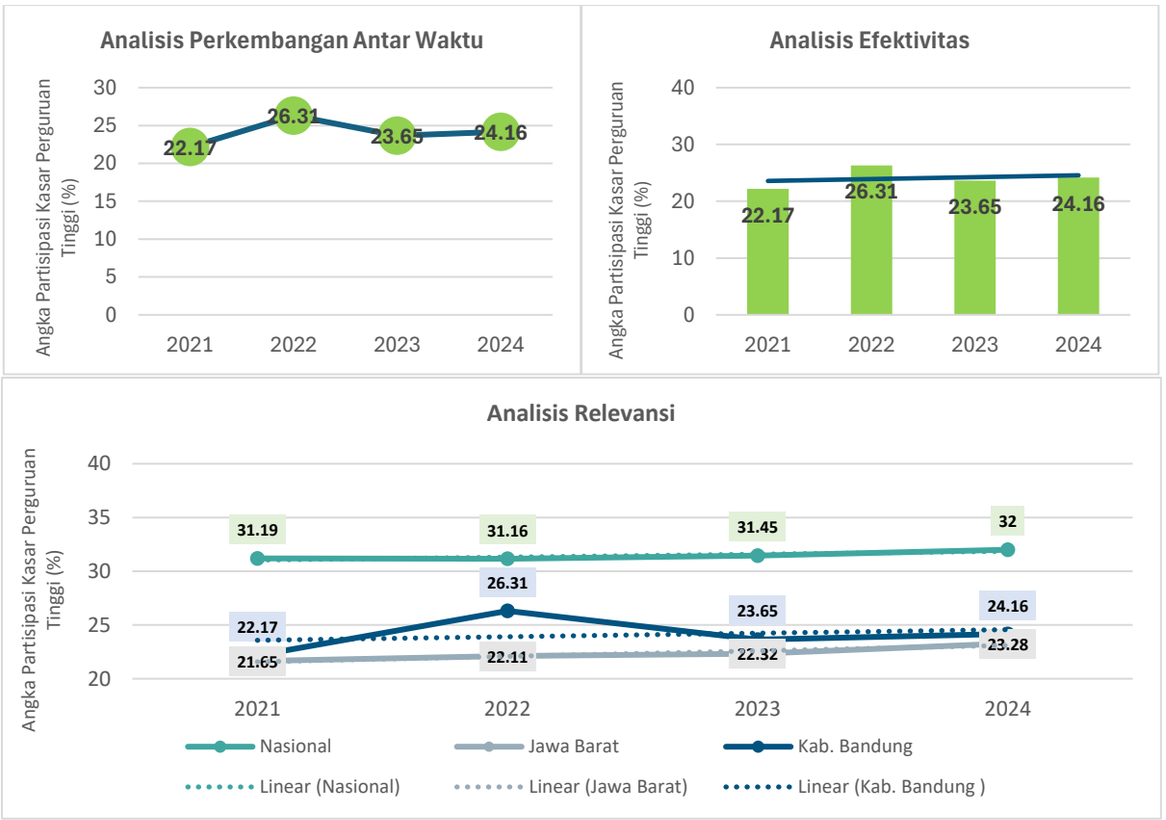
Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren yang masih fluktuatif, di mana pada tahun 2022 mengalami peningkatan, tahun 2023 mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali.

Dari gambar di atas juga dapat dilihat efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan APM Perguruan Tinggi dalam empat tahun ke belakang. Kemudian apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APM Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung mengalami tren peningkatan yang cukup mirip dengan Provinsi Jawa Barat, dengan nilai yang selalu berada di atas Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

3.2.4.8 ANGKA PARTISIPASI KASAR PERGURUAN TINGGI

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas dan daya tampung pendidikan tinggi bagi masyarakat. APK PT didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi (PT), baik negeri maupun swasta, berapapun usianya, dengan jumlah penduduk pada kelompok usia kuliah yang seharusnya (umumnya 19-23 tahun), dikalikan 100%. Tingginya APK PT mencerminkan bahwa sistem pendidikan di suatu wilayah memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung lulusan SMA/sederajat, termasuk mereka yang kembali berkuliah atau terlambat memulai studi, yang dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.





Gambar 3.29 Analisis Karakteristik Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas, bahwa pada tahun 2024 posisi relatif APK Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung menunjukkan capaian APK sebesar 24,16%. Capaian tersebut berada di atas capaian APK Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 23,28%. Kabupaten Bandung berada pada urutan ke-10 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memiliki APK Perguruan Tinggi yang lebih baik seperti Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut menunjukkan nilai capaian APK Perguruan Tinggi yang lebih rendah. Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan APK Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung, sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren yang masih fluktuatif, di mana pada tahun 2022 mengalami peningkatan, tahun 2023 mengalami penurunan, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali.

Selain itu, dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan APK Perguruan Tinggi dalam empat tahun ke belakang. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa APK Perguruan Tinggi Kabupaten Bandung mengalami tren yang agak berbeda dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi antara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung masih kurang relevan.

3.2.4.9 HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Yang dimaksud dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yakni waktu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data ini dapat dimanfaatkan untuk memahami situasi pembangunan sistem pendidikan di berbagai tingkatan.



Gambar 3.30 Analisis Karakteristik Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung

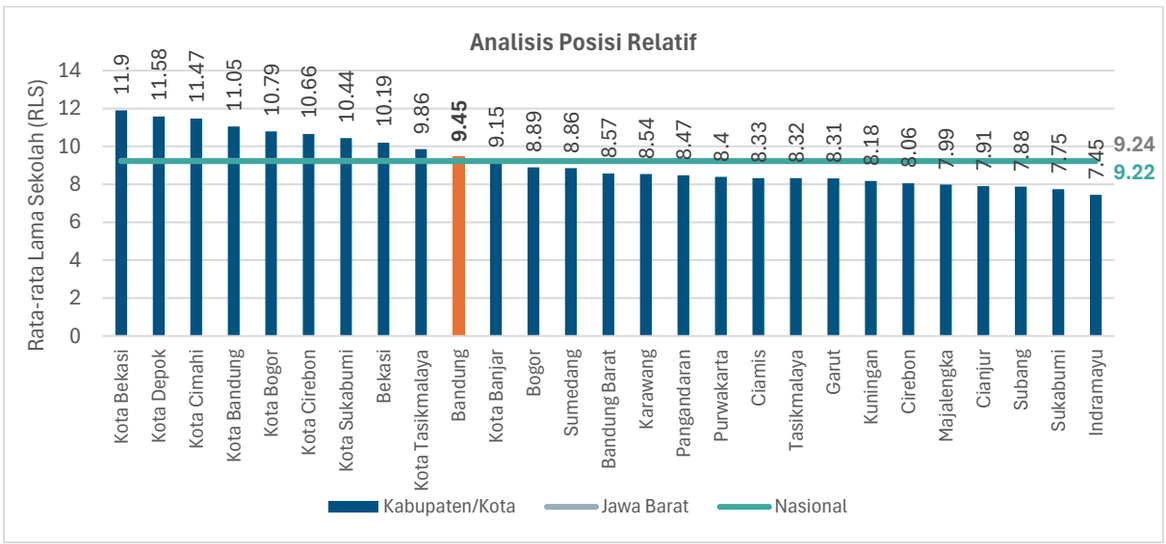
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 posisi relatif angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung menunjukkan capaian HLS sebesar 12,74 tahun berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Capaian tersebut berada sedikit di bawah capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 12,8 tahun. Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan.

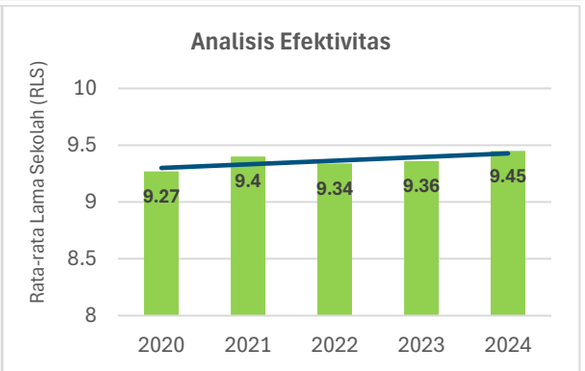
Selain itu dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bandung cenderung mengalami peningkatan bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung sudah relevan.

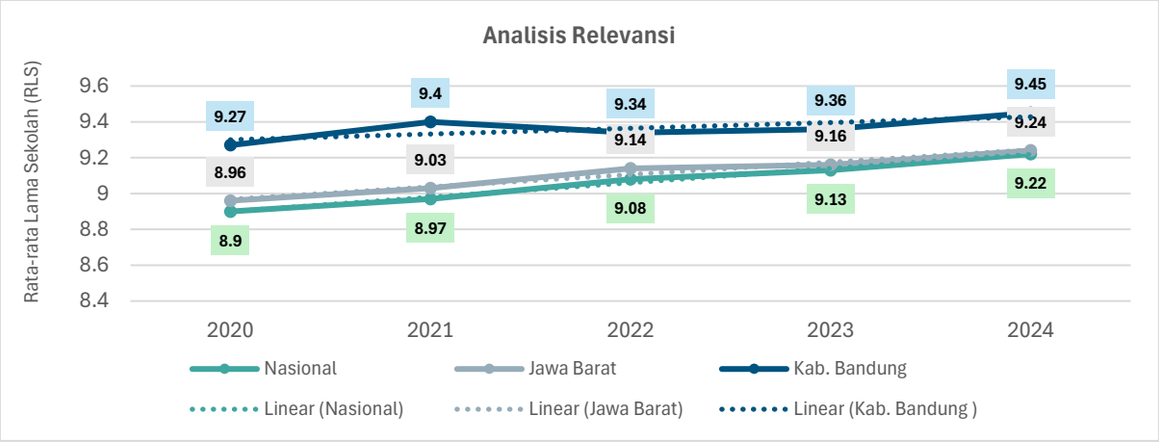
3.2.4.10 RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat menjadi salah satu tolok ukur kualitas penduduk dalam konteks pendidikan. Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa seseorang telah menghabiskan lebih banyak tahun dalam pendidikan formal. Meskipun demikian, indikator ini tidak memperhitungkan situasi seperti tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian dilanjutkan, dan masuk sekolah dasar pada usia yang sangat muda atau sebaliknya.









Gambar 3.31 Analisis Karakteristik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas, bahwa pada tahun 2024 posisi relatif RLS Kabupaten Bandung menunjukkan capaian RLS sebesar 9,45%. Capaian tersebut berada sedikit di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 9,24%. Kabupaten Bandung berada pada urutan ke-10 jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Beberapa daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung memiliki RLS yang lebih baik, seperti Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sedangkan beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut menunjukkan nilai capaian RLS yang lebih rendah.

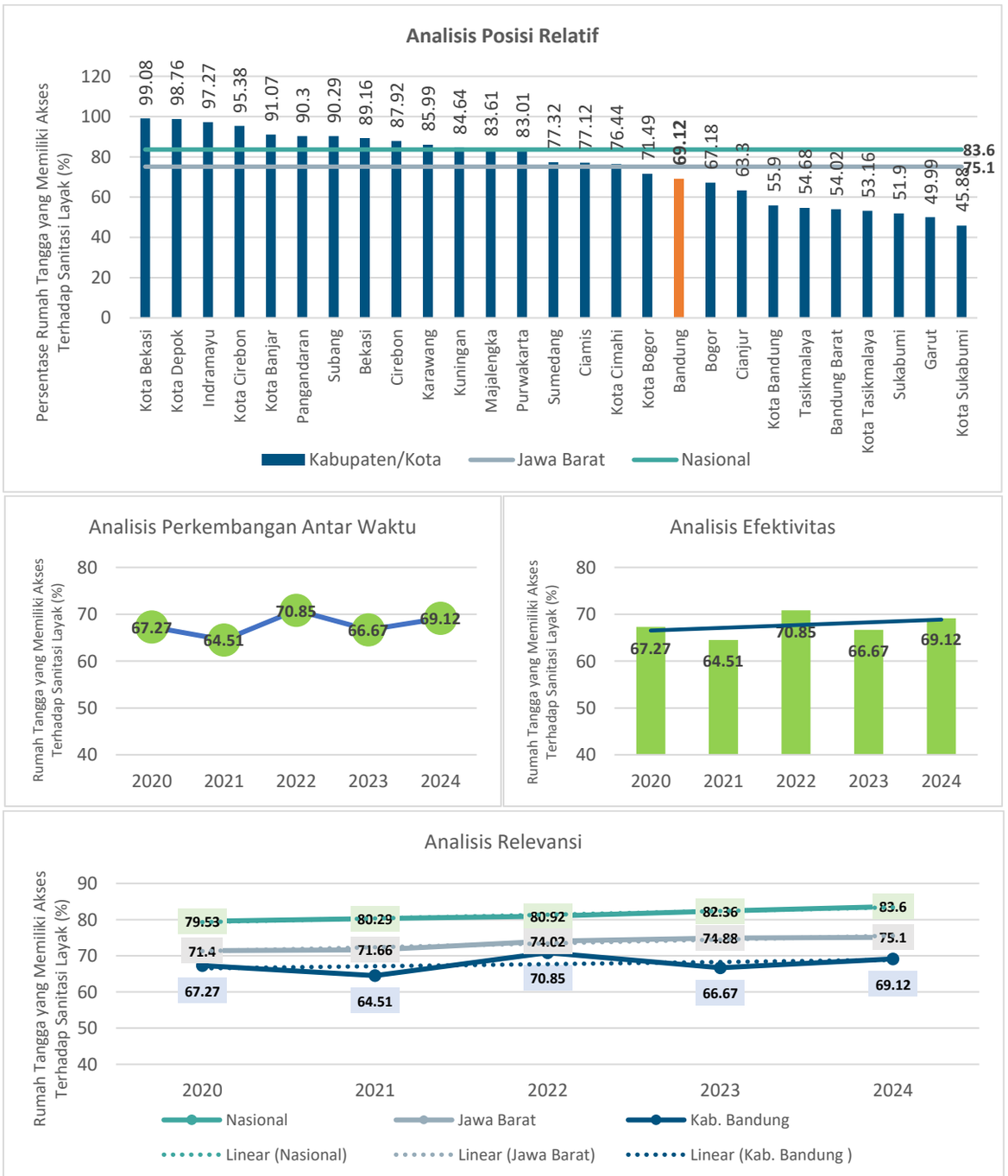
Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan RLS Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan. Selain itu, dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan RLS, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga perlu ada evaluasi efektivitas program dan kegiatan peningkatan pendidikan pada tahun terkait. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa RLS Kabupaten Bandung mengalami tren yang cukup mirip dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan pendidikan antara nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

3.2.5 BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

3.2.5.1 RUMAH TANGGA MEMILIKI AKSES SANITASI LAYAK

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu indikator dalam SDGs yaitu pada indikator akses sanitasi layak merupakan sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, baik akses layak sendiri maupun akses layak bersama. Yaitu rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri/bersama/MCK komunal, bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa, serta bangunan bawahnya menggunakan tangki septik atau IPAL, khusus di

daerah perdesaan termasuk juga menggunakan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja.



Gambar 3.32 Analisis Karakteristik Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak Kabupaten Bandung

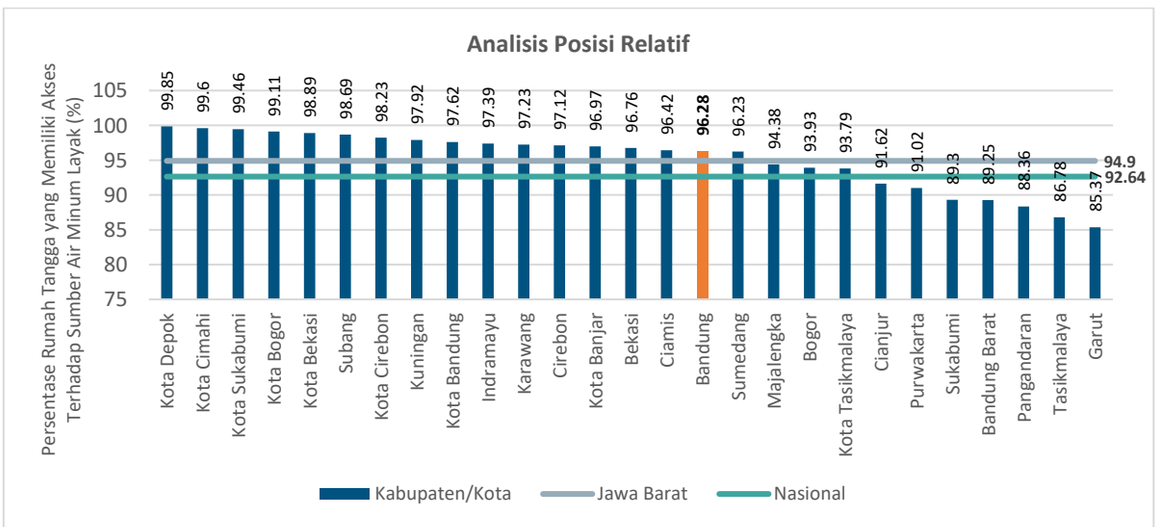
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak Kabupaten Bandung tahun 2024 adalah sebesar 69,12%, berada pada urutan ke-10 terendah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak Kabupaten Bandung berada di bawah angka Jawa Barat dan Indonesia. Untuk lebih jelasnya capaian indikator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak Kabupaten Bandung tahun 2024 dilihat dari posisi relatif, dapat dilihat pada gambar di atas.

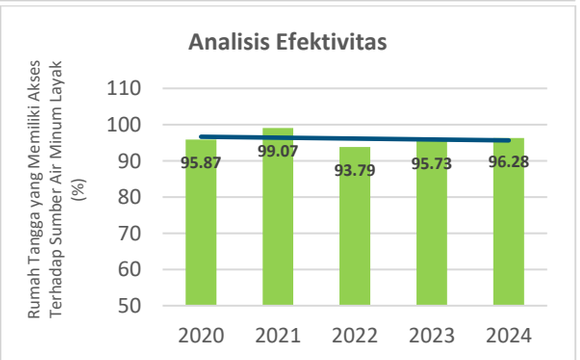
Jika dilihat dari perkembangan antar waktu, terlihat bahwa sejak tahun 2020, dengan capaian 67,27%, perkembangannya cukup fluktuatif namun cenderung membaik hingga pada tahun 2024 menjadi 69,12%. Dengan capaian tersebut, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak (%) ini dianggap masih bermasalah dan menjadi prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan dan ditangani agar indikator ini terus meningkat.

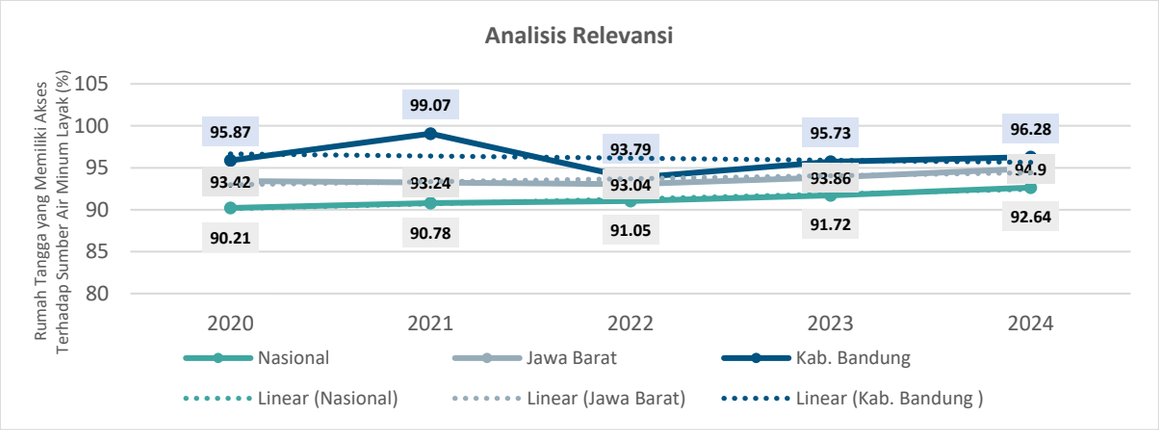
3.2.5.2 RUMAH TANGGA DENGAN SUMBER AIR MINUM LAYAK

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Air minum yang layak dan aman dikonsumsi adalah tidak memiliki rasa, bau, atau warna, tidak mengandung bakteri, dan tidak mengandung bahan kimia melebihi batas yang diperbolehkan. Sumber air minum utama terdiri dari air kemasan bermerek/air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung/tidak terlindung, mata air terlindung/tidak terlindung, dan lainnya (air hujan, air permukaan, dan lainnya).









Gambar 3.33 Analisis Karakteristik Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bandung

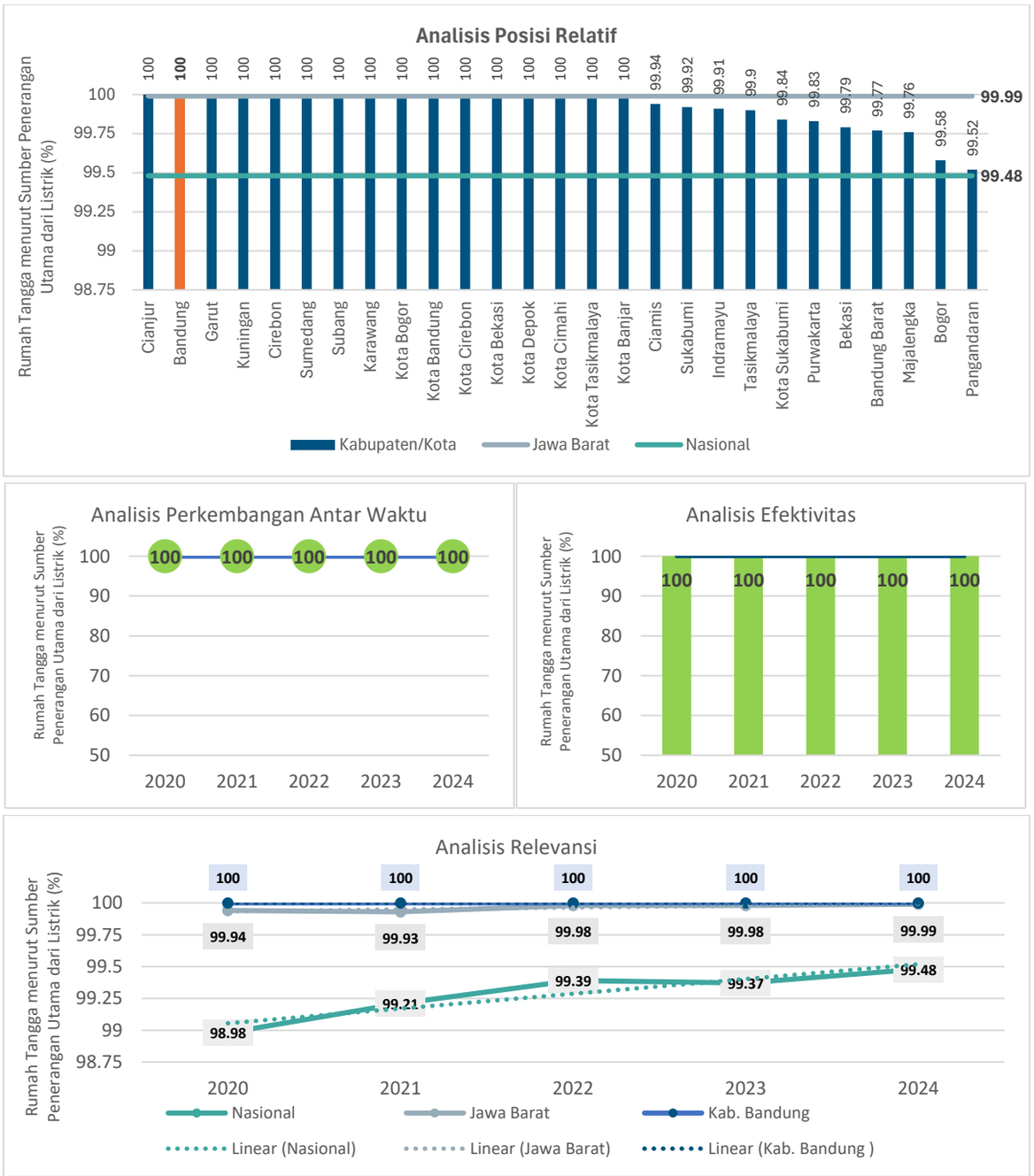
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bandung Tahun 2024, berada pada urutan tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Namun persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kabupaten Bandung Tahun 2024 sudah berada di atas capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. Capaian Indikator Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Kabupaten Bandung Tahun 2025 jika dilihat dari posisi relatifnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Jika meninjau perkembangan antar waktu indikator persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, dengan capaian 95,87%, perkembangannya cukup fluktuatif dan hingga pada tahun 2024 menjadi 96,28%. Dengan capaian persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Bandung pada saat ini masih perlu menjadi prioritas intervensi untuk terus ditingkatkan dan ditangani agar indikator ini bisa lebih konsisten meningkat.

3.2.5.3 RUMAH TANGGA DENGAN SUMBER PENERANGAN DARI LISTRIK

Proporsi rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik di Kabupaten Bandung tahun 2024 sudah mencapai 100%. Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator proporsi rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik di Kabupaten Bandung tahun 2024, berada pada urutan teratas di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Proporsi rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik di Kabupaten Bandung tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Jawa Barat maupun nasional. Capaian indikator rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik (%) Kabupaten Bandung Tahun 2024 dilihat dari posisi relatif, ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 3.34 Analisis Karakteristik Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Dari Listrik Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan dari tahun 2020, sudah 100 persen rumah tangga di Kabupaten Bandung memiliki sumber penerangan dari listrik. Adapun tren persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik di Kabupaten Bandung berhasil stabil pada capaian 100%. Hal tersebut sesuai dengan peningkatan tren yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Artinya, terdapat relevansi kebijakan terkait penggunaan sumber penerangan listrik di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung.

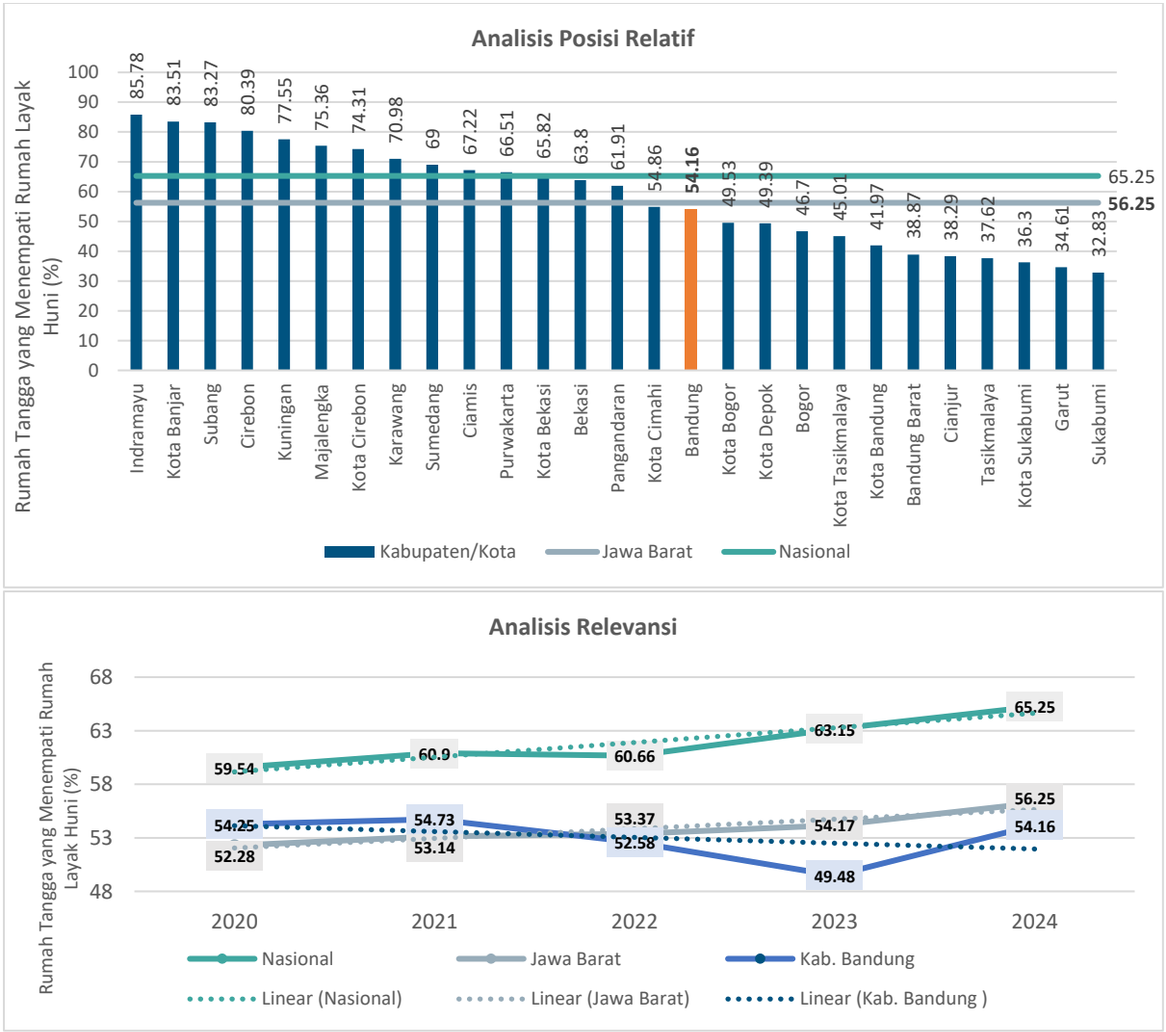
3.2.5.4 RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI

Rumah layak huni dan terjangkau merupakan rumah yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas bangunan minimum yang mencukupi, serta mendukung kesehatan penghuninya, dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Untuk dapat dikategorikan sebagai rumah

layak huni, berbagai aspek tersebut perlu dipenuhi, terutama kecukupan luas bangunan yang harus disesuaikan dengan jumlah orang yang menempati rumah tersebut. Mengacu pada standar nasional maupun internasional, hunian layak ditentukan berdasarkan empat kriteria utama berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) – Artinya, bahan yang digunakan untuk atap, dinding, dan lantai rumah harus memenuhi syarat kualitas tertentu:
   - Atap rumah terluas terbuat dari genteng, kayu/sirap, atau seng.
   - Dinding rumah terluas terbuat dari bahan seperti tembok/GRC *board*, plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu.
   - Lantai rumah terluas terbuat dari marmer/granit/keramik, parket/vinil/ karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen, atau bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) – Luas lantai minimal yang tersedia per orang adalah 7,2 meter persegi. Jadi, jika dalam satu rumah tinggal lima orang, maka luas lantai yang dianggap layak adalah minimal 36 meter persegi (m2).
3. Akses terhadap sumber air minum yang layak (access to improved water) – Air minum harus berasal dari sumber seperti keran dengan sambungan ledeng (individu atau komunal), hidran umum, penampungan air hujan (PAH), sumur bor/pompa, sumur terlindung, atau mata air terlindung. Jika rumah tangga menggunakan air kemasan atau isi ulang sebagai air minum, maka mereka masih dianggap memiliki akses air minum layak jika untuk keperluan memasak dan MCK mereka memakai sumber air terlindung.
4. Akses terhadap sanitasi yang layak (access to adequate sanitation) – Rumah harus memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar teknis, seperti menggunakan kloset berleher angsa dan sistem pembuangan akhir berupa septic tank, SPAL, atau lubang tanah (untuk wilayah perdesaan). Fasilitas ini bisa digunakan oleh satu rumah tangga atau dibagi dengan rumah tangga lain tertentu.

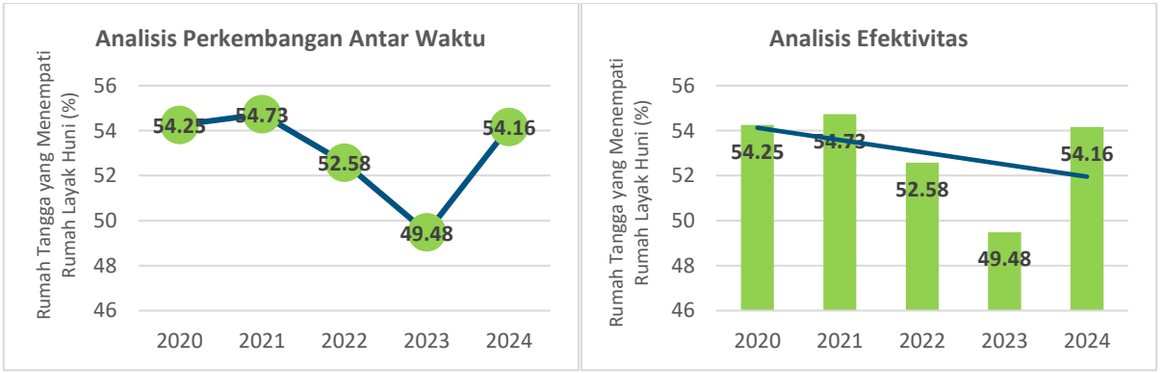
Berdasarkan keempat kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak jika rumah yang mereka tempati memenuhi seluruh persyaratan di atas. Sebaliknya, jika salah satu saja dari empat komponen tersebut tidak terpenuhi, maka rumah tersebut dianggap tidak layak huni.



Gambar 3.35 Analisis Posisi Relatif dan Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan analisis posisi relatif, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bandung masih sedikit lebih rendah daripada capaian Provinsi Jawa Barat. Tiga kabupaten yang memiliki nilai tertinggi adalah Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, dan Kabupaten Subang, sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bandung cenderung fluktuatif jika dibandingkan tren Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan capaian rumah layak huni di Kabupaten Bandung belum begitu relevan dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.36 Analisis Antar Waktu dan Efektivitas Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Hasil analisis antar waktu menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bandung pada tahun 2020 mencapai 54,15% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 54,73%. Namun pada tahun 2022-2023, capaian persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bandung kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2024, capaian persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kabupaten Bandung kembali menunjukkan tren positif dengan meningkat menjadi 54,16%. Selain itu, berdasarkan analisis efektivitas menunjukkan tren negatif, yang berarti program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung belum begitu efektif untuk meningkatkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni Kabupaten Bandung.

3.2.6 BIDANG KETAHANAN PANGAN

Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebuah wilayah dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila seluruh penduduknya memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, baik untuk kebutuhan hidup sehat maupun aktif. Dalam konteks ini, isu kemiskinan menjadi tantangan serius, karena secara langsung memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Penduduk miskin cenderung memiliki daya beli yang rendah, sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga pangan dan fluktuasi produksi. Oleh karena itu, analisis ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya penanggulangan kemiskinan.

3.2.6.1 PERKEMBANGAN HARGA BERAS

Beras memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Sebagai bahan pangan utama, fluktuasi harga beras sangat berpengaruh terhadap harga komoditas lainnya, yang pada akhirnya dapat memicu inflasi atau deflasi dalam skala besar. Situasi ini menjadi lebih kompleks saat terjadi kondisi iklim ekstrem yang mengganggu produksi beras, menyebabkan penurunan pasokan dan lonjakan harga. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil berbagai langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perberasan,

salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Berdasarkan standar yang berlaku di Indonesia, klasifikasi mutu beras diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Dalam peraturan tersebut, beras dikategorikan menjadi dua kelas utama yakni Beras Premium dan Beras Medium. Klasifikasi ini didasarkan pada sejumlah parameter mutu beras, termasuk derajat sosoh, kadar air, beras kepala, beras patah, total butir beras lainnya (terdiri atas butir menir, merah, kuning/rusak, kapur), butir gabah, dan benda lain.



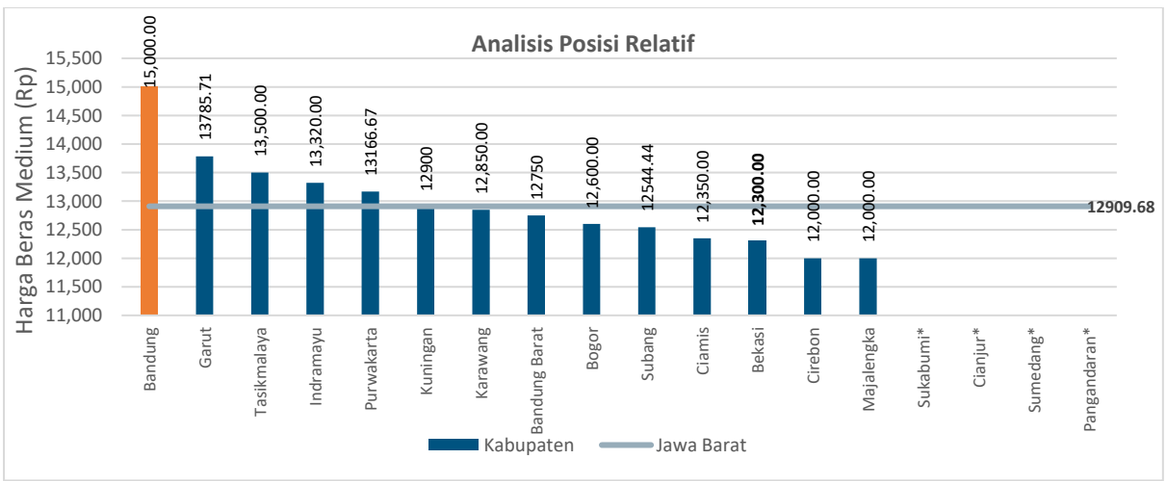
Gambar 3.37 Analisis Perkembangan Harga Beras Premium Kabupaten Bandung

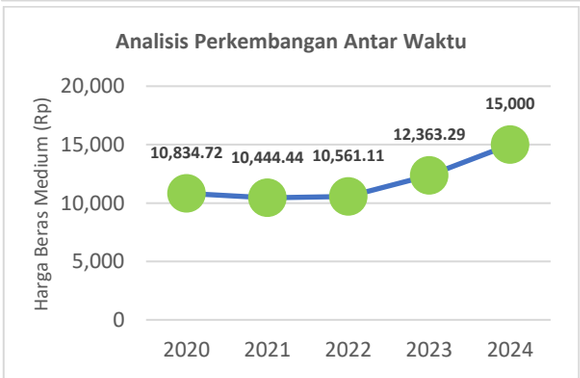
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

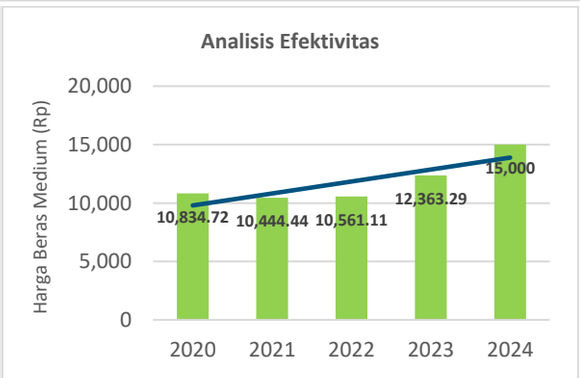
Pada tahun 2024, Kabupaten Bandung mencatat harga beras premium tertinggi di antara seluruh kabupaten di Jawa Barat, yaitu sebesar Rp14.450,00 per kilogram. Nilai ini jauh melampaui harga beras premium Provinsi Jawa Barat yang berada di angka Rp13.411,94. Hal ini

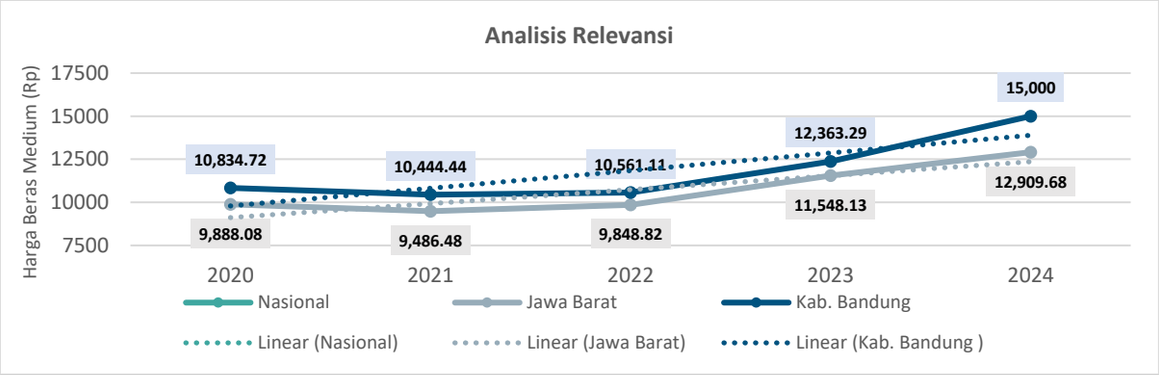
menunjukkan bahwa harga beras premium di Kabupaten Bandung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, bahkan dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga tertinggi. Posisi ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lokal tertentu di Kabupaten Bandung, seperti biaya distribusi, permintaan pasar, atau struktur rantai pasok yang mempengaruhi harga menjadi lebih mahal.

Jika meninjau analisis perkembangan antar waktu, dalam kurun lima tahun terakhir, harga beras premium di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi sebelum akhirnya meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, harga tercatat sebesar Rp11.360,89 dan sempat turun hingga Rp10.931,25 pada tahun 2021. Namun mulai menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 (Rp12.100,00) dan melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi Rp14.450,00. Selain itu, analisis efektivitas menampilkan bahwa efektivitas program dan kegiatan terkait pengendalian harga beras di Kabupaten Bandung selama beberapa waktu ke belakang belum optimal karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan harga beras di Kabupaten Bandung, namun memang sempat terjadi penurunan. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, selama periode tahun 2020–2024, harga beras premium di Kabupaten Bandung selalu berada di atas harga beras premium Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang mirip dengan nilai Provinsi Jawa Barat.









Gambar 3.38 Analisis Perkembangan Harga Beras Medium Kabupaten Bandung

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah)

Untuk beras medium, BPS mencatat bahwa pada tahun 2024 harga beras medium Kabupaten Bandung juga menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten di Jawa Barat, yaitu sebesar Rp15.000,00 per kilogram. Nilai ini jauh melampaui harga beras medium Provinsi Jawa Barat yang berada di angka Rp12.909,68. Hal ini menunjukkan bahwa harga beras medium di Kabupaten Bandung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, bahkan dibandingkan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga tertinggi.

Jika meninjau analisis perkembangan antar waktu, dalam kurun lima tahun terakhir, harga beras medium di Kabupaten Bandung mengalami fluktuasi sebelum akhirnya meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, harga tercatat sebesar Rp10.834,72 dan sempat turun hingga Rp10.444,44 pada tahun 2021. Namun mulai menunjukkan kenaikan pada tahun 2023 (Rp12.363,29) dan melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi Rp15.000,00. Kenaikan tajam di tahun terakhir menunjukkan potensi adanya tekanan inflasi, gangguan produksi, atau peningkatan permintaan secara lokal yang signifikan. Selain itu, analisis efektivitas menampilkan bahwa efektivitas program dan kegiatan terkait pengendalian harga beras di Kabupaten Bandung selama beberapa waktu ke belakang belum optimal karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan harga beras di Kabupaten Bandung, namun memang sempat terjadi penurunan.

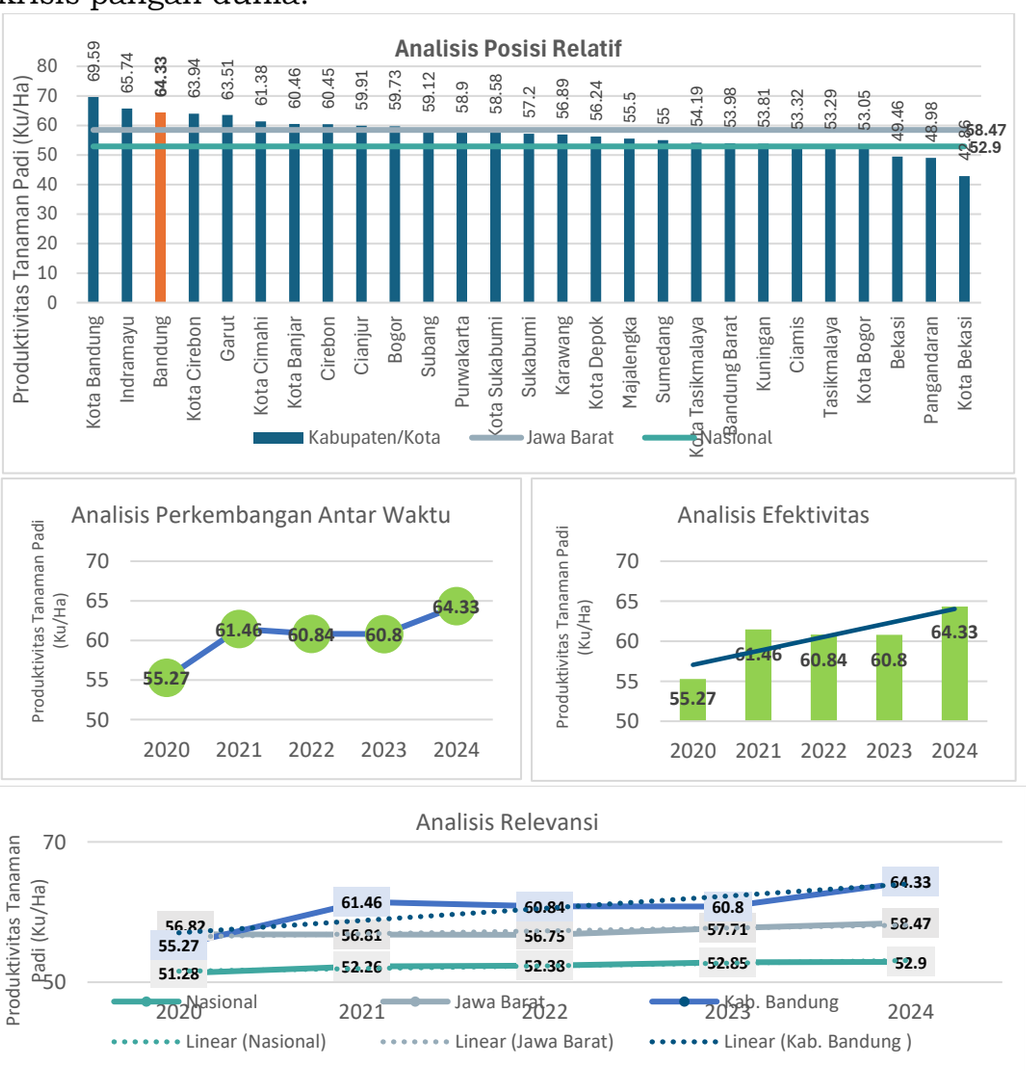
Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, selama periode tahaun 2020–2024, harga beras medium di Kabupaten Bandung selalu berada di atas harga beras medium Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung menunjukkan tren yang mirip dengan nilai Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam pengendalian harga beras antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung sudah relevan. Namun lonjakan harga di Kabupaten Bandung pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga belum sepenuhnya berdampak di Kabupaten Bandung. Ini menjadi sinyal bahwa perlu ada evaluasi terhadap mekanisme distribusi atau intervensi harga di tingkat kabupaten.

3.2.6.2 PRODUKTIVITAS PADI

Padi merupakan komoditas strategis dalam sistem ketahanan pangan Indonesia, mengingat beras masih menjadi makanan pokok utama bagi sebagian besar penduduk. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi padi

memiliki peran vital dalam menjamin ketersediaan pangan, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, adalah produktivitas padi. Indikator ini mencerminkan tingkat efisiensi pemanfaatan lahan dalam menghasilkan gabah dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan program pertanian, seperti penyediaan benih unggul, subsidi pupuk, mekanisasi pertanian, dan pengelolaan air irigasi.

Produktivitas padi juga menjadi parameter penting dalam merumuskan kebijakan pangan nasional, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kinerja produktivitas yang stagnan atau menurun dapat mengindikasikan berbagai permasalahan struktural, mulai dari degradasi lahan, perubahan iklim, hingga lemahnya sistem penyuluhan. Sebaliknya, peningkatan produktivitas yang konsisten menggambarkan adanya perbaikan dalam praktik budidaya dan dukungan kebijakan yang efektif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pemantauan indikator produktivitas padi menjadi semakin krusial. Data yang akurat dan analisis yang tepat dapat membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas produksi dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis pangan dunia.



Gambar 3.39 Analisis Perkembangan Produktivitas Padi Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

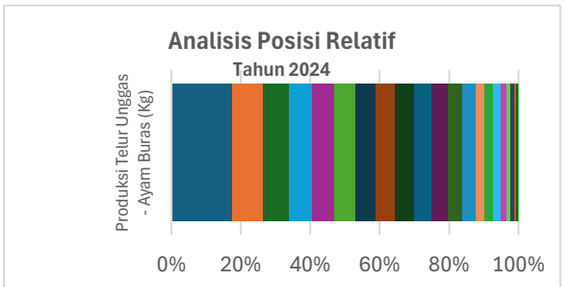
Berdasarkan analisis posisi relatif, posisi produktivitas padi di Kabupaten Bandung menunjukkan capaian sebesar 64,33 Kuintal/Ha. Capaian tersebut berada di atas capaian produktivitas padi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kabupaten Bandung menempati urutan ketiga atas capaian produktivitas padi tertinggi, adapun dua kabupaten/kota yang memiliki capaian produktivitas padi lebih tinggi dari Kabupaten Bandung adalah Kota Bandung dan Kota Indramayu. Sedangkan yang memiliki capaian produktivitas padi dengan nilai terendah adalah Kota Bekasi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bekasi. Kemudian, apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan produktivitas padi di Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif cenderung meningkat.

Selain itu dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang dapat dikatakan cukup efektif karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Bandung. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa capaian produktivitas padi di Kabupaten Bandung fluktuatif dengan tren yang cenderung meningkat, sama halnya dengan tren Provinsi Jawa Barat yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan produktivitas padi antara Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

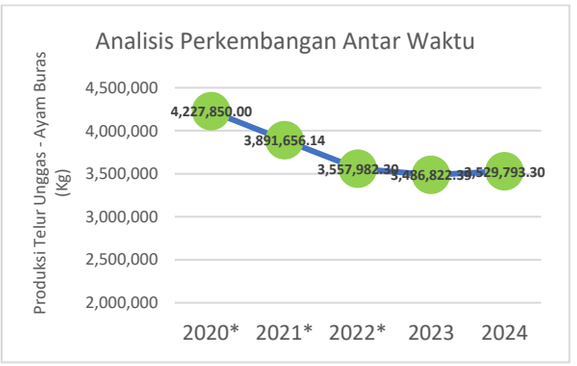
3.2.6.3 PRODUKSI TELUR AYAM BURAS

Produksi telur ayam merupakan salah satu indikator penting dalam subsektor peternakan, karena mencerminkan tingkat produktivitas ternak unggas serta ketersediaan pangan asal hewani bagi masyarakat. Telur ayam juga menjadi salah satu sumber protein hewani yang mudah diakses, bergizi tinggi, dan memiliki permintaan yang stabil sepanjang tahun. Oleh karena itu, peningkatan produksi telur ayam tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi peternak kecil dan menengah.

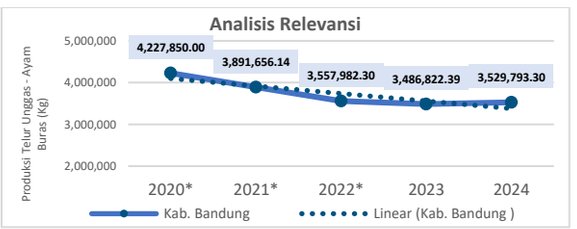
Indikator produksi telur ayam digunakan untuk mengukur jumlah telur yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan memantau indikator ini secara berkala, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung sektor unggas, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta menjamin ketersediaan telur sebagai komoditas pangan strategis nasional.

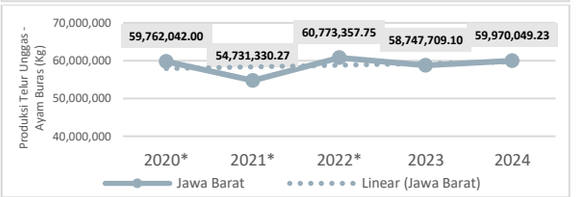


	Produksi Telur Unggas - Ayam Buras (Kg)
Cianjur	10,564,886.37
Tasikmalaya	5,258,804.36
Indramayu	4,568,557.00
Bogor	3,965,956.02
Subang	3,734,380.70
Sukabumi	3,721,222.40
Bandung	3,529,793.30
Ciamis	3,341,806.58
Garut	3,312,021.86
Cirebon	2,987,302.52
Purwakarta	2,741,146.91
Majalengka	2,542,629.27
Bekasi	2,335,272.94
Kota Tasikmalaya	1,575,823.58
Kuningan	1,493,944.02
Sumedang	1,234,542.18
Karawang	990,280.41
Bandung Barat	730,576.15
Pangandaran	720,568.55
Kota Bekasi	243,897.15
Kota Bogor	163,497.48
Kota Banjar	64,836.81
Kota Depok	47,185.00
Kota Bandung	46,383.27
Kota Cirebon	29,447.30
Kota Cimahi	21,447.92
Kota Sukabumi	3,839.18









**data yang digunakan adalah data Produksi Telur – Ayam Kampung*

Gambar 3.40 Analisis Produksi Telur Ayam Buras Kabupaten Bandung

Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 posisi relatif produksi telur ayam buras Kabupaten Bandung menunjukkan capaian dalam setahun sebesar 3.529.793,30 kg berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat. Capaian tersebut menyumbang sekitar 5,89% produksi telur ayam buras Provinsi Jawa Barat (59.970.049,23 kg). Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, perkembangan produksi telur ayam buras Kabupaten Bandung, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 trennya cenderung menurun, namun pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan.

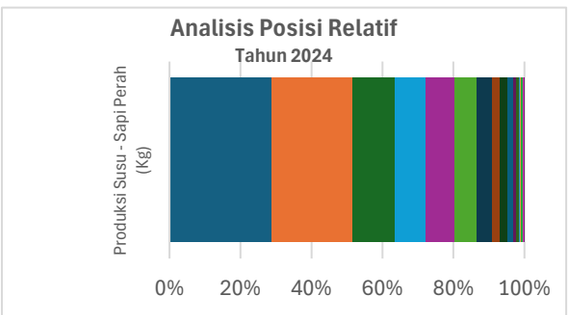
Selain itu dapat dilihat juga efektivitas program dan kegiatan peningkatan produksi telur ayam buras di Kabupaten Bandung selama beberapa tahun ke belakang masih cenderung belum efektif karena memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa produksi telur ayam buras Kabupaten Bandung cenderung menunjukkan tren yang cukup

berbeda dengan tren Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan produksi telur ayam buras antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung belum terlalu relevan.

3.2.6.4 PRODUKSI SUSU SAPI PERAH

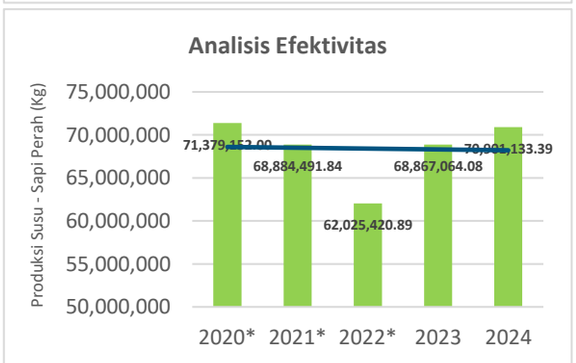
Susu sapi perah merupakan salah satu komoditas strategis dalam subsektor peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Di tingkat kabupaten, pengembangan usaha sapi perah menjadi bagian dari upaya peningkatan pendapatan peternak, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan pangan berbasis protein hewani.

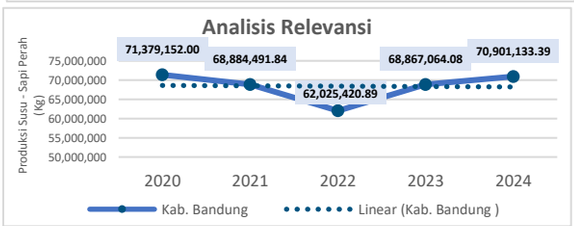
Data produksi susu sapi perah dapat menggambarkan jumlah susu yang dihasilkan oleh populasi sapi perah dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas ternak perah, efisiensi sistem budidaya, serta efektivitas program pembinaan dan penyediaan sarana produksi peternakan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

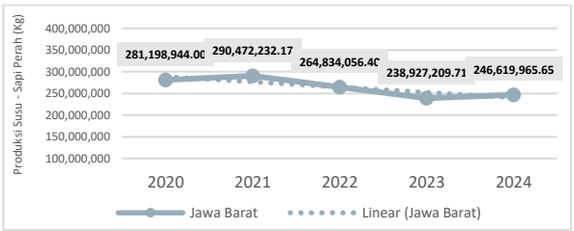


	Produksi Susu - Sapi Perah (Kg)
Bandung	70,901,133.39
Bandung Barat	56,341,479.34
Garut	29,081,962.89
Subang	22,056,083.32
Kuningan	19,775,535.59
Bogor	15,513,201.85
Sumedang	10,494,005.10
Cianjur	5,531,713.00
Sukabumi	5,268,164.84
Tasikmalaya	3,913,778.41
Kota Bogor	2,063,945.49
Kota Cimahi	1,737,797.29
Kota Depok	1,125,336.00
Majalengka	928,650.99
Kota Bandung	617,440.87
Kota Tasikmalaya	502,915.55
Cirebon	266,395.86
Kota Sukabumi	211,622.88
Bekasi	104,566.60
Purwakarta	62,242.02
Ciamis	59,752.34
Kota Bekasi	42,324.58
Karawang	19,917.45
Indramayu*	0
Pangandaran*	0
Kota Cirebon*	0
Kota Banjar*	0









Gambar 3.41 Analisis Produksi Susu Sapi Perah Kabupaten Bandung

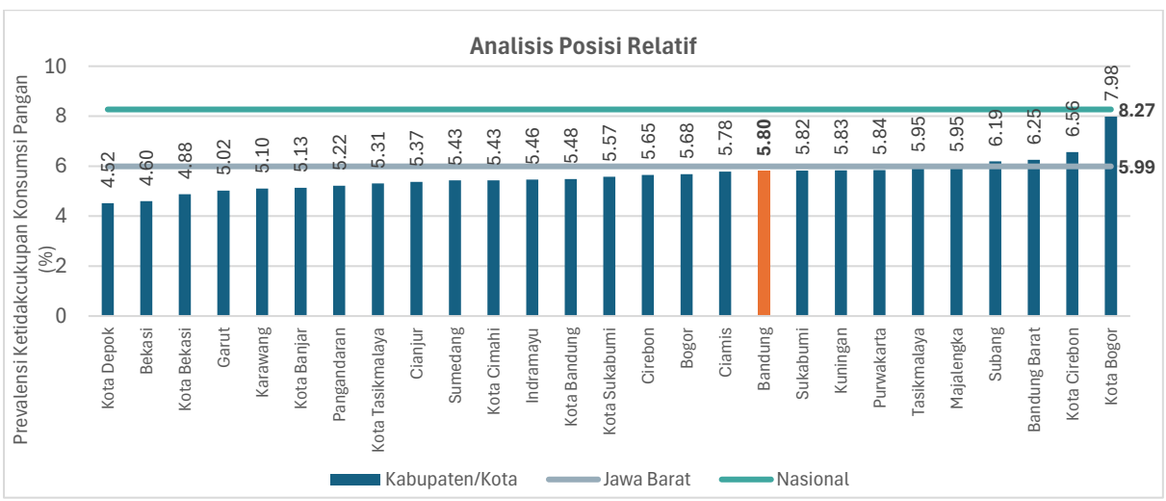
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

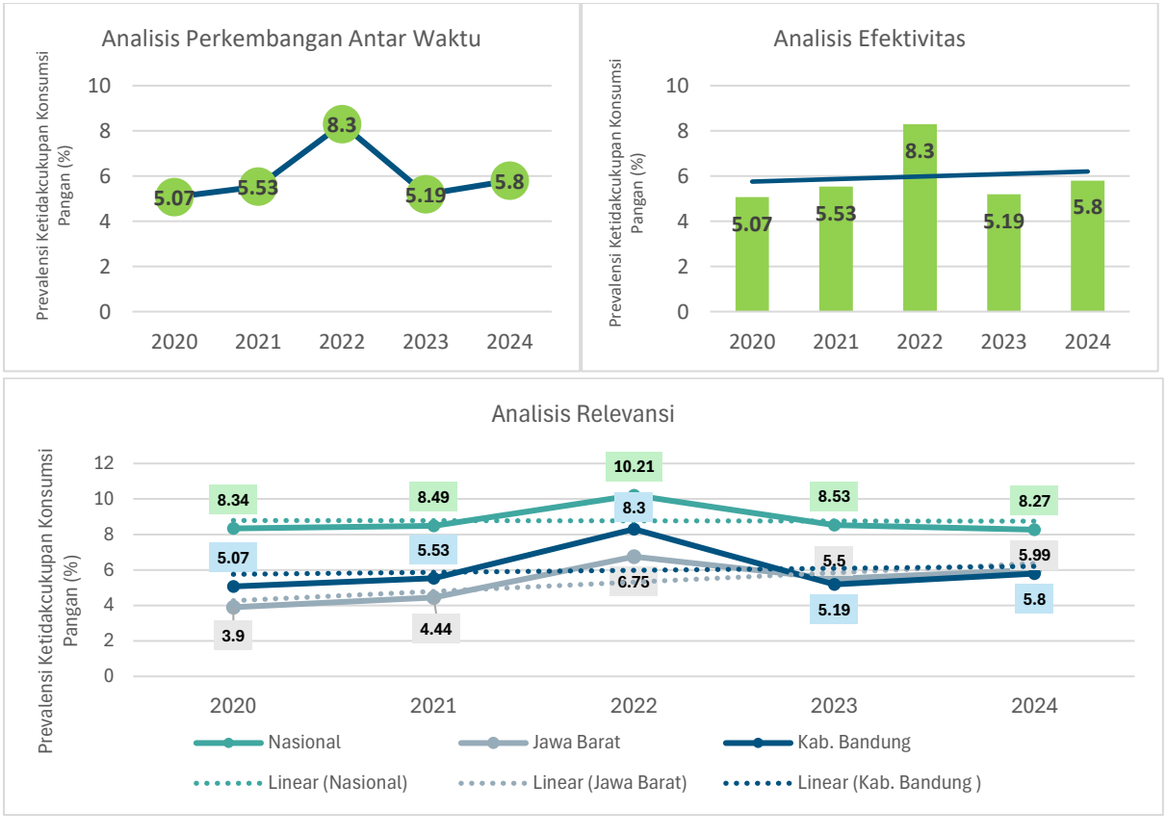
Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, produksi susu sapi Kabupaten Bandung Tahun 2024 menunjukkan capaian dalam setahun sebesar 70.901.133,39 kg. Capaian tersebut menyumbang sekitar 28,75% produksi susu sapi Provinsi Jawa Barat (246.619.965,65 kg) dan menjadi capaian produksi susu sapi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan apabila melihat perkembangan dalam lima tahun terakhir yakni pada tahun 2020-2024, produksi susu sapi Kabupaten Bandung memiliki perkembangan yang cukup fluktuatif, di mana terjadi penurunan pada tahun 2021 dan tahun 2022, namun mengalami tren peningkatan kembali pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Jika dilihat dari analisis efektivitas pada grafik di atas kaitan produksi susu sapi di Kabupaten Bandung dari tahun 2020–2024, tren produksi susu sapi Kabupaten Bandung mengalami fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan produksi susu sapi. Adapun apabila dilihat dari relevansinya dengan capaian Provinsi Jawa Barat, upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan produksi susu sapi perah belum terlalu relevan dengan Provinsi Jawa Barat, yang ditunjukkan dengan tren yang cukup berbeda dengan tren Provinsi Jawa Barat.

3.2.6.5 PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah PoU (Prevalence of Undernourishment). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah/kurang dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun.





Gambar 3.42 Analisis Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Bandung

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah)

Dilihat dari posisi relatif, capaian indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) Kabupaten Bandung Tahun 2024 berada pada urutan ke-10 dengan capaian PoU tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Namun capaian PoU Kabupaten Bandung tahun 2024 tersebut telah lebih baik dari capaian PoU Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Capaian indikator PoU Kabupaten Bandung tahun 2024 jika dilihat dari posisi relatifnya dapat dilihat pada grafik di atas.

Jika meninjau perkembangan antar waktu indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Bandung, menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 (dengan capaian 5,07%) hingga tahun 2024 (dengan capaian 5,8%) perkembangannya cukup fluktuatif. Dengan tren yang masih fluktuatif cenderung meningkat, dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) di Kabupaten Bandung belum cukup efektif. Adapun jika disandingkan dengan tren Provinsi Jawa Barat dan Nasional, PoU Kabupaten Bandung memiliki tren yang cukup mirip dengan tren Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Maka dapat dikatakan bahwa program intervensi yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung dalam rangka menurunkan PoU sudah cukup relevan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

3.2.6.6 INDEKS KETAHANAN PANGAN

Menurut Badan Pangan Nasional (2023), yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) serta peringkat (*ranking*) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Adapun mekanisme penghitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah sebagai berikut.

1) Standardisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan *distance to scale* (0 – 100)
2) Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandardisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$

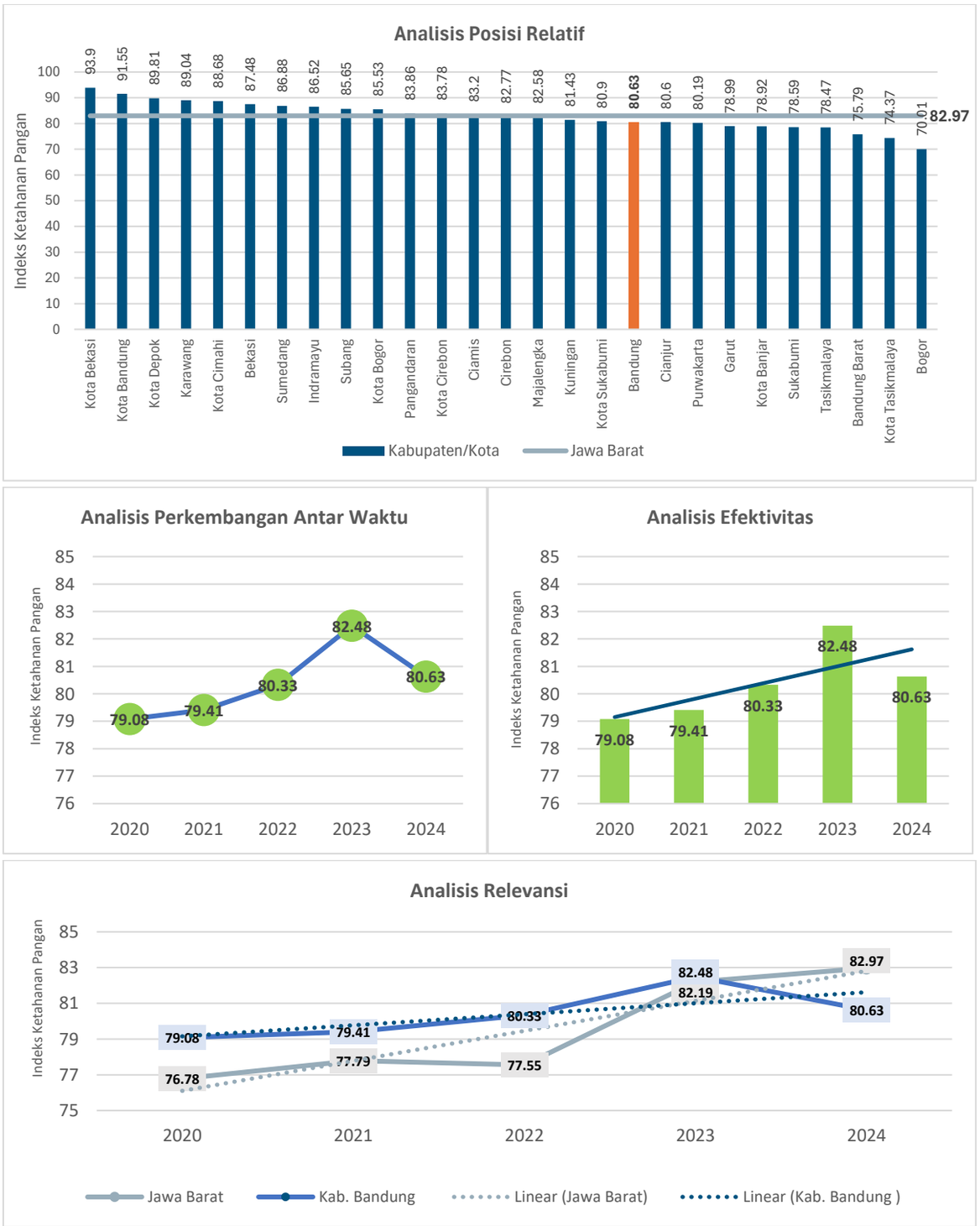
Di mana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, … 7, 8, dan 9
j : Kabupaten ke-1, 2, 3, … 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, … 96, 97, dan 98
Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3) Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan).



Gambar 3.43 Analisis Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 (diolah)

Berdasarkan analisis posisi relatif, posisi indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bandung menunjukkan capaian sebesar 80,63. Capaian tersebut berada di urutan ke-10 terendah di Jawa Barat dan berada di bawah capaian indeks ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat (82,97). Tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai tertinggi adalah Kota Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Depok, sedangkan yang memiliki nilai terendah adalah Kabupaten Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan apabila melihat perkembangan antar waktu, indeks ketahanan pangan di Kabupaten Bandung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung selalu meningkat, kecuali pada tahun 2024 mengalami

penurunan. Dapat diketahui juga bahwa dari sisi efektivitas, program-program terkait ketahanan pangan di Kabupaten Bandung pada periode 2020-2024 sudah cukup berhasil karena memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung. Kemudian apabila melihat hasil analisis relevansi, dapat diketahui bahwa capaian IKP Kabupaten Bandung cenderung meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2024, hal ini menunjukkan sebagian persamaan dengan tren Provinsi Jawa Barat yang cenderung meningkat namun juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan IKP antara Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung cukup relevan.

3.2.7 RINGKASAN KARAKTERISTIK KEMISKINAN KABUPATEN BANDUNG

Tabel di bawah ini menunjukkan ringkasan analisis karakteristik permasalahan kemiskinan yang telah dilakukan pada subbab-subbab sebelumnya. Daftar berikut yang kemudian akan menjadi bahan analisis yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Tabel 3.2 Ringkasan Karakteristik Indikator Kemiskinan berdasarkan Berbagai Bidang di Kabupaten Bandung

Bidang	Indikator Utama	Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
End Goals	Persentase Penduduk Miskin	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-7 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung menurun, namun terdapat peningkatan pada tahun 2021	Efektif	Relevan
	Jumlah Penduduk Miskin	Termasuk 10 besar tertinggi dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung menurun, namun terdapat peningkatan pada tahun 2021	Efektif	Relevan
	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-3 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung menurun	Efektif	Cukup relevan
	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-2 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung menurun	Efektif	Cukup relevan
	Rasio Gini	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung menurun, namun terdapat peningkatan pada tahun 2024	Efektif	Cukup relevan
Ketenaga-kerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih baik dari Provinsi Jawa Barat namun di bawah capaian Nasional; Peringkat ke-11 dibanding	Konsisten menurun	Efektif	Relevan

Bidang	Indikator Utama	Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
		kab/kota Jawa Barat lainnya			
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-12 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat, namun terdapat penurunan pada tahun 2022	Efektif	Relevan dengan Nasional
Kesehatan	Angka Kematian Ibu	-	Fluktuatif	Masih kurang efektif	-
	Jumlah Kematian Bayi	-	Fluktuatif	Masih kurang efektif	-
	Umur Harapan Hidup	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-11 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Konsisten meningkat	Efektif	Relevan
	Stunting	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-2 tertinggi dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung menurun	Cukup Efektif	Relevan
	Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS	Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat	Belum Efektif	Relevan
	Jumlah Temuan Kasus Tuberculosis	Peringkat ke-4 tertinggi dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat	Belum Efektif	Relevan
	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk	Sama dengan capaian Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Adanya sedikit peningkatan	Masih kurang efektif	Masih kurang relevan dengan Jawa Barat
Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-5 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat	Efektif	Cukup relevan

Bidang	Indikator Utama	Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-11 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Belum Efektif	Cukup relevan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Sederajat	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-11 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Cukup relevan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	Lebih baik dari Nasional namun di bawah capaian Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat, namun terdapat penurunan pada tahun 2024	Efektif	Cukup relevan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/Sederajat	Di bawah Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-6 terendah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Cukup relevan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/Sederajat	Di bawah Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-6 terendah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat, namun terdapat penurunan pada tahun 2023	Efektif	Relevan
	Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi	Lebih baik dari Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-11 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Efektif	Cukup relevan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	Lebih baik dari Provinsi Jawa Barat namun di bawah capaian Nasional; Peringkat ke-10 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Efektif	Cukup relevan
	Harapan Lama Sekolah	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat;	Konsisten meningkat	Efektif	Relevan

Bidang	Indikator Utama	Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
		Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya			
	Rata-rata Lama Sekolah	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-10 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat, namun terdapat penurunan pada tahun 2022	Efektif	Relevan
Infrastruk-tur Dasar	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi Layak	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung meningkat	Efektif	Cukup relevan
	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Kurang relevan
	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Dari Listrik	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Capaian konsisten 100%	Konsisten pada capaian 100%	Efektif	Relevan
	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Layak Huni	Di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Kurang relevan
Ketahanan Pangan	Perkembangan Harga Beras	Lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat dan kabupaten lain di Jawa Barat	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Relevan
	Produktivitas Padi	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat ke-3 dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung meningkat	Cukup Efektif	Relevan

Bidang	Indikator Utama	Analisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
	Produksi Telur Ayam Buras	Peringkat ke-7 tertinggi dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif cenderung menurun	Masih kurang efektif	Masih kurang relevan dengan Jawa Barat
	Produksi Susu Sapi Perah	Peringkat tertinggi dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Masih kurang efektif	Relevan
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	Lebih baik dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Fluktuatif	Cukup Efektif	Relevan
	Indeks Ketahanan Pangan	Lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Jawa Barat; Peringkat menengah dibanding kab/kota Jawa Barat lainnya	Cenderung meningkat, namun terdapat penurunan pada tahun 2024	Efektif	Relevan

Sumber: Hasil analisis Bapperida, 2025

Penandaan warna pada tabel digunakan untuk memudahkan interpretasi hasil analisis. Indikator yang ditampilkan dengan warna merah menunjukkan kondisi yang masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan, baik karena kinerjanya belum optimal, cenderung menurun, kurang efektif, maupun kurang relevan dibandingkan capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, indikator yang ditampilkan dengan warna hijau menggambarkan kondisi yang relatif baik, stabil, atau menunjukkan kinerja positif, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberlanjutannya melalui kebijakan yang konsisten.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM

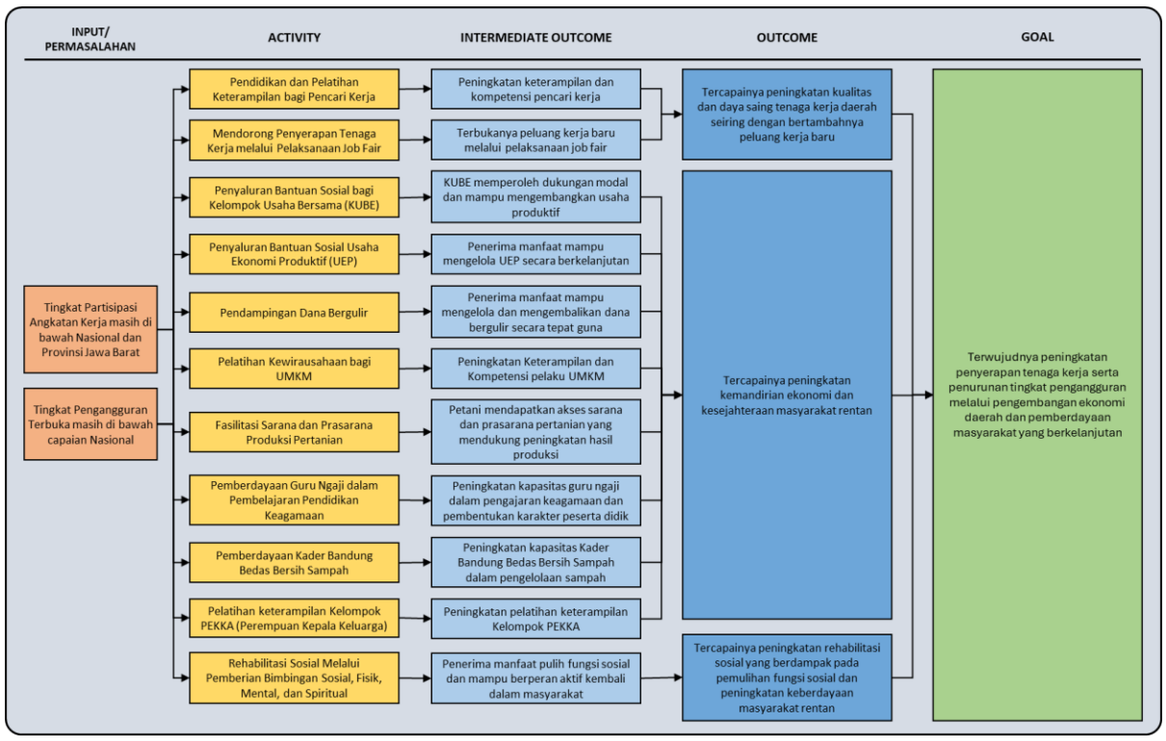
4.1 PENGEMBANGAN LOGIKA PROGRAM

Theory of Change (ToC) merupakan pendekatan analitis yang digunakan untuk menentukan *outcome* yang ingin dicapai sekaligus memproyeksikan langkah untuk mencapainya melalui intervensi program kebijakan. Melalui pendekatan ini, setiap tahapan intervensi — mulai dari input, aktivitas, *outcome* menengah, hingga *outcome* akhir dan dampak — disusun secara logis agar dapat menjelaskan bagaimana suatu kebijakan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. *Theory of Change* dapat memberikan landasan analitis dalam penyusunan logika program.

Dalam konteks penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung, *Theory of Change* menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi antara tujuan strategis, sasaran program, serta hasil yang ingin dicapai. Dengan mengintegrasikan *Theory of Change* ke dalam pengembangan logika program, memungkinkan pemerintah daerah untuk menelusuri bagaimana dan mengapa suatu kegiatan dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap sumber daya pembangunan digunakan secara efektif dan efisien. Penerapan *Theory of Change* dalam proses perencanaan RPKD juga membantu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan daerah, serta mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan.

Dengan demikian, *Theory of Change* dapat memperkuat peran RPKD sebagai dokumen kebijakan yang bukan hanya berfungsi sebagai alat perencanaan strategis, tetapi juga sebagai kerangka kerja adaptif yang menjadi dasar dalam pengembangan logika program, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

4.1.1 BIDANG KETENAGAKERJAAN



Gambar 4.1 *Theory of Change* Bidang Ketenagakerjaan
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

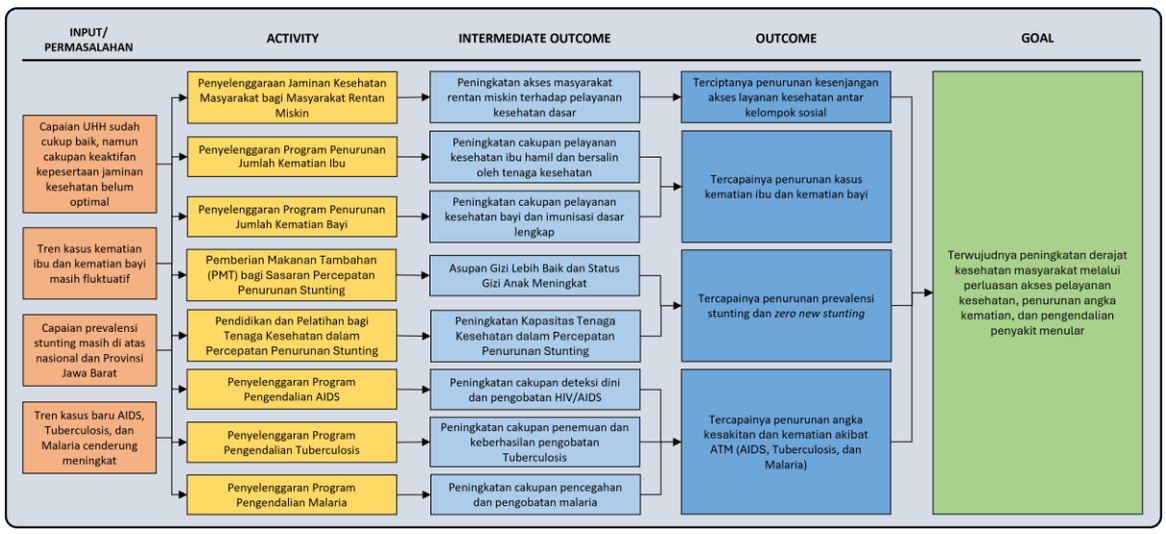
Rangkaian intervensi pada bidang ketenagakerjaan disusun berdasarkan kerangka *Theory of Change* (ToC) yang menekankan keterpaduan antara input permasalahan, aktivitas, hasil antara (*intermediate outcome*), hasil utama (*outcome*), hingga tujuan akhir (*goal*). Kerangka ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki hubungan logis dan terukur terhadap sasaran pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam bidang ketenagakerjaan mencakup Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih di bawah capaian nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta Tingkat Pengangguran Terbuka masih di bawah capaian nasional. Dua isu tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai aktivitas intervensi yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses terhadap lapangan kerja, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, penyelenggaraan *job fair*, serta pendampingan usaha produktif dan penyaluran bantuan sosial ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan dana bergulir. Selain itu, kegiatan juga difokuskan pada pelatihan kewirausahaan bagi UMKM, peningkatan akses sarana dan prasarana produksi pertanian, pemberdayaan guru ngaji dan Kader Bandung Bedas Bersih Sampah, serta pemberdayaan masyarakat rentan melalui pelatihan keterampilan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan program rehabilitasi sosial. Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan muncul sejumlah hasil antara (*intermediate outcomes*) yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja dan

kemandirian ekonomi masyarakat. Dari hasil antara tersebut, diharapkan terwujud tiga *outcome* utama, yaitu: (1) meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja daerah seiring dengan bertambahnya peluang kerja baru; (2) meningkatnya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rentan; dan (3) meningkatnya keberdayaan sosial melalui rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial masyarakat. Ketiga outcome ini saling terkait dan membentuk jalur perubahan menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tujuan akhir (*goal*) dari Theory of Change bidang ketenagakerjaan ini adalah terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja serta penurunan tingkat pengangguran terbuka melalui pengembangan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja semata, tetapi juga memastikan pemerataan kesempatan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai strategi fundamental dalam pengentasan kemiskinan.

4.1.2 BIDANG KESEHATAN



Gambar 4.2 *Theory of Change* Bidang Kesehatan
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Kerangka *Theory of Change* (ToC) bidang kesehatan disusun untuk memperkuat arah kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan fokus pada perluasan akses pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, percepatan penurunan stunting, serta pengendalian penyakit menular. ToC ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi, aktivitas yang dilakukan, capaian hasil antara yang diharapkan, hingga tujuan akhir pembangunan kesehatan daerah yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Permasalahan utama yang diidentifikasi di antaranya meliputi: (1) capaian Umur Harapan Hidup (UHH) yang sudah cukup baik namun belum diimbangi dengan optimalnya kepesertaan jaminan kesehatan; (2) tren kasus kematian ibu dan bayi yang masih fluktuatif; (3) prevalensi stunting yang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional; serta (4) peningkatan kasus penyakit menular seperti AIDS, Tuberculosis, dan Malaria (ATM). Permasalahan

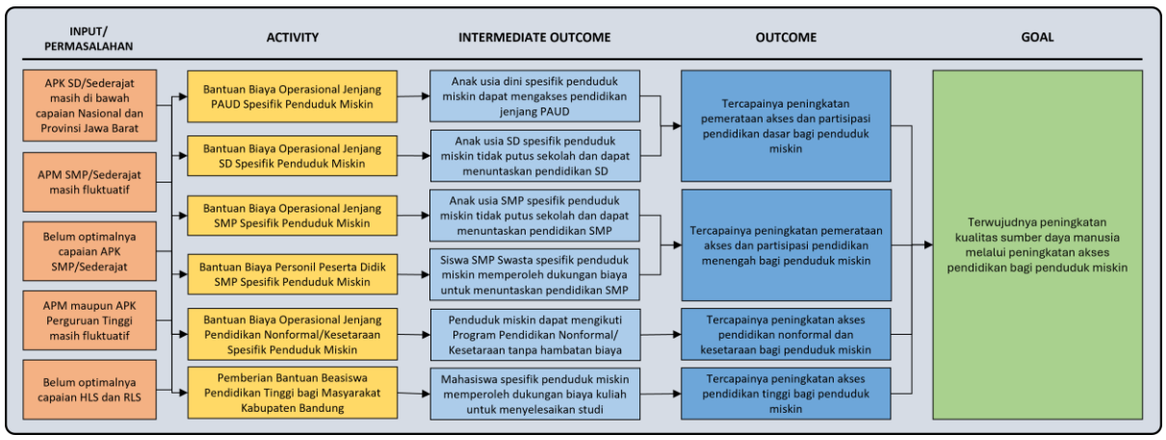
tersebut menjadi dasar penyusunan berbagai kegiatan intervensi kesehatan yang diarahkan untuk memperkuat layanan dasar dan mengurangi kesenjangan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka ToC ini antara lain mencakup penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat bagi kelompok rentan miskin, pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi sasaran percepatan penurunan stunting. Selain itu, dilakukan juga pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, serta penyelenggaraan program pengendalian penyakit menular seperti AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai.

Melalui pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan tercapai sejumlah hasil antara (*intermediate outcomes*), antara lain meningkatnya akses masyarakat rentan miskin terhadap layanan kesehatan dasar, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi, meningkatnya status gizi anak, meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan, serta meningkatnya cakupan deteksi dini dan pengobatan penyakit menular. Capaian-capaian tersebut menjadi prasyarat untuk memperkuat efektivitas program kesehatan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, hasil antara tersebut berkontribusi terhadap pencapaian beberapa *outcome* utama, diantaranya adalah: (1) menurunnya kesenjangan akses layanan kesehatan antar kelompok sosial, (2) menurunnya angka kematian ibu dan bayi, (3) menurunnya prevalensi stunting dan terwujudnya *zero new stunting*, serta (4) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti AIDS, Tuberculosis, dan Malaria. *Outcome* ini menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan daerah yang berbasis pada pencegahan, deteksi dini, dan pelayanan yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan.

Tujuan akhir (*goal*) dari ToC bidang kesehatan ini adalah terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan akses pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian, dan pengendalian penyakit menular. Dengan demikian, arah kebijakan kesehatan di Kabupaten Bandung tidak hanya difokuskan pada pelayanan kuratif, tetapi juga memperkuat aspek promotif dan preventif yang berorientasi pada pemerataan layanan. Melalui ToC ini, sektor kesehatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.3 BIDANG PENDIDIKAN



Gambar 4.3 *Theory of Change* Bidang Pendidikan
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Kerangka *Theory of Change* (ToC) bidang pendidikan disusun untuk memperkuat arah kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. ToC ini menggambarkan keterkaitan logis antara permasalahan yang dihadapi, intervensi kegiatan yang dilakukan, capaian hasil antara (*intermediate outcomes*), hasil utama (*outcomes*), hingga tujuan akhir (*goal*) yang diharapkan.

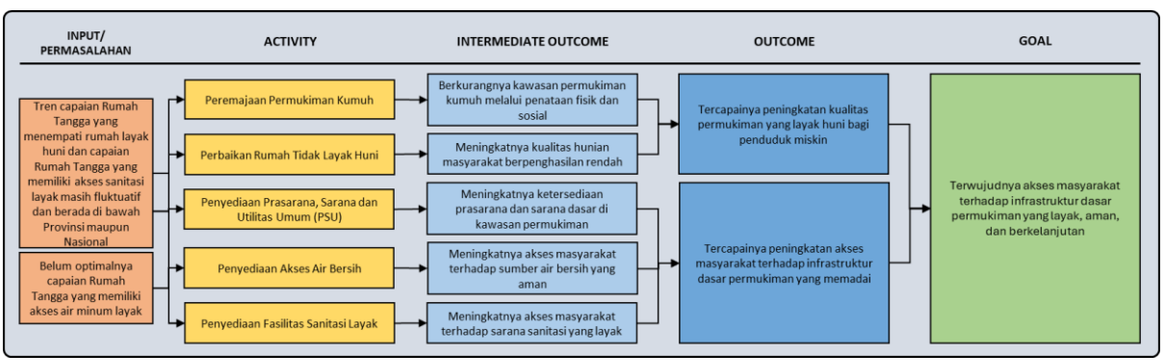
Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bandung mencakup Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/sederajat yang masih berada di bawah capaian rata-rata nasional dan provinsi, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/sederajat yang masih fluktuatif, belum optimalnya capaian APK SMP/sederajat, APM maupun APK perguruan tinggi yang belum stabil, serta capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih perlu ditingkatkan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi penduduk miskin, yang berdampak langsung terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya mobilitas sosial masyarakat. Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, berbagai aktivitas intervensi dilakukan, antara lain pemberian bantuan biaya operasional jenjang PAUD, SD, dan SMP bagi penduduk miskin, bantuan biaya personil peserta didik SMP swasta, serta bantuan biaya operasional program pendidikan nonformal atau kesetaraan bagi penduduk miskin. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dari keluarga kurang mampu. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk mengurangi hambatan ekonomi yang menjadi penyebab utama anak dari keluarga miskin tidak dapat menempuh pendidikan hingga tuntas.

Hasil antara (*intermediate outcomes*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain meningkatnya akses anak usia dini dari keluarga miskin terhadap layanan PAUD, meningkatnya kemampuan anak usia SD dan SMP dari keluarga miskin untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatnya kesempatan bagi peserta didik nonformal dan mahasiswa

berpendapatan rendah untuk menyelesaikan studinya. Melalui intervensi ini, diharapkan hambatan biaya pendidikan dapat diatasi sehingga keberlanjutan pendidikan bagi penduduk miskin lebih terjamin. Dari hasil antara tersebut, diharapkan muncul beberapa *outcome* utama, yakni: (1) meningkatnya pemerataan akses dan partisipasi pendidikan dasar bagi penduduk miskin; (2) meningkatnya pemerataan akses dan partisipasi pendidikan menengah bagi penduduk miskin; (3) meningkatnya akses pendidikan nonformal dan kesetaraan; serta (4) meningkatnya akses pendidikan tinggi bagi penduduk miskin. *Outcome* tersebut mencerminkan keberhasilan daerah dalam memperluas kesempatan belajar tanpa diskriminasi dan memperkuat ketahanan pendidikan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Tujuan akhir (*goal*) dari ToC bidang pendidikan adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin. Dengan demikian, arah kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan angka partisipasi sekolah semata, tetapi juga pada penghapusan hambatan struktural dan ekonomi yang menghalangi anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah, mengingat pendidikan merupakan faktor fundamental dalam meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.1.4 BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



Gambar 4.4 *Theory of Change* Bidang Infrastruktur Dasar
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Kerangka *Theory of Change* (ToC) bidang infrastruktur dasar disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara permasalahan, intervensi kebijakan, hasil antara, dan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan. ToC ini menjadi panduan strategis dalam memastikan pembangunan infrastruktur dasar berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Permasalahan utama yang diidentifikasi pada bidang infrastruktur dasar mencakup Tren capaian Rumah Tangga yang menempati rumah layak huni dan capaian Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih fluktuatif dan berada di bawah Provinsi maupun Nasional, serta belum

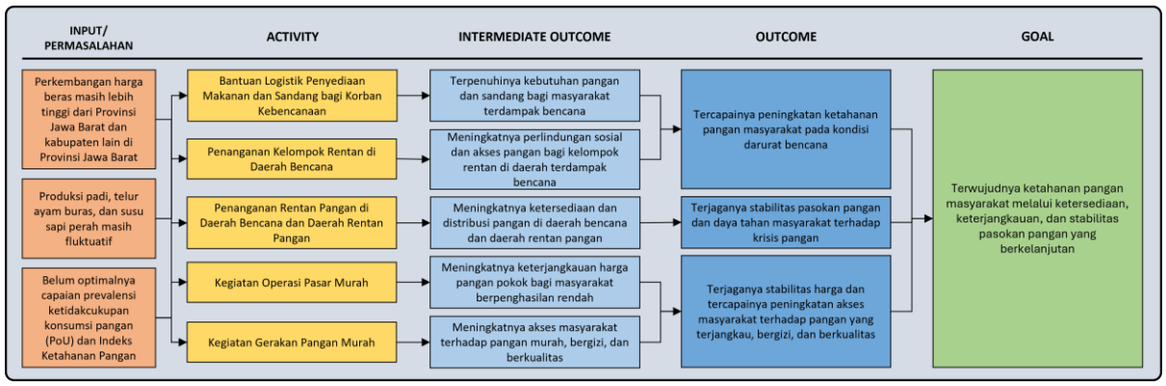
optimalnya capaian rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Permasalahan ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam pemerataan akses infrastruktur dasar, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan ketersediaan layanan dasar.

Sebagai bentuk intervensi, perlu dilaksanakan sejumlah aktivitas strategis, antara lain program peremajaan permukiman kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman, serta penyediaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak. Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperluas jangkauan infrastruktur dasar di wilayah yang belum terlayani secara optimal. Melalui pelaksanaan aktivitas tersebut, diharapkan muncul beberapa hasil antara (*intermediate outcome*), di antaranya berkurangnya kawasan permukiman kumuh melalui penataan fisik dan sosial, meningkatnya kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di kawasan permukiman, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber air bersih dan sarana sanitasi yang layak. Hasil antara ini menjadi dasar dalam mewujudkan permukiman yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Capaian hasil antara tersebut selanjutnya akan berkontribusi terhadap dua *outcome* utama, yaitu tercapainya peningkatan kualitas permukiman yang layak huni bagi penduduk miskin dan tercapainya peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang memadai. Kedua *outcome* ini menjadi indikator penting keberhasilan dalam mengurangi kerentanan sosial-ekonomi masyarakat miskin, mengingat kondisi permukiman yang layak dan akses terhadap layanan dasar merupakan prasyarat bagi peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir (*goal*) dari ToC bidang infrastruktur dasar ini adalah terwujudnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung dapat meningkat secara signifikan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Arah kebijakan ini juga mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), khususnya Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan Tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), yang menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

4.1.5 BIDANG KETAHANAN PANGAN



Gambar 4.5 *Theory of Change* Bidang Ketahanan Pangan
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Kerangka *Theory of Change* (ToC) bidang ketahanan pangan disusun untuk menggambarkan keterkaitan logis antara permasalahan utama yang dihadapi, aktivitas intervensi yang dilaksanakan, hasil antara (*intermediate outcome*), hasil utama (*outcome*), dan tujuan akhir (*goal*) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat masyarakat. ToC ini menjadi dasar perencanaan program ketahanan pangan daerah agar pelaksanaannya berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kerentanan pangan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Adapun permasalahan utama yang diidentifikasi dalam bidang ketahanan pangan antara lain perkembangan harga beras yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan kabupaten lainnya, fluktuasi produksi pangan utama seperti padi, telur ayam buras, dan susu sapi perah, serta belum optimalnya capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) dan indeks ketahanan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Bandung, terutama pada masa krisis, bencana, atau gangguan distribusi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dilaksanakan berbagai aktivitas intervensi strategis, antara lain bantuan logistik penyediaan makanan dan sandang bagi korban bencana, penanganan kelompok rentan di daerah terdampak bencana, serta penanganan ketahanan pangan di daerah bencana dan daerah rentan pangan. Selain itu, dilakukan juga kegiatan yang bersifat stabilisasi harga dan peningkatan keterjangkauan pangan seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah. Keseluruhan kegiatan tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas.

Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan muncul sejumlah hasil antara (*intermediate outcome*), di antaranya terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang bagi masyarakat terdampak bencana, meningkatnya

perlindungan sosial dan akses pangan bagi kelompok rentan, meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan di daerah bencana serta daerah rentan pangan, meningkatnya keterjangkauan harga pangan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau. Hasil antara ini menjadi pondasi penting bagi upaya penguatan sistem ketahanan pangan daerah. Selanjutnya, hasil antara tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian beberapa *outcome* utama, yakni di antaranya adalah: (1) meningkatnya ketahanan pangan masyarakat pada kondisi darurat bencana; (2) terjaganya stabilitas pasokan pangan dan daya tahan masyarakat terhadap krisis pangan; serta (3) terjaganya stabilitas harga dan meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau, bergizi, dan berkualitas. *Outcome* ini mencerminkan upaya dalam menjaga keseimbangan antara aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan akhir (*goal*) dari ToC bidang ketahanan pangan adalah terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Bandung menekankan pendekatan terpadu antara peningkatan produksi, penguatan distribusi, perlindungan sosial, serta stabilisasi harga. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada kemandirian pangan daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan kemiskinan melalui jaminan akses pangan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan.

4.2 ANALISIS KONDISI FISKAL DAERAH

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 1999 menandai perubahan penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara, di mana sebagian kewenangan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup aspek penerimaan dan pengeluaran daerah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pembangunan. Desentralisasi ini bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, analisis terhadap kondisi fiskal daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), analisis kondisi fiskal Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan data realisasi APBD tahun 2021–2024, yang kemudian dijadikan dasar dalam penilaian kapasitas fiskal daerah.

4.2.1 STRUKTUR APBD KABUPATEN BANDUNG

Dukungan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Adapun struktur APBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 APBD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Daerah	5.678.263.587.706	5.940.397.843.594	6.403.855.927.934	7.187.996.128.144
2.	Belanja Daerah	6.169.467.206.777	6.571.413.784.295	6.801.220.867.805	7.521.422.245.368
3.	Surplus/(Defisit)	(491.203.619.070)	(631.015.940.701)	(397.364.939.871)	(333.426.117.224)
4.	Pembiayaan Daerah	491.203.619.070	631.015.940.701	397.364.939.871	333.426.117.224
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024, 2025

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum terlihat bahwa struktur APBD Kabupaten Bandung dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pada tahun 2021, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5,68 triliun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp7,18 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan kinerja fiskal daerah, baik melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, maupun efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Sementara itu, belanja daerah juga menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, dari Rp6,17 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp7,52 triliun pada tahun 2024. Peningkatan belanja ini menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperluas alokasi anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan, termasuk di dalamnya program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan dasar publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, selama periode 2021–2024, APBD Kabupaten Bandung masih berada dalam posisi defisit anggaran, dengan selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang terus menurun secara bertahap — dari defisit sebesar Rp491,20 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp333,43 miliar pada tahun 2024. Penurunan besaran defisit ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan fiskal daerah, khususnya dalam pengendalian belanja dan penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah.

Dari sisi pembiayaan daerah, tercatat nilai yang fluktuatif selama empat tahun terakhir, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp631,02 miliar dan terendah pada tahun 2024 sebesar Rp333,43 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan masih menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah untuk menutup gap antara pendapatan dan belanja.

Secara keseluruhan, tren peningkatan pendapatan dan belanja daerah yang diikuti oleh penurunan defisit menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung terus mengalami penguatan. Hal ini

menandakan arah kebijakan fiskal yang semakin disiplin, berorientasi pada efisiensi belanja publik, serta mendukung prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kapasitas fiskal yang semakin membaik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bandung mampu mengoptimalkan sumber daya daerah dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.2 Pendapatan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN		5.678.263.587.706	5.940.397.843.594	6.403.855.927.934	7.187.996.128.144
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.010.043.609.147	1.248.858.860.203	1.327.942.150.185	1.606.911.330.127
1.1	Pajak Daerah	510.575.000.000	690.995.000.000	733.030.319.370	879.297.571.668
1.2	Retribusi Daerah	24.665.491.984	43.526.598.570	55.793.710.009	580.613.242.343
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.346.485.281	85.466.703.392	93.257.350.421	98.412.499.153
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	399.456.631.882	428.870.558.241	445.860.770.385	48.588.016.963
2	PENDAPATAN TRANSFER	4.234.934.378.559	4.662.638.983.391	5.044.453.777.749	5.539.929.930.017
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.642.611.052.144	3.935.093.745.568	4.231.488.875.582	4.704.600.523.094
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	592.323.326.415	727.545.237.823	812.964.902.167	835.329.406.923
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	433.285.600.000	28.900.000.000	31.460.000.000	41.154.868.000
3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	405.285.600.000	0	-	-
3.2	Pendapatan Hibah	28.000.000.000	28.900.000.000	31.460.000.000	41.154.868.000

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024

Jika meninjau Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa struktur pendapatan Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten,. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp5,68 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp7,18 triliun pada tahun 2024, atau meningkat sekitar 26,6% dalam empat tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan meningkatnya transfer dari pemerintah pusat.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat pertumbuhan yang cukup signifikan dari Rp1,01 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,60 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan PAD terutama didorong oleh peningkatan komponen pajak daerah yang terus naik dari Rp510,6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp879,3 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan semakin optimalnya perpajakan daerah serta perbaikan tata kelola penerimaan berbasis pajak. Selain itu, kontribusi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah juga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.

Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, dengan kontribusi lebih dari 70% total pendapatan setiap tahunnya. Nilai pendapatan transfer meningkat dari Rp4,23 triliun

pada 2021 menjadi Rp5,14 triliun pada 2024. Peningkatan pendapatan transfer mencerminkan besarnya dukungan fiskal nasional terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Di sisi lain, komponen hibah pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah, juga menunjukkan pertumbuhan moderat dari Rp28 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp41,15 miliar pada tahun 2024. Fluktuasi pada total komponen lain-lain pendapatan yang sah umumnya dipengaruhi oleh karakteristik pendapatan yang tidak bersifat rutin.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan pendapatan daerah semakin membaik, dengan perpaduan antara optimalisasi PAD dan peningkatan dukungan transfer pusat. Tren ini memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memperkuat pembiayaan program prioritas, termasuk penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.3 Belanja Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BELANJA		6.571.413.784.295	6.571.413.784.295	6.571.413.784.295	6.571.413.784.295
1	BELANJA OPERASI	4.622.449.121.616	4.865.022.432.898	4.969.485.681.830	5.590.234.976.697
1.1	Belanja Pegawai	2.552.538.855.379	2.426.646.440.756	2.448.560.267.995	2.689.424.908.132
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.724.555.171.722	2.052.442.825.135	2.008.631.276.625	2.260.240.938.259
1.3	Belanja Subsidi	1.187.900.000	12.907.870.250	5.547.645.000	5.115.615.529
1.4	Belanja Hibah	287.288.701.085	323.167.946.007	464.320.399.210	596.021.946.477
1.5	Belanja Bantuan Sosial	56.878.493.430	49.857.350.750	42.426.093.000	39.431.568.300
2	BELANJA MODAL	762.236.306.334	928.023.080.099	983.002.605.932	1.095.767.636.079
2.1	Belanja Tanah	16.853.491.597	72.776.669.300	43.548.335.412	60.556.371.472
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	233.507.066.974	231.372.747.874	290.098.709.604	365.509.231.191
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	128.855.013.978	209.628.540.532	269.638.544.918	257.625.513.771
2.4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	351.126.030.736	380.946.268.683	355.851.128.975	384.251.814.083
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	31.894.703.049	33.298.853.710	23.865.887.023	27.824.705.562
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	117.675.032.715	63.845.922.231	40.261.603.523	17.776.000.844
3.1	Belanja Tidak Terduga	117.675.032.715	63.845.922.231	40.261.603.523	17.776.000.844
4	BELANJA TRANSFER	667.106.746.112	714.522.349.067	808.470.976.520	817.643.631.748
4.1	Belanja Bagi Hasil	53.524.049.198	73.540.981.567	78.998.909.608	90.845.638.448
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	613.582.696.914	640.981.367.500	729.472.066.912	726.797.993.300

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024, 2025

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa struktur belanja Pemerintah Kabupaten Bandung selama periode 2021–2024 tersusun atas beberapa komponen utama dengan proporsi dan kecenderungan yang berbeda. Secara umum, pola belanja daerah memperlihatkan bahwa alokasi terbesar tetap berada pada Belanja Operasi, yang mengalami peningkatan dari Rp4,62 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp5,59 triliun pada tahun 2024. Tingginya proporsi belanja operasi menggambarkan besarnya kebutuhan pembiayaan

layanan pemerintahan, termasuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai dua komponen dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Belanja pegawai, yang naik dari Rp2,55 triliun menjadi Rp2,68 triliun dalam empat tahun, menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan. Sementara itu, belanja barang dan jasa juga meningkat signifikan dari Rp1,72 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,26 triliun pada tahun 2024, mencerminkan adanya peningkatan aktivitas operasional perangkat daerah, termasuk dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.

Komponen Belanja Modal juga memperlihatkan tren peningkatan dari Rp762,23 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,095 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur publik melalui investasi pada peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Peningkatan belanja modal merupakan sinyal positif karena mendukung pembangunan jangka panjang dan memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang memadai.

Di sisi lain, Belanja Tidak Terduga menunjukkan tren penurunan, di mana nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp117,67 miliar, kemudian menurun secara signifikan menjadi Rp17,77 miliar pada tahun 2024. Penurunan tersebut mencerminkan situasi kedaruratan atau kebutuhan kontinjensi yang cenderung lebih terkendali dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan tahun awal pandemi dan pemulihannya.

Komponen Belanja Transfer juga menunjukkan tren peningkatan dari Rp667,10 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp817,63 miliar pada tahun 2024. Peningkatan belanja ini menandakan pentingnya dukungan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dan lembaga lainnya dalam rangka memperkuat pembangunan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, serta percepatan pelayanan dasar yang dikelola di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, perkembangan belanja daerah selama periode 2021–2024 menggambarkan adanya arah kebijakan fiskal yang semakin seimbang antara belanja operasional pelayanan rutin dan penguatan investasi pembangunan jangka panjang. Peningkatan belanja modal dan belanja transfer, disertai penguatan komponen operasional yang relatif stabil, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat fondasi pembangunan daerah guna mendukung penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.4 Pembiayaan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH		491.203.619.070	631.015.940.701	397.364.939.871	333.426.117.224
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	507.204.699.070	746.015.940.701	462.584.215.249	333.426.117.224
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	507.204.699.070	746.015.940.701	461.584.215.249	323.426.117.224
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	1.000.000.000	-
1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	10.000.000.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.001.080.000	115.000.000.000	65.219.275.378	0
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	1.000.000.000	1.919.275.378	-
2.2	Penyertaan Modal Daerah	16.001.080.000	74.000.000.000	33.300.000.000	-
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	-	40.000.000.000	30.000.000.000	-

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024, 2025

Pembiayaan merupakan serangkaian transaksi keuangan daerah yang mencakup penerimaan maupun pengeluaran yang harus dibayar atau akan diterima kembali pada periode anggaran tertentu. Fungsi utama pembiayaan adalah untuk menutup kekurangan anggaran (defisit) atau memanfaatkan kelebihan anggaran (surplus), sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian, ketika anggaran mengalami surplus, pembiayaan mencerminkan mekanisme pemanfaatan surplus tersebut melalui instrumen keuangan daerah. Sebaliknya, apabila terjadi defisit, pembiayaan berperan sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk menutup selisih kekurangan tersebut agar struktur APBD tetap berada dalam kondisi seimbang.

Dapat dilihat sebelumnya pada tabel 4.1 bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2024, Kabupaten Bandung masih mengalami defisit sehingga pembiayaan daerah ditujukan untuk menutup situasi defisit anggaran tersebut. Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui gambaran struktur pembiayaan daerah Kabupaten Bandung selama periode 2021–2024, yang terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara umum, dinamika pembiayaan daerah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam menghadapi selisih antara pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran.

Pada komponen penerimaan pembiayaan, sumber terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, SiLPA tercatat sebesar Rp507,20 miliar dan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp746,02 miliar. Namun, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024, masing-masing menjadi Rp462,58 miliar dan Rp333,43 miliar. Tren penurunan SiLPA tersebut mengindikasikan bahwa kinerja penyerapan anggaran semakin optimal, sehingga sisa

anggaran tahun sebelumnya cenderung berkurang. Selain SiLPA, terdapat pula penerimaan dari pencairan dana cadangan pada tahun 2023 sebesar Rp1 miliar serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp10 miliar pada tahun 2024, yang menunjukkan diversifikasi sumber pembiayaan meskipun dalam jumlah relatif kecil.

Pada sisi lain, pengeluaran pembiayaan menunjukkan fluktuasi yang cukup besar sepanjang periode tahun 2021–2024. Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp115 miliar, yang sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp74 miliar dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp40 miliar. Pada tahun 2021 dan tahun 2023, pengeluaran pembiayaan masing-masing sebesar Rp16 miliar dan Rp65,21 miliar, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan. Dinamika ini menunjukkan adanya kebijakan fiskal yang responsif, di mana pemerintah daerah melakukan penyesuaian pengeluaran pembiayaan sesuai kebutuhan penguatan permodalan BUMD, penataan dana cadangan, dan mendukung stabilitas fiskal.

Secara keseluruhan, pola pembiayaan daerah selama tahun 2021–2024 mencerminkan peran strategis pembiayaan dalam menjaga keseimbangan APBD Kabupaten Bandung, terutama dalam menutupi defisit anggaran serta mendukung agenda pembangunan melalui penyertaan modal dan instrumen pembiayaan lainnya. Penurunan tren SiLPA dan perubahan kebutuhan pengeluaran pembiayaan juga menunjukkan penguatan disiplin fiskal serta peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran dari tahun ke tahun. Dengan pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki fondasi fiskal yang lebih stabil untuk mendukung program prioritas dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

4.2.2 KAPASITAS FISKAL DAERAH

Dalam melakukan analisis kapasitas fiskal daerah, penting untuk memperhatikan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. PAD menggambarkan sejauh mana daerah mampu menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kewenangannya sendiri untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Besaran PAD juga menjadi cerminan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penguatan PAD diharapkan dapat menjadikan komponen ini sebagai salah satu sumber pendanaan terbesar dalam APBD, sehingga peran pemerintah daerah dalam pembangunan semakin dominan. Berikut disajikan komposisi PAD Kabupaten Bandung sebagai dasar pemahaman terhadap kemampuan fiskal daerah.

Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024

NO.	URAIAN	TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pajak Daerah	510.575.000.000	50,55	690.995.000.000	55,33	733.030.319.370	55,20	879.297.571.668	54,72
2	Retribusi Daerah	24.665.491.984	2,44	43.526.598.570	3,49	55.793.710.009	4,20	580.613.242.343	36,13

NO.	URAIAN	TAHUN							
		2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.346.485.281	7,46	85.466.703.392	6,84	93.257.350.421	7,02	98.412.499.153	6,12
4	Lain-lain PAD yang Sah	399.456.631.882	39,55	428.870.558.241	34,34	445.860.770.385	33,58	48.588.016.963	3,02
Jumlah		1.010.043.609.147		1.248.858.860.203		1.327.942.150.185		1.606.911.330.127	

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024, 2025

Merujuk pada tabel di atas, komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung selama periode tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan kontributor terbesar terhadap PAD, dengan proporsi yang konsisten berada di kisaran 50–55% setiap tahunnya. Pada tahun 2021, pajak daerah menyumbang 50,55% dari total PAD, dan mencapai 54,72% pada tahun 2024. Dominasi pajak daerah menegaskan bahwa sektor perpajakan merupakan pilar utama kemandirian fiskal Kabupaten Bandung.

Selain pajak daerah, komponen retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Secara nominal, retribusi meningkat dari Rp24,66 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp43,53 miliar pada tahun 2022, atau tumbuh sekitar 76,56%. Peningkatan ini juga diikuti bertambahnya proporsi retribusi dalam PAD, dari 2,44% menjadi 3,49%, dan meningkat tajam menjadi 36,13% pada tahun 2024.

Komponen Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan penurunan proporsi pada tahun 2022, serta cenderung kembali naik pada tahun 2023 sebelum menurun lagi pada tahun 2024. Secara nominal, komponen ini tetap meningkat setiap tahunnya, namun laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pajak dan retribusi, sehingga proporsinya cenderung menurun relatif terhadap total PAD. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang sah juga mengalami tren penurunan proporsi, dari 39,55% pada tahun 2021 menjadi 3,02% pada tahun 2024. Dominasi pajak daerah dan peningkatan retribusi membuat kontribusi relatif Lain-lain PAD yang sah menurun.

Secara agregat, PAD Kabupaten Bandung menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp1,01 triliun pada tahun 2021 dan mencapai Rp1,61 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 59% dalam kurun waktu empat tahun. Tren peningkatan PAD selama tahun 2021–2024 tersebut mengindikasikan potensi meningkatnya kemandirian fiskal daerah, sekaligus mencerminkan perbaikan kinerja pendapatan daerah, terutama pada aspek pajak dan retribusi.

Lebih lanjut, menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran

pembiayaan daerah tertentu. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut.

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = [pendapatan + penerimaan\ pembiayaan\ tertentu] - [belanja\ tertentu\ +\ pengeluaran\ pembiayaan\ tertentu]$$

Keterangan:

$KFD_{kabupaten/kota-i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
Pendapatan	=	Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penerimaan pembiayaan tertentu	=	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Belanja tertentu	=	Belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil, dan alokasi dana desa
Pengeluaran pembiayaan tertentu	=	pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah

Kemudian dilakukan juga perhitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah dengan formula sebagai berikut.

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan:

$RKFD_{kabupaten/kota-i}$	=	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
$KFD_{kabupaten/kota-i}$	=	Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota
Belanja $Pegawai_{kabupaten/kota-i}$	=	Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah yang telah dihitung, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah dengan acuan sebagai berikut.

Tabel 4.6 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,171	sangat rendah
1,171 ≤ RKFD < 1,504	rendah
1,504 ≤ RKFD < 1,838	sedang
1,838 ≤ RKFD < 2,171	tinggi
2,171 ≤ RKFD	sangat tinggi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2022

Berikut ini adalah matriks hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan rumus yang dibahas sebelumnya.

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bandung

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	5.678.263.587.706	5.940.397.843.594	6.403.855.927.934	7.187.996.128.144
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.010.043.609.147	1.248.858.860.203	1.327.942.150.185	1.606.911.330.127
1.2	Pendapatan Transfer	4.234.934.378.559	4.662.638.983.391	5.044.453.777.749	5.539.929.930.017
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	433.285.600.000	28.900.000.000	31.460.000.000	41.154.868.000
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN TERTENTU	507.204.699.070	746.015.940.701	461.584.215.249	323.426.117.224
2.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	507.204.699.070	746.015.940.701	461.584.215.249	323.426.117.224
3	BELANJA TERTENTU	2.606.062.904.577	2.500.187.422.323	2.527.559.177.603	2.780.270.546.580
3.1	Belanja Pegawai	2.552.538.855.379	2.426.646.440.756	2.448.560.267.995	2.689.424.908.132
3.2	Belanja Bunga	0	0	0	0
3.3	Belanja Bagi Hasil	53.524.049.198	73.540.981.567	78.998.909.608	90.845.638.448
3.4	Alokasi Dana Desa	0	0	0	0
4	PENGELUARAN PEMBIAYAAN TERTENTU	0	0	0	0
4.1	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah	0	0	0	0
RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH		1,402	1,725	1,772	1,759
KATEGORI RASIO KAPASITAS FISKAL DAERAH		rendah	sedang	sedang	sedang

Sumber: Ringkasan Perubahan APBD Kab. Bandung Tahun 2021-2024 (diolah), 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bandung tahun 2021–2024, terlihat bahwa kemampuan keuangan daerah menunjukkan tren penguatan dari tahun 2021 hingga 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bandung meningkat dari 1,402 pada tahun 2021 (kategori rendah) menjadi 1,725 pada tahun 2022, dan kemudian naik lagi menjadi 1,772 pada tahun 2023. Peningkatan rasio tersebut membawa Kabupaten Bandung masuk ke kategori sedang sejak tahun 2022 dan status ini terus bertahan hingga tahun 2024, meskipun pada tahun 2024 nilai rasionya sedikit turun menjadi 1,759. Perbaikan kategori ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah Kabupaten Bandung semakin membaik, terutama ditopang oleh peningkatan kinerja PAD, pendapatan transfer, serta pemanfaatan SILPA. Meskipun demikian, optimalisasi pengelolaan sumber pendanaan lain di luar PAD tetap diperlukan agar kapasitas fiskal semakin kuat dan berkelanjutan. Selain pendapatan yang bersumber dari APBD, perlu pula dicatat bahwa terdapat dana desa yang penyalurannya dilakukan langsung ke masing-masing desa oleh Pemerintah Pusat dan tidak tercatat sebagai bagian dari kapasitas fiskal daerah dalam APBD.

4.3 xx KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029. Pada Inpres tersebut diarahkan bahwa OPPKPKE dilaksanakan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui rangkaian strategi terintegrasi. Strategi-strategi tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari peningkatan akses layanan dasar, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Pendekatan ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus melibatkan intervensi menyeluruh, baik dari sisi peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, maupun mitigasi kerentanan sosial-ekonomi yang dihadapi. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan beberapa strategi dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, di antaranya: (a) meningkatnya pendapatan masyarakat; (b) menurunnya beban pengeluaran masyarakat; (c) berkurangnya kantong-kantong kemiskinan; dan (d) terpadunya tata kelola penanggulangan kemiskinan.

Tabel 4.8 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
A	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat														
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	TPT	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	41%	3.117.222.900	42%	3.117.222.900	43%	3.117.222.900	44%	3.117.222.900			DISNAKER
			Optimalisasi Program Penempatan Kerja melalui Layanan Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Antar Daerah Kabupaten/ Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	16%	2.155.466.612	17%	2.155.466.612	18%	2.155.466.612	19%	2.155.466.612			DISNAKER
			Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja melalui Job Fair												
2	Meningkat-nya Produksi Pangan Strategis	Jumlah luas lahan pengemba-ngan komoditi tanaman pangan	Optimalisasi Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Program Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Pertanian	1324960,8	7.039.140.000	1347321,93	7.490.928.000	13700 89,67	6.979.140.000	1393273,48	7.019.140.000			DISTAN
			Optimalisasi Jaringan Irigasi Usaha Tani												
			Pengembangan Usaha Budidaya Pangan Strategis												
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	8,95	1.575.000.000	4,85	1.575.000.000	11,16	1.625.000.000	11,49	1.575.000.000			DISTAN
3	Meningkat-nya Pemberda-yaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin yang Difasilitasi Kegiatan Pemberda-yaan Ekonomi Masyarakat	Pemberian Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	51,89%	2.517.754.200	68,79%	2.517.754.200	85,68%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200			DINSOS
			Optimalisasi Kemitraan Usaha bagi UMKM	Program Pemberdaya-an UMKM	8,50%	768.017.000	12,75%	768.017.000	17%	768.017.000	21,25%	768.017.000			DISKOPUKM
			Optimalisasi Perizinan Usaha bagi UMKM												

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
			Pendampingan Dana Bergulir Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM												
			Inkubasi Bisnis dan Gelar Produk UMKM	Program Pengemba-ngan UMKM	10%	1.101.913.268	10%	1.101.913.268	10%	1.101.913.268	10%	1.101.913.268			DISKOPUKM
			Program Pembelajaran Pendidikan Keagamaan/ Insentif Guru Ngaji	Program Pengelolaan Pendidikan	92,84%	236.528.842.025	95,18%	236.528.842.025	97,00%	236.528.842.025	97,50%	236.528.842.025			DISDIK
			Pembentukan Kader Bandung Bedas Bersih Sampah Pembentukan Kader Penyapu Jalan	Program Pengelolaan Persampahan	90,93%	23.709.064.416	87%	23.709.064.416	93,41%	38.561.079.094	99,69%	53.701.899.981			DLH
			Pembentukan Fasilitator/ Korwil Kampung Bedas	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50 ds (17,8%)	70.967.839	50 ds (17,8%)	70.967.839	35 ds (12,5%)	70.967.839	evaluasi dan peman-tapan	70.967.839			DLH
			Pembentukan Kader Badega Lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-40% -22,26% -50 ha	3.226.124.728	-46,67% -25,8% -50 ha	500.095.980	- 53,33 % -29% -50 ha	500.095.980	-60% -32,25% -50 ha	500.095.980			DLH
B	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat														
1	Meningkat-nya Akses Pendidikan bagi Penduduk Miskin	APK SD dan SMP	Bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan jenjang PAUD Spesifik Penduduk Miskin	Program Pengelolaan Pendidikan	67,48%	236.528.842.025	71,24%	236.528.842.025	73%	236.528.842.025	75%	236.528.842.025			DISDIK
			Bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	92,84%	236.528.842.025	95,18%	236.528.842.025	97,00%	236.528.842.025	97,50%	236.528.842.025			

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
			jenjang SD Spesifik Penduduk Miskin												
			Bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan jenjang SMP Spesifik Penduduk Miskin												
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP Spesifik Penduduk Miskin												
			Bantuan biaya operasional bagi satuan pendidikan jenjang Nonformal/ Kesetaraan Spesifik Penduduk Miskin	Program Pengelolaan Pendidikan	61%	236.528.842.025	65,49%	236.528.842.025	69,69%	236.528.842.025	70%	236.528.842.025			
			Beasiswa Mahasiswa Berprestasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	14.854.503.000	100%	14.854.503.000	100%	14.854.503.000	100%	14.854.503.000			SETDA
2	Meningkat-nya Derajat Kesehatan Penduduk Miskin	Angka Harapan Hidup	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Tidak Mampu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	70.850.466.000	100%	70.850.466.000	100%	90.751.809.118	100%	91.845.689.711			DINKES
			Penyelenggaraan Program Penurunan Jumlah Kematian Ibu												
			Penyelenggaraan Program Penurunan Jumlah Kematian Bayi												
			Optimalisasi Program Penurunan *Stunting*												
			Penyelenggaraan Program Pengendalian AIDS, Tuberculosis dan Malaria												

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
3	Meningkat-nya Perlindu-ngan dan Rehabilitasi Sosial	% Keluarga Fakir Miskin (KFM) yang tertangani	Optimalisasi Pemberian Bantuan Langsung Tunai Tepat Sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	51,89%	2.517.754.200	68,79%	2.517.754.200	85,68%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200			DINSOS
			Pemberian Sembako Kepada Keluarga Miskin/Rentan Miskin												
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	60,49%	4.640.347.410	73%	4.640.347.410	86,58%	4.640.347.410	100%	4.640.347.410			DINSOS
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti												
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti												
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti												
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti												
4	Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	Kegiatan Operasi Pasar Murah	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3%	1.259.329.000	3%	1.259.329.000	3%	1.259.329.000	3%	1.259.329.000			DISPERDAGIN
			Koordinasi, sinkronisasi, dan Pengadaan Cadangan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	100%	6.126.274.400	100%	3.626.274.400	100%	8.626.274.400	100%	3.626.274.400			DISPAKAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
			Pemerintah Kabupaten	Pangan Masyarakat											
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	20%	442.500.000	20%	442.500.000	20%	442.500.000	20%	442.500.000			DISPAKAN
C	Berkurangnya Kantong-Kantong Kemiskinan														
1	Meningkat-nya Akses Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar	% kecamatan kantong kemiskinan yang terinter-vensi program peningkat-an akses sarana dan prasarana kebutuhan dasar	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	82,35%	11.340.150.846	90,68%	11.340.150.846	100,00 %	38.667.501.303	100%	56.331.792.341			DISPERKIMTAN
			Penyediaan Air Bersih	Program Pengelolaan dan Pengemba-ngan Sistem Penyediaan Air Minum	94,70%	12.544.793.000	98%	12.544.793.000	100%	12.544.793.000	100%	12.544.793.000			DPUTR
			Penyediaan Sanitasi Layak	Program Pengelolaan dan Pengemba-ngan Sistem Air Limbah		11.783.606.999		11.783.606.999		11.783.606.999		11.783.606.999			DPUTR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	45%	16.474.968.778	47%	16.474.968.778	49%	16.474.968.778	51%	16.474.968.778			DPUTR
2	Meningkat-nya Kualitas Insfrastruk-tur Perekono-mian Masyarakat	% kecamatan kantong kemiskinan yang terintervensi program peningkatan infrastruktur perekonomi-an masyarakat	Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Pelaksanaan Operasi pemeliharaan dan Rehabilitasi saluran irigasi Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Program Penyediaan dan Pengemba-ngan Sarana Pertanian	1324960,8	7.039.140.000	1347321,93	7.490.928.000	1370089, 67	6.979.140.000	1393273,48	7.019.140.000			DISTAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
3	Menurunnya tingkat kerawanan penduduk rentan miskin menjadi penduduk miskin	% pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS	Program Bantuan Logistik KBA/S Kebencanaan Penanganan kelompok rentan di daerah bencana	Program Penanganan Bencana	58,70%	2.729.720.000	73%	2.729.720.000	86,32%	2.729.720.000	100%	2.729.720.000			DINSOS
		Persentase KK miskin yang tertangani	Penanganan rentan pangan di daerah bencana dan daerah rentan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	20%	400.000.000	20%	400.000.000	20%	400.000.000	20%	400.000.000			DISPAKAN
D	Terpadunya Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan														
1	Tersusunnya Kebijakan Penanggula-ngan Kemiskian	% Penetapan Kebijakan Penanggu-langan Kemiskinan	Pembentukan TKPKD dengan Keputusan Kepala Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan (termasuk RAT)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	97,4%	2.602.700.000	98%	2.602.700.000	97,80%	2.602.700.000	98%	2.602.700.000			BAPPERIDA
2	Meningkat-nya Kualitas Basis Data dan Penggunaan Sistem Informasi Terpadu Penanggula-ngan Kemiskinan	% Akurasi Data Penduduk Miskin	Menyusun Kriteria Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Pemutahkhir-an Data Penduduk Miskin Kabupaten Bandung	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	51,89%	2.517.754.200	68,79%	2.517.754.200	85,68%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200			DINSOS
			Membangun Dashboard Data Kemiskinan Kabupaten Bandung Membangun Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung Mitigasi Risiko Pengelolaan Data Sistem Informasi Terpadu	Program Aplikasi Informatika		3.556.535.000		3.556.535.000		3.556.535.000		3.556.535.000			DISKOMINFO

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Aksi	Program	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2028		Instansi Terkait
					Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
1	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
			Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung												
3	Meningkat-nya Aksesibilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Penanggula-ngan Kemiskinan	% Penggunaan Sistem Informasi Kemiskinan	Pemetaan pengguna data Kemiskinan Kabupaten Bandung	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	326.389.000	100%	326.389.000	100%	326.389.000	100%	326.389.000			DISKOMINFO
			Penyusunan pedoman penggunaan Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	51,89%	2.517.754.200	68,79%	2.517.754.200	85,68%	2.517.754.200	100%	2.517.754.200			DINSOS
			Sosialisasi dan internalisasi Penggunaan Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung												
			Optimalisasi Pemanfaatan/ Penggunaan Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bandung												

BAB V
LOKASI PRIORITAS

Dalam upaya meningkatkan efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan, penetapan lokasi prioritas menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Setiap wilayah di Kabupaten Bandung memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan kerentanan yang berbeda, sehingga pendekatan program tidak dapat diterapkan secara seragam. Dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, ketimpangan akses layanan dasar, atau kerentanan sosial tertentu, pemerintah daerah dapat mengarahkan sumber daya dan program secara lebih terfokus. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan mengutamakan wilayah tertentu untuk peningkatan layanan pendidikan, sementara wilayah lain lebih membutuhkan dukungan di sektor kesehatan, infrastruktur dasar, atau perlindungan sosial. Analisis lokasi prioritas dalam bab ini disusun sebagai rekomendasi berbasis data yang dapat menjadi acuan dalam penentuan arah kebijakan di lapangan, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi penyesuaian sesuai dinamika kondisi wilayah.

Pada Bab ini, penentuan lokasi prioritas dilakukan dengan melakukan analisis kuadran terhadap jumlah keluarga desil 1 (miskin) dengan beberapa indikator terkait bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Adapun data jumlah keluarga desil 1 (miskin) diperoleh dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang terdapat pada Dashboard Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (*https://pemberdayaan.go.id/pages/inpres*) per tanggal 20 November 2025.

5.1 KUADRAN WILAYAH BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pada bagian ini dilakukan analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah terbanyak. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin banyak dengan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah yang relatif sedikit. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah yang banyak namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah yang sama-sama relatif rendah. Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi konsentrasi banyaknya keluarga miskin dan penduduk usia produktif yang tidak bekerja/sekolah.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 91 desa/kelurahan yang termasuk Kuadran I, atau sekitar 32,5% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah (≥ 183,30 jiwa). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini menghadapi beban ganda, yakni di satu sisi memiliki konsentrasi kemiskinan yang tinggi, dan di sisi lain memiliki populasi usia produktif yang tidak terserap dalam aktivitas produktif.

Kondisi ini mengindikasikan adanya risiko kerentanan sosial yang lebih besar, seperti keterbatasan pendapatan rumah tangga, rendahnya keberfungsian ekonomi penduduk usia kerja, serta potensi stagnasi sosial-ekonomi jika tidak dilakukan intervensi yang tepat. Dengan demikian, wilayah Kuadran I menjadi kelompok prioritas utama untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, khususnya intervensi yang bersifat peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelompok produktif, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Intervensi yang tepat pada desa/kelurahan Kuadran I diharapkan mampu menghasilkan dampak yang lebih signifikan dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil analisis kuadran data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah usia produktif yang tidak bekerja/sekolah pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.

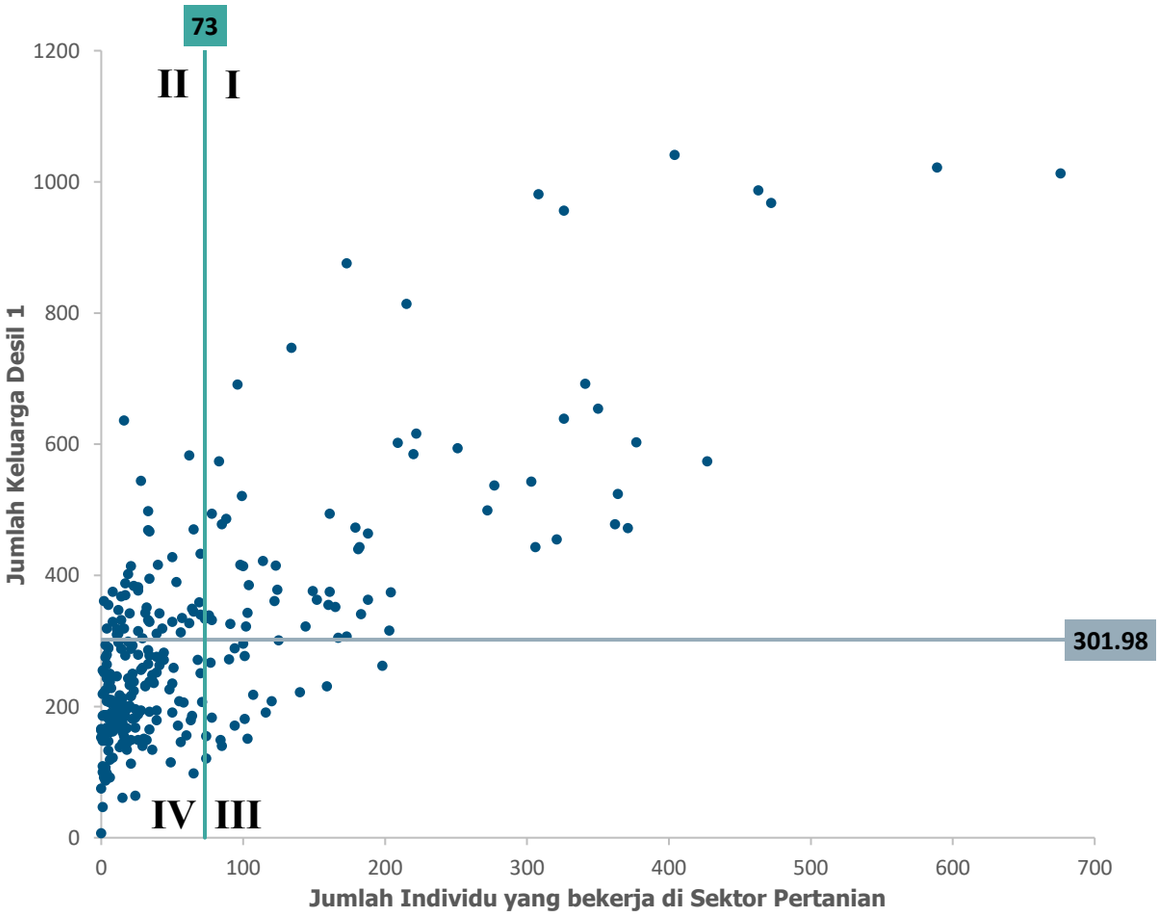


Gambar 5.1 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selanjutnya terkait bidang ketenagakerjaan, dilakukan analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian terbanyak. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin banyak dengan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian yang relatif sedikit. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian yang banyak namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian yang sama-sama relatif rendah. Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi konsentrasi banyaknya keluarga miskin dan penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 62 desa/kelurahan yang termasuk Kuadran I, atau sekitar 22,14% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian (≥73 orang). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi namun masih sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Ketergantungan yang besar terhadap sektor pertanian, terutama jika produktivitasnya rendah atau rentan terhadap fluktuasi musim dan harga komoditas, dapat memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga miskin. Situasi ini mengindikasikan perlunya intervensi yang tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas pertanian, serta peningkatan keterampilan masyarakat agar dapat mengakses sumber-sumber pendapatan alternatif. Dengan demikian, desa/kelurahan Kuadran I menjadi prioritas strategis untuk intervensi yang dapat memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Adapun hasil analisis kuadran data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah individu yang bekerja di sektor pertanian pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.2.



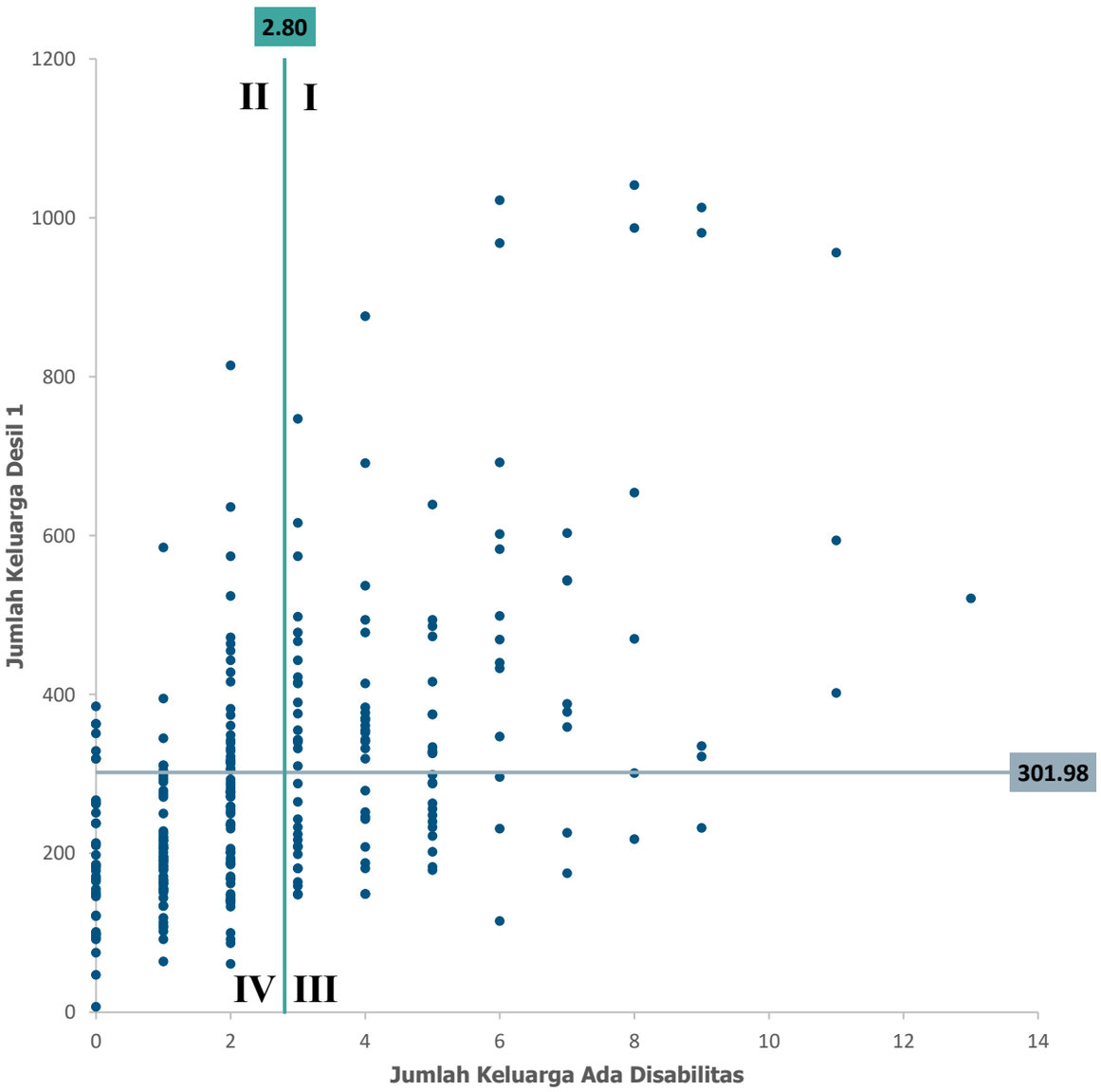
Gambar 5.2 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selanjutnya masih terkait bidang ketenagakerjaan, dilakukan analisis kuadran untuk mengidentifikasi desa/kelurahan prioritas berdasarkan hubungan antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga yang memiliki anggota disabilitas pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua indikator ini bersumber dari data DTSEN. Melalui perbandingan kedua data tersebut, desa/kelurahan kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kuadran. Kuadran I menggambarkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang tinggi sekaligus jumlah keluarga dengan disabilitas yang juga berada di atas rata-rata. Kuadran II menunjukkan desa/kelurahan dengan jumlah keluarga miskin yang tinggi namun jumlah keluarga dengan disabilitas relatif rendah. Sebaliknya, Kuadran III mencerminkan desa/kelurahan yang memiliki jumlah keluarga dengan disabilitas cukup tinggi tetapi jumlah keluarga miskin relatif rendah. Adapun Kuadran IV menggambarkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga ada disabilitas yang sama-sama rendah. Dari keempat kuadran tersebut, Kuadran I menjadi fokus utama lokasi prioritas, karena desa/kelurahan dalam kategori ini memiliki tingkat kerentanan ganda, yakni tingginya jumlah keluarga miskin sekaligus besarnya jumlah keluarga dengan anggota disabilitas, sehingga menghadapi risiko kesejahteraan yang lebih kompleks.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 74 desa/kelurahan yang masuk dalam Kuadran I, atau sekitar 26,43% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan ini memiliki nilai di atas rata-rata, baik untuk

jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah keluarga dengan disabilitas (≥ 2,80 keluarga). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi, tetapi juga memiliki konsentrasi keluarga dengan kebutuhan khusus yang memerlukan dukungan pemberdayaan sosial melalui rehabilitasi dan pemulihan fungsi sosial masyarakat. Situasi ini menegaskan perlunya intervensi terpadu yang tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga pada penguatan layanan disabilitas, peningkatan pemberdayaan sosial, serta pemberdayaan keluarga rentan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Adapun hasil visualisasi analisis kuadran data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga yang memiliki anggota disabilitas pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Keluarga Ada Disabilitas di Kabupaten Bandung
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

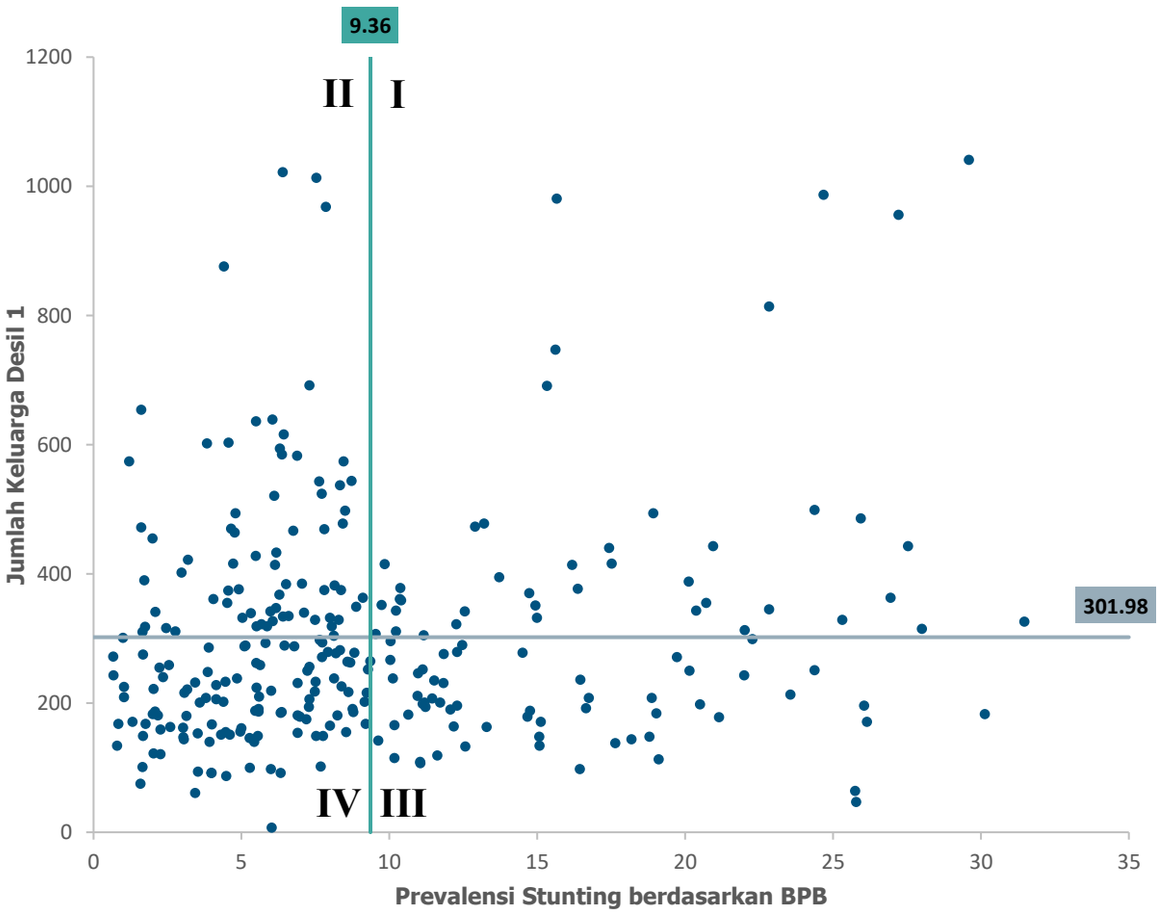
5.3 KUADRAN WILAYAH BIDANG KESEHATAN

Dalam bidang kesehatan, persoalan stunting menjadi persoalan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pada bagian ini penting untuk dilakukan analisis kuadran yang menyandingkan data jumlah

keluarga desil 1 (miskin) dan prevalensi stunting pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Data jumlah keluarga desil 1 tersebut bersumber dari DTSEN sedangkan data prevalensi stunting bersumber dari hasil Bulan Penimbangan Bayi (BPB) Bulan Agustus tahun 2024. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin banyak dengan prevalensi stunting yang relatif rendah. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan prevalensi stunting yang sama-sama relatif rendah. Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi konsentrasi banyaknya keluarga miskin dan tingginya prevalensi stunting.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 42 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 15% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun prevalensi stunting (≥ 9,36%). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menghadapi beban kerentanan ganda, yaitu tingginya tingkat kemiskinan sekaligus tingginya prevalensi stunting pada balita. Situasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti kecukupan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan pengasuhan yang optimal. Tingginya prevalensi stunting pada wilayah dengan kemiskinan tinggi mencerminkan keterbatasan akses rumah tangga miskin terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, sanitasi, dan air bersih—yang pada akhirnya dapat memperparah siklus kemiskinan antar generasi.

Oleh karena itu, desa/kelurahan yang berada pada Kuadran I perlu menjadi lokasi prioritas utama dalam intervensi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Intervensi yang dibutuhkan tidak hanya menyasar peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin, tetapi juga penguatan layanan kesehatan dasar, intervensi gizi, perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kualitas lingkungan pengasuhan. Penanganan terpadu di wilayah Kuadran I diharapkan dapat mendorong perbaikan signifikan dalam penurunan kemiskinan sekaligus menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan prevalensi stunting pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Prevalensi Stunting berdasarkan BPB di Kabupaten Bandung

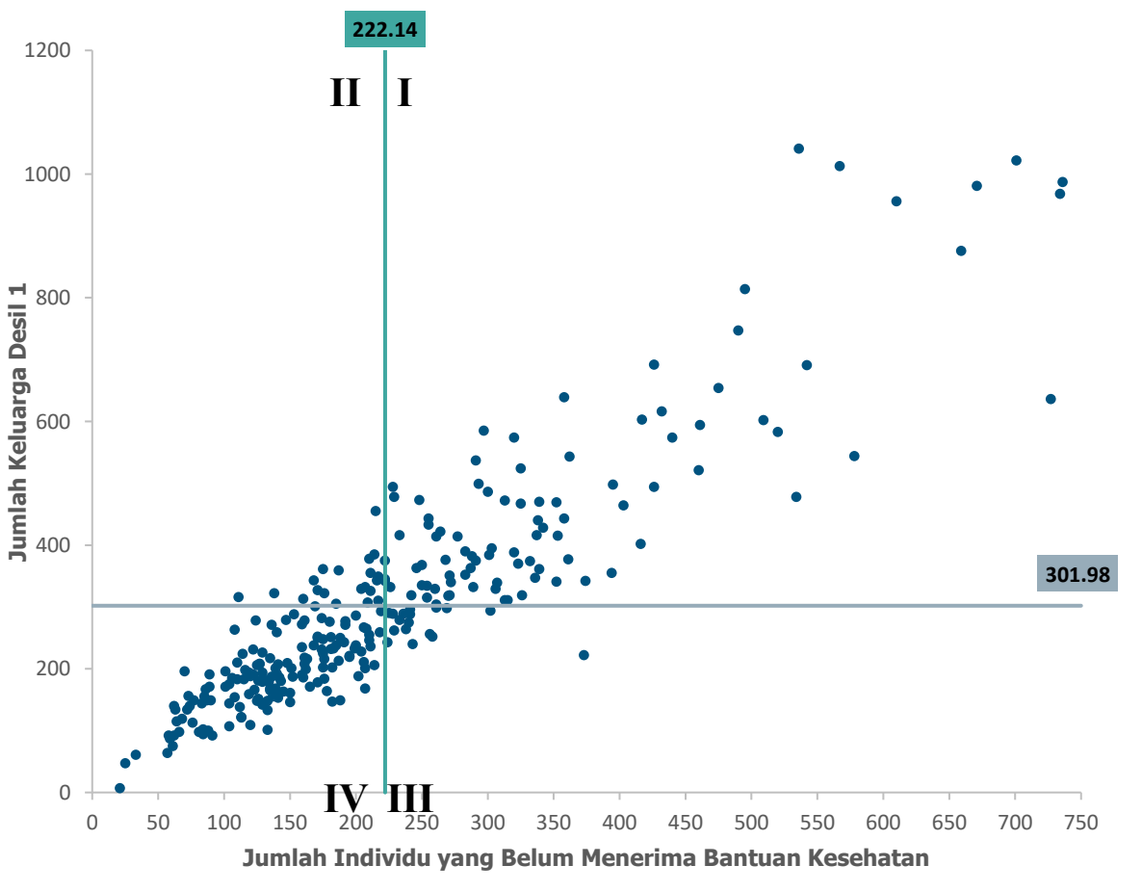
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selain itu, terkait bidang kesehatan juga dilakukan analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan terbanyak. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang banyak dengan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan yang relatif sedikit. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan yang banyak, namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan yang sama-sama relatif rendah. Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi konsentrasi banyaknya keluarga miskin dan banyaknya masyarakat yang belum menerima bantuan kesehatan.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 89 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 31,8% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung.

Desa/kelurahan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan (≥ 222,14 orang). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya menghadapi konsentrasi kemiskinan yang tinggi, tetapi juga memiliki jumlah penduduk rentan yang cukup besar yang belum mendapatkan akses terhadap bantuan kesehatan. Situasi ini mengindikasikan adanya *gap* signifikan dalam jaminan perlindungan sosial di sektor kesehatan, terutama bagi keluarga miskin yang memiliki kebutuhan layanan kesehatan dasar lebih tinggi. Ketidakterjangkauan bantuan kesehatan dapat memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat, meningkatkan risiko kesehatan, serta menurunkan kapasitas produktif penduduk miskin. Oleh karena itu, wilayah-wilayah pada Kuadran I menjadi kelompok prioritas untuk intervensi kebijakan, tidak hanya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, tetapi juga dalam memastikan perluasan cakupan layanan kesehatan, bantuan kesehatan bersubsidi, serta penguatan sistem rujukan kesehatan bagi kelompok rentan.

Intervensi yang tepat sasaran diharapkan mampu mengurangi tingkat kerentanan kesehatan masyarakat miskin sekaligus meningkatkan ketahanan sosial-ekonomi mereka secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah individu yang belum menerima bantuan kesehatan pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan di Kabupaten Bandung

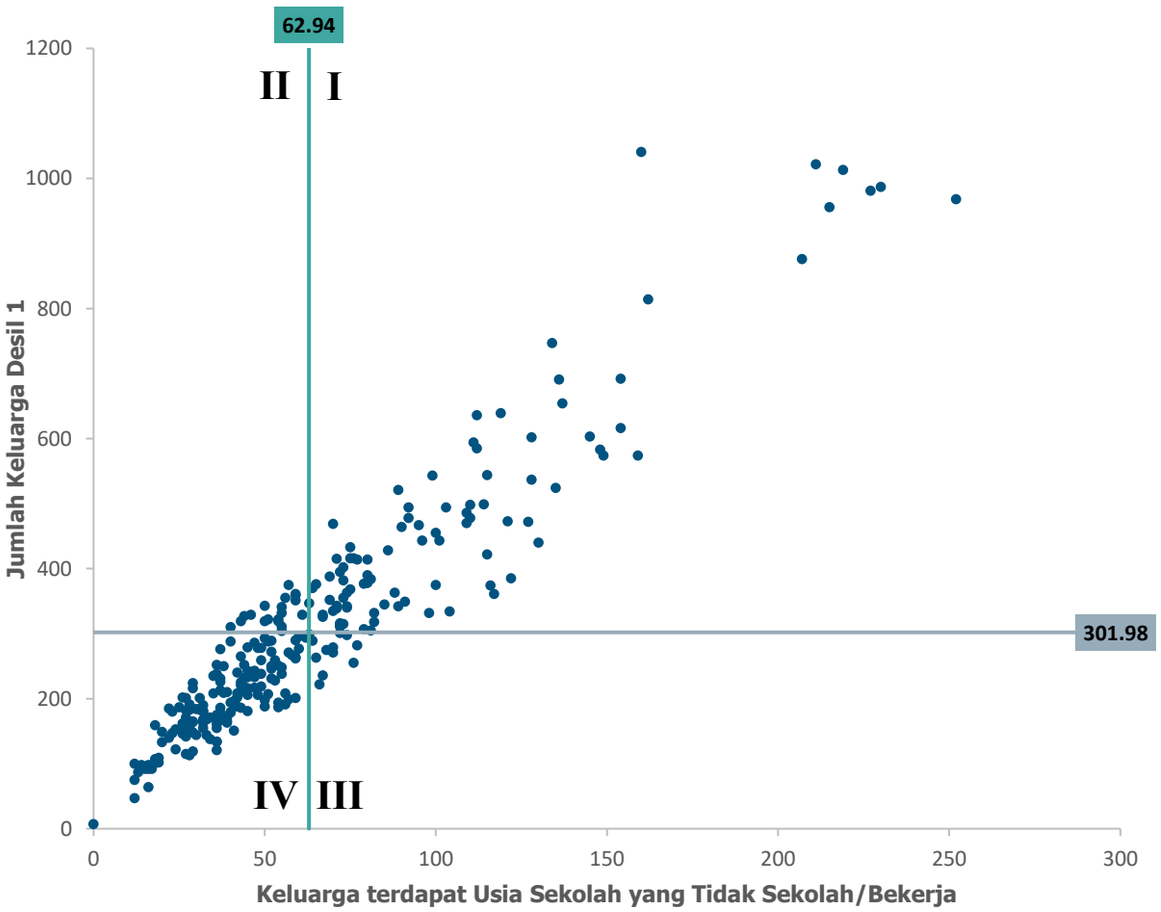
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

5.4 KUADRAN WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

Dalam bidang pendidikan, persoalan akses layanan pendidikan dan partisipasi sekolah menjadi persoalan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pada bagian ini penting untuk dilakukan analisis kuadran yang menyandingkan data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga yang memiliki anggota usia sekolah namun tidak sekolah atau tidak bekerja pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja terbanyak. Kuadran II menunjukkan adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang banyak namun jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja relatif rendah. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan permasalahan jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja yang tinggi namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan permasalahan jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja sama-sama relatif rendah.

Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi kantong konsentrasi banyaknya keluarga miskin sekaligus tingginya jumlah keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja. Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 93 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 33,21% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah keluarga dengan anggota usia sekolah tidak sekolah/bekerja (≥ 62,94 keluarga). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menghadapi beban kerentanan ganda. Tingginya angka anak tidak sekolah/bekerja pada wilayah dengan kemiskinan tinggi mengindikasikan adanya hambatan ekonomi yang serius dalam mengakses pendidikan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga membiayai kebutuhan personal pendidikan (transportasi, seragam, bekal), atau adanya desakan ekonomi yang memaksa anak usia sekolah untuk bekerja membantu pendapatan keluarga (pekerja anak). Situasi ini berisiko menciptakan kemiskinan antar generasi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat putus sekolah.

Oleh karena itu, penanganan terpadu di wilayah Kuadran I diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan keluarga terdapat usia sekolah yang tidak sekolah/bekerja pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.6.



Gambar 5.6 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja di Kabupaten Bandung

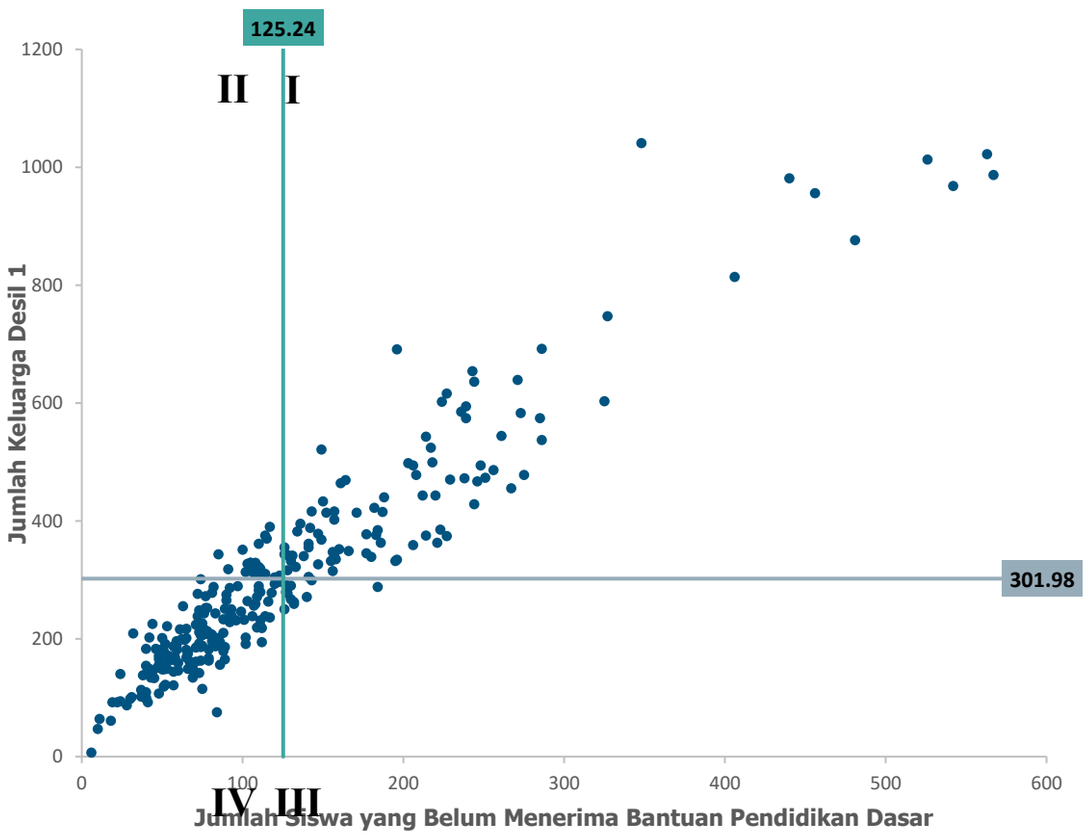
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selain itu, terkait bidang pendidikan juga dilakukan analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua data tersebut diperoleh desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran I, kuadran II, kuadran III, dan kuadran IV. Kuadran I menunjukkan bahwa desa/kelurahan tersebut merupakan wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin terbanyak sekaligus merupakan wilayah dengan jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar terbanyak. Kuadran II menunjukkan bahwa adanya wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang banyak namun jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar relatif sedikit. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar yang banyak, namun memiliki jumlah keluarga miskin yang tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan jumlah keluarga miskin dan jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar yang sama-sama relatif rendah.

Kuadran yang menjadi perhatian utama untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas adalah Kuadran I. Hal ini dikarenakan desa/kelurahan tersebut menjadi konsentrasi banyaknya keluarga miskin dan banyaknya siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar. Berdasarkan analisis kuadran

terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 91 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 32,5% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar (≥ 125,24 siswa). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya menghadapi konsentrasi kemiskinan yang tinggi, tetapi juga memiliki jumlah siswa rentan yang cukup besar yang belum mendapatkan akses terhadap bantuan biaya pendidikan. Situasi ini mengindikasikan adanya *exclusion error* atau gap signifikan dalam penyaluran bantuan operasional maupun bantuan personal pendidikan bagi keluarga miskin. Ketidakterjangkauan bantuan pendidikan dasar dapat memperburuk beban ekonomi orang tua, meningkatkan risiko putus sekolah, serta menghambat wajib belajar pendidikan dasar.

Oleh karena itu, wilayah-wilayah pada Kuadran I menjadi kelompok prioritas untuk intervensi kebijakan, tidak hanya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, tetapi juga dalam memastikan perluasan cakupan penerima bantuan pendidikan. Intervensi yang tepat sasaran diharapkan mampu meringankan biaya pendidikan masyarakat miskin sekaligus menjamin keberlanjutan sekolah anak-anak dari keluarga prasejahtera. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah siswa yang belum menerima bantuan pendidikan dasar pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.7.



Gambar 5.7 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

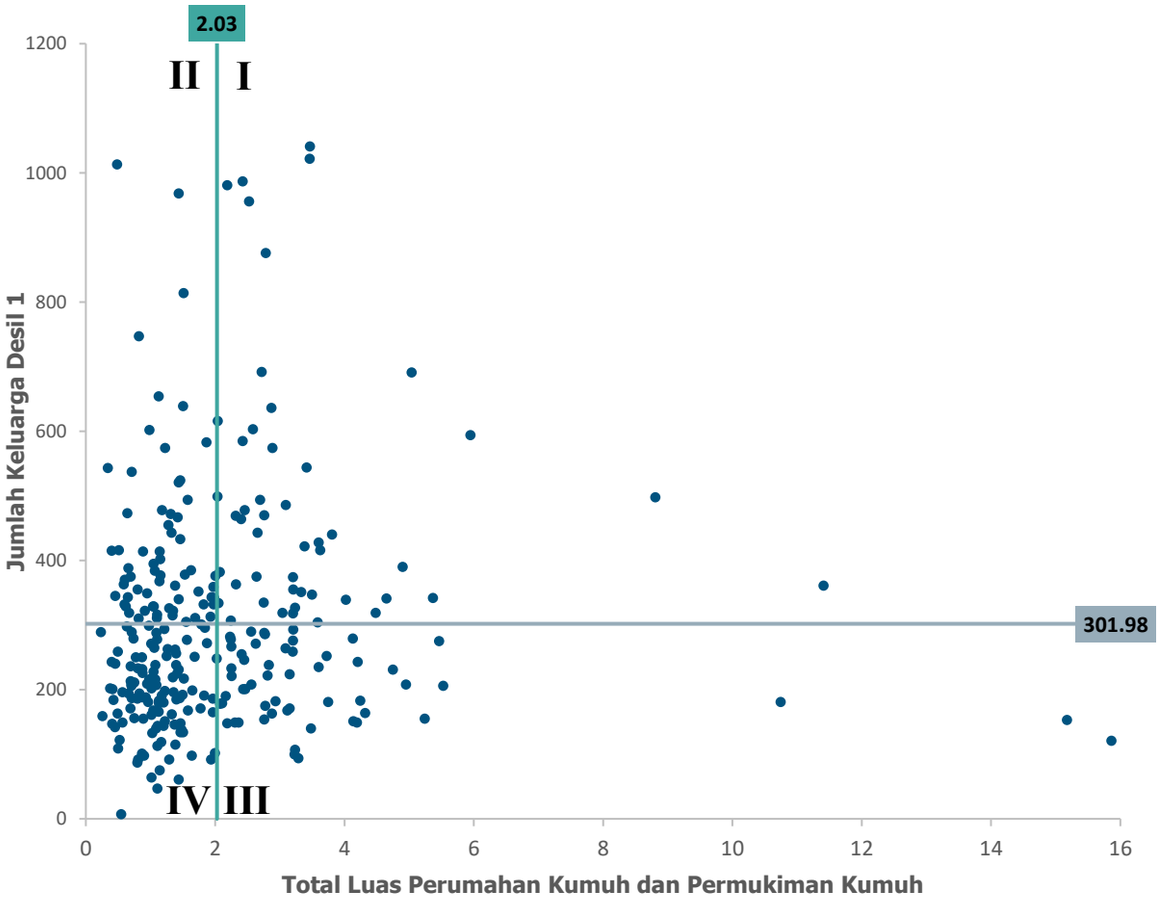
5.5 KUADRAN WILAYAH BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Dalam bidang infrastruktur dasar, persoalan kualitas perumahan dan permukiman kumuh merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis kuadran yang menyandingkan data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan total luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Data jumlah keluarga desil 1 bersumber dari DTSEN, sedangkan data total luas kawasan kumuh bersumber dari Profil Kumuh Kabupaten Bandung dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, diperoleh desa/ kelurahan yang masuk ke dalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV.

Kuadran I menunjukkan desa/kelurahan dengan jumlah keluarga miskin tinggi sekaligus memiliki luas kawasan kumuh yang besar. Kuadran II menggambarkan wilayah yang memiliki jumlah keluarga miskin tinggi namun luas kawasan kumuh relatif kecil. Kuadran III menunjukkan wilayah dengan luas kawasan kumuh yang besar tetapi jumlah keluarga miskinnya tidak signifikan. Sementara itu, Kuadran IV mencerminkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin rendah dan luas kawasan kumuh rendah. Di antara empat kuadran tersebut, Kuadran I merupakan fokus prioritas karena menandakan tumpang tindih persoalan kemiskinan dan infrastruktur dasar permukiman yang belum memadai.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 48 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 17,1% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun luas perumahan dan permukiman kumuh (≥ 2,03 hektar). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menghadapi tekanan ganda berupa tingginya tingkat kemiskinan dan ketidaklayakan infrastruktur dasar permukiman, seperti kepadatan hunian, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, serta kualitas bangunan yang rendah.

Situasi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan intervensi terpadu yang mencakup penataan kawasan kumuh, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu keluar dari kondisi kerentanan struktural. Intervensi pada wilayah Kuadran I diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan total luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.8.



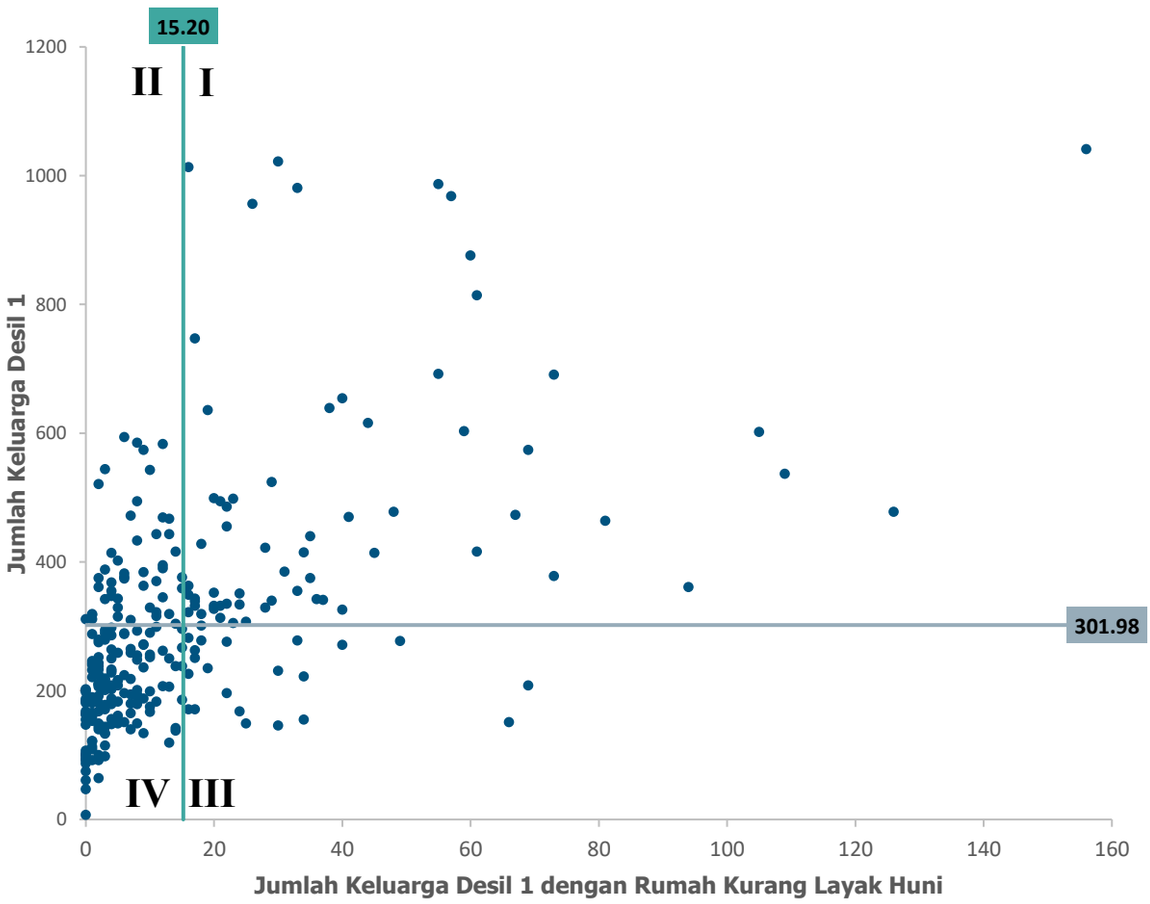
Gambar 5.8 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selain itu, dalam kaitan bidang infrastruktur dasar, kondisi rumah tinggal yang tidak layak huni menjadi salah satu persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat memperbesar kerentanan sosial ekonomi rumah tangga miskin. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis kuadran yang menyandingkan data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dengan jumlah keluarga desil 1 yang menempati rumah kurang layak huni pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Data kedua indikator tersebut bersumber dari hasil pendataan DTSEN. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, diperoleh desa/kelurahan yang dikelompokkan ke dalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV. Kuadran I menggambarkan desa/kelurahan dengan jumlah keluarga miskin tinggi sekaligus memiliki jumlah keluarga miskin yang menempati rumah kurang layak huni yang tinggi. Kuadran II menunjukkan wilayah yang memiliki jumlah keluarga miskin tinggi, tetapi jumlah keluarga miskin yang menempati rumah kurang layak huni relatif kecil. Kuadran III merupakan wilayah dengan jumlah keluarga miskin rendah namun keluarga miskin yang menempati rumah kurang layak huni tinggi. Sementara itu, Kuadran IV menunjukkan wilayah dengan kemiskinan rendah dan jumlah keluarga miskin yang menempati rumah kurang layak huni yang juga rendah. Di antara keempat kuadran tersebut, Kuadran I merupakan fokus prioritas karena mengindikasikan adanya kombinasi antara kemiskinan dan ketidaklayakan hunian yang mendesak untuk ditangani.

Berdasarkan analisis kuadran, diketahui bahwa terdapat 64 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 22,9% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang masuk dalam kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah keluarga desil 1 dengan rumah kurang layak huni (≥ 15,20 keluarga). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut menghadapi kerentanan ganda, yakni tingginya tingkat kemiskinan sekaligus buruknya kualitas hunian yang ditempati oleh keluarga miskin. Situasi tersebut mencerminkan masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap rumah layak huni, seperti kualitas bangunan.

Dengan demikian, desa/kelurahan Kuadran I perlu diprioritaskan dalam program peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan terpadu di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga desil 1 dengan rumah kurang layak huni pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.9.



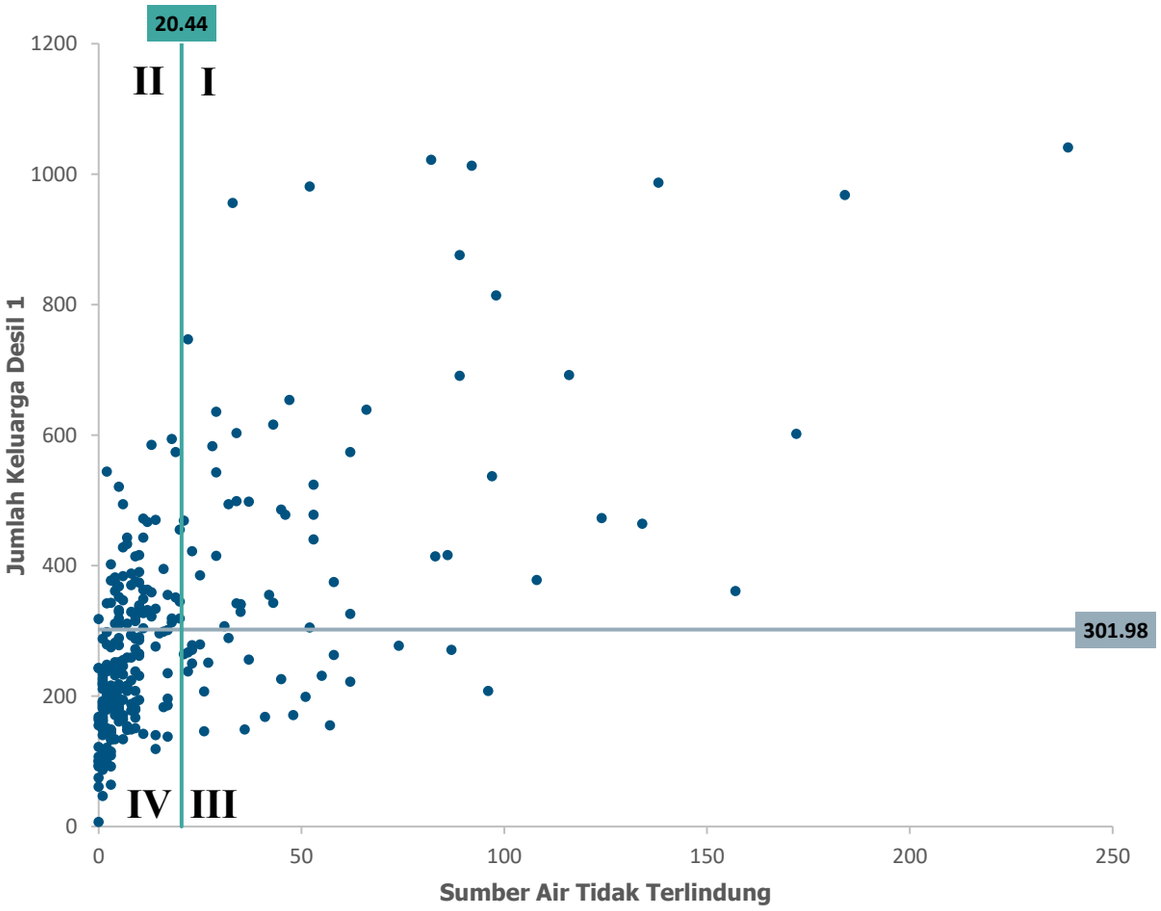
Gambar 5.9 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Keluarga Miskin dengan Rumah Kurang Layak Huni di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selain itu, dalam bidang infrastruktur dasar juga dilakukan analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga desil 1 dengan sumber air tidak terlindung pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, diperoleh pembagian desa/kelurahan ke dalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV. Kuadran I menunjukkan desa/kelurahan yang memiliki konsentrasi keluarga miskin tertinggi sekaligus jumlah keluarga miskin dengan sumber air tidak terlindung terbanyak. Kuadran II menggambarkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang besar tetapi jumlah keluarga miskin dengan sumber air tidak terlindung relatif sedikit. Kuadran III menunjukkan wilayah yang memiliki jumlah keluarga miskin rendah, namun banyak keluarga miskin yang masih menggunakan sumber air tidak terlindung. Adapun Kuadran IV merupakan wilayah dengan kondisi yang relatif lebih baik karena memiliki jumlah keluarga miskin rendah sekaligus jumlah keluarga miskin dengan sumber air tidak terlindung yang rendah. Dari keempat kuadran tersebut, Kuadran I menjadi perhatian utama sebagai lokasi prioritas, karena wilayah-wilayah ini menghadapi dua persoalan mendasar sekaligus, yaitu banyaknya keluarga miskin serta keterbatasan akses terhadap sumber air yang aman dan terlindung.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap dua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 50 desa/kelurahan yang termasuk dalam Kuadran I, atau sekitar 17,9% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan yang berada pada kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga), maupun jumlah keluarga desil 1 dengan sumber air tidak terlindung (≥ 20,44 keluarga). Kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya menghadapi beban kemiskinan yang tinggi, tetapi juga berhadapan dengan persoalan mendasar terkait akses air bersih, yang merupakan komponen utama infrastruktur dasar. Penggunaan sumber air tidak terlindung—seperti sumur gali dangkal, sungai, atau sumber air terbuka lainnya—meningkatkan risiko penyakit berbasis air, mengurangi kualitas kesehatan, serta memperbesar kerentanan ekonomi keluarga miskin akibat meningkatnya pengeluaran kesehatan dan menurunnya produktivitas. Oleh karena itu, desa/kelurahan pada Kuadran I menjadi kelompok prioritas untuk intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses air minum yang aman, penyediaan infrastruktur air bersih, serta edukasi perilaku higienis. Upaya ini tidak hanya mendukung perbaikan kualitas hidup keluarga miskin, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.

Hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga desil 1 dengan sumber air tidak terlindung pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.10.



Gambar 5.10 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Keluarga Miskin dengan Sumber Air Tidak Terlindung di Kabupaten Bandung

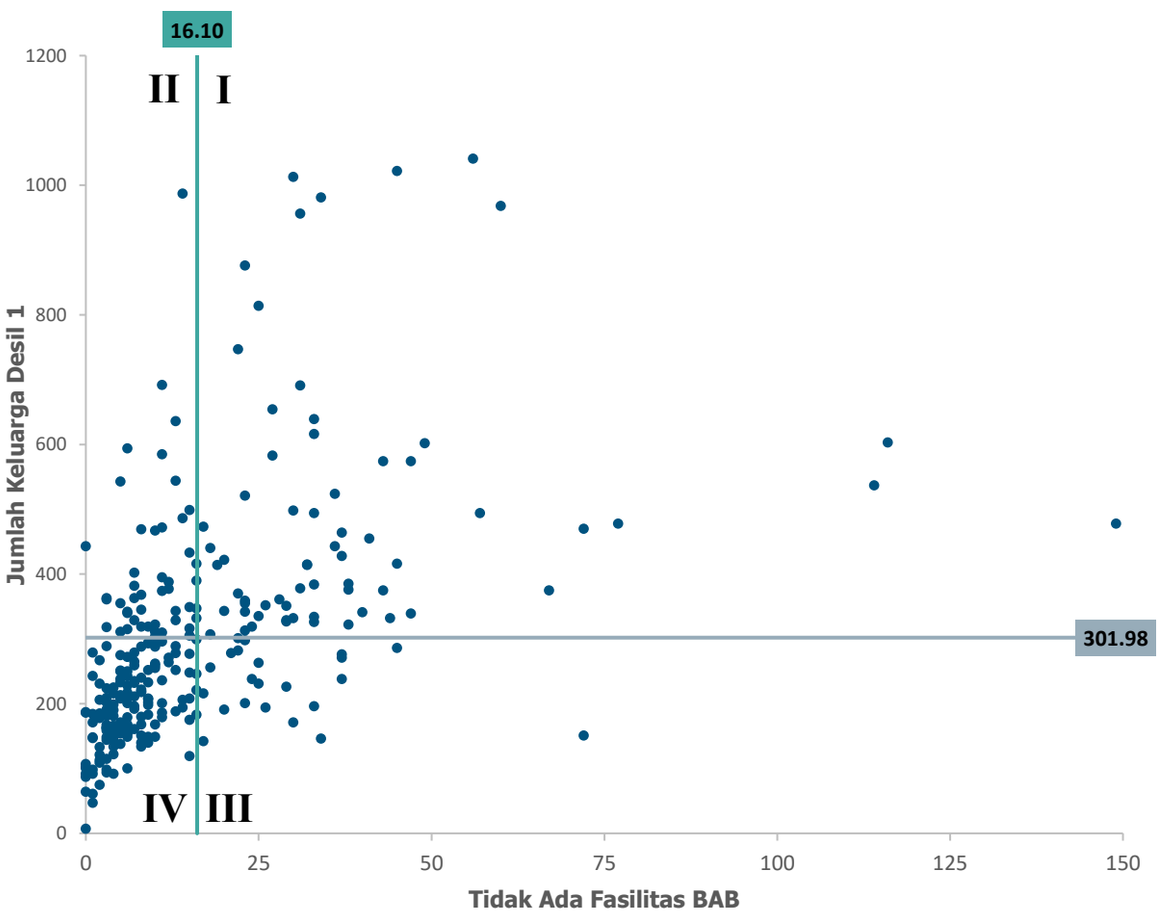
Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

Selain itu, dalam bidang infrastruktur dasar dilakukan pula analisis kuadran terhadap data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga desil 1 yang tidak memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB) pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Kedua data tersebut bersumber dari DTSEN. Dengan membandingkan kedua indikator ini, desa/kelurahan kemudian dikelompokkan ke dalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV. Kuadran I menggambarkan desa/kelurahan yang memiliki jumlah keluarga miskin tertinggi sekaligus jumlah keluarga miskin yang tidak memiliki fasilitas BAB terbanyak. Kuadran II menunjukkan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetapi jumlah keluarga miskin tanpa fasilitas BAB relatif rendah. Kuadran III memperlihatkan wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun memiliki banyak keluarga miskin yang belum memiliki fasilitas BAB. Sedangkan Kuadran IV menggambarkan wilayah dengan kondisi relatif lebih baik karena jumlah keluarga miskin dan jumlah keluarga miskin yang tidak memiliki fasilitas BAB sama-sama rendah. Dari keempat kuadran tersebut, Kuadran I menjadi fokus utama sebagai lokasi prioritas karena wilayah-wilayah di dalamnya menghadapi dua persoalan mendasar sekaligus, yakni tingginya tingkat kemiskinan serta rendahnya akses keluarga miskin terhadap fasilitas sanitasi dasar, khususnya fasilitas BAB yang layak.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap kedua indikator tersebut, diketahui bahwa terdapat 65 desa/kelurahan yang masuk dalam Kuadran I, atau

sekitar 23,21% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Desa/kelurahan tersebut memiliki nilai di atas rata-rata baik untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) maupun jumlah keluarga desil 1 yang tidak memiliki fasilitas BAB (≥ 16,10 keluarga). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya mengalami tingkat kemiskinan tinggi, tetapi juga menghadapi persoalan sanitasi yang cukup serius. Ketiadaan fasilitas BAB yang layak berkontribusi pada meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, kualitas kesehatan yang rendah, serta tingginya pengeluaran rumah tangga untuk menangani masalah kesehatan yang terkait dengan sanitasi buruk. Situasi ini dapat memperburuk kerentanan sosial-ekonomi keluarga miskin dan memperlambat upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, desa/kelurahan pada Kuadran I menjadi prioritas utama untuk intervensi kebijakan terkait penyediaan sanitasi layak, pembangunan fasilitas BAB, peningkatan akses jamban sehat, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi keluarga miskin. Intervensi terpadu di wilayah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memperbaiki kondisi lingkungan, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan secara lebih berkelanjutan.

Hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan jumlah keluarga desil 1 yang tidak memiliki fasilitas BAB pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.11.



Gambar 5.11 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Keluarga Miskin yang Tidak Memiliki Fasilitas BAB di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

5.6 KUADRAN WILAYAH BIDANG KETAHANAN PANGAN

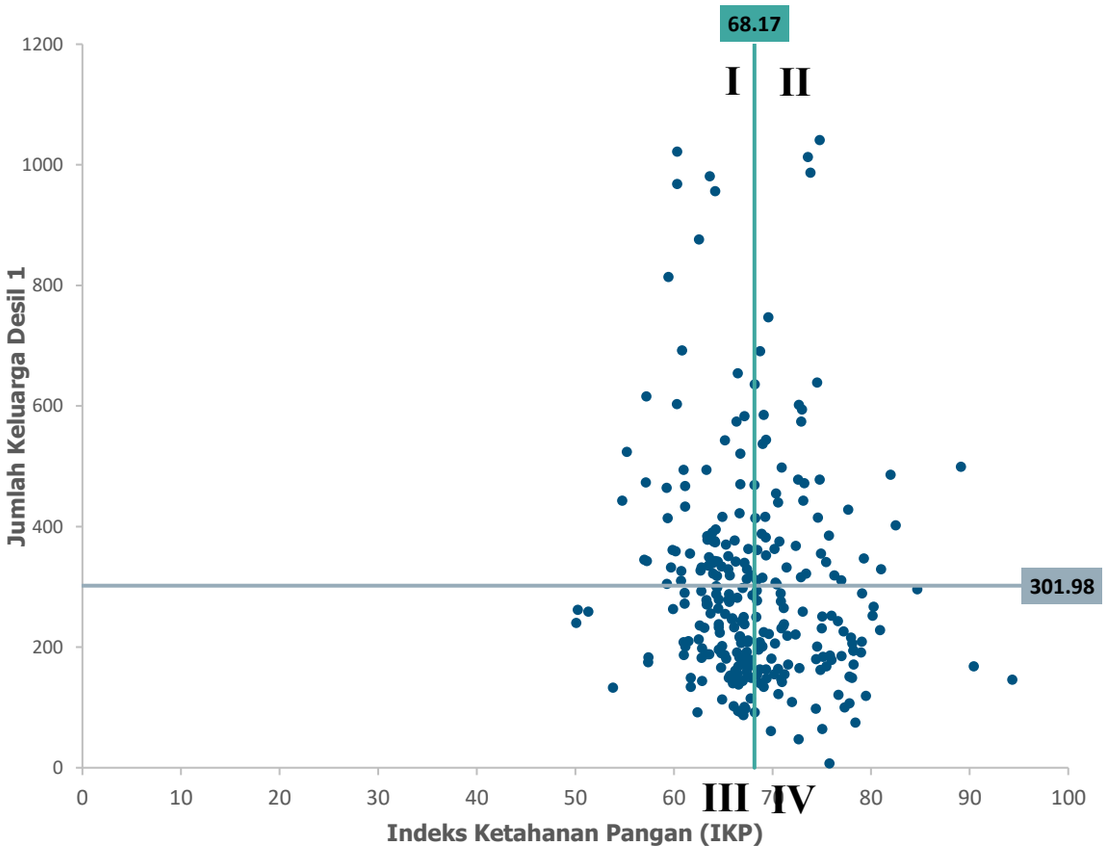
Dalam bidang ketahanan pangan, kondisi kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Oleh karena itu, pada bagian ini dilakukan analisis kuadran yang menyandingkan data jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung. Data jumlah keluarga desil 1 bersumber dari DTSEN, sedangkan data IKP diperoleh dari data Badan Pangan Nasional. Melalui perbandingan kedua indikator tersebut, desa/kelurahan dikelompokkan ke dalam empat kuadran, yaitu Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, dan Kuadran IV. Kuadran I merepresentasikan desa/kelurahan dengan jumlah keluarga miskin tertinggi sekaligus memiliki nilai IKP yang rendah, sehingga wilayah-wilayah ini menghadapi risiko ketahanan pangan yang paling serius. Kuadran II menunjukkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang tinggi, namun memiliki IKP yang relatif tinggi atau sudah lebih baik, sehingga meskipun tingkat kemiskinannya besar, ketahanan pangannya menunjukkan kondisi yang lebih kokoh. Sementara itu, Kuadran III menggambarkan wilayah dengan jumlah keluarga miskin yang relatif rendah namun memiliki IKP yang masih rendah, yang menandakan adanya persoalan ketahanan pangan meskipun tingkat kemiskinan tidak dominan. Adapun Kuadran IV mencerminkan desa/kelurahan dengan jumlah keluarga miskin yang rendah dan IKP yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan kondisi ketahanan pangan yang sudah baik.

Dari keempat kuadran tersebut, Kuadran I menjadi fokus utama sebagai lokasi prioritas karena wilayah-wilayah ini menghadapi dua permasalahan sekaligus, yakni tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat ketahanan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di wilayah ini memiliki risiko besar dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi, serta rentan terhadap guncangan harga, ketersediaan pangan, dan keterbatasan akses ekonomi.

Berdasarkan analisis kuadran terhadap kedua indikator, diketahui bahwa terdapat 64 desa/kelurahan atau sekitar 22,86% dari total 280 desa/kelurahan di Kabupaten Bandung yang termasuk dalam Kuadran I. Desa/kelurahan pada kuadran ini memiliki nilai di atas rata-rata untuk jumlah keluarga desil 1 (≥ 301,98 keluarga) dan nilai IKP yang berada di bawah rata-rata (≤ 68,17). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak hanya mengalami konsentrasi kemiskinan tinggi, tetapi juga menghadapi tantangan ketahanan pangan yang signifikan. Rendahnya nilai IKP dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses terhadap sumber pangan, rendahnya kemampuan daya beli rumah tangga, kurang optimalnya distribusi pangan, serta keterbatasan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, desa/kelurahan yang berada pada Kuadran I perlu menjadi prioritas utama intervensi ketahanan pangan, baik melalui peningkatan akses pangan, program diversifikasi pangan, penguatan produksi pangan lokal, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, maupun peningkatan literasi gizi dan pangan. Intervensi terpadu di wilayah Kuadran

I diharapkan mampu memperbaiki kondisi ketahanan pangan sekaligus mendorong penurunan kemiskinan secara lebih berkelanjutan. Adapun hasil analisis kuadran antara jumlah keluarga desil 1 (miskin) dan Indeks Ketahanan Pangan pada masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Gambar 5.12.



Gambar 5.12 Analisis Kuadran berdasarkan Jumlah Keluarga Miskin dan Jumlah Keluarga Miskin yang Tidak Memiliki Fasilitas BAB di Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil analisis BAPPERIDA, 2025

5.7 PENENTUAN WILAYAH KANTONG KEMISKINAN

Pada bagian ini disajikan ringkasan hasil analisis kuadran terhadap lima bidang determinan kemiskinan yang menjadi dasar identifikasi wilayah prioritas, yaitu Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, dan Ketahanan Pangan. Analisis kuadran digunakan untuk mengidentifikasi desa/kelurahan yang menghadapi tingkat kerentanan tertinggi berdasarkan kombinasi indikator kemiskinan (jumlah keluarga desil 1) dengan indikator spesifik pada masing-masing bidang. Melalui pendekatan ini, terlihat dengan jelas sebaran wilayah yang masuk dalam Kuadran I—yakni wilayah dengan konsentrasi jumlah keluarga miskin yang tinggi sekaligus memiliki capaian indikator bidang yang paling tertinggal—sehingga membutuhkan penanganan prioritas. Tabel ringkasan berikut memuat daftar kecamatan dan desa/kelurahan beserta hasil pengelompokan masing-masing wilayah berdasarkan indikator pada lima bidang sebelumnya, serta dilengkapi dengan peringkat (*ranking*) prioritas. Informasi ini menjadi dasar dalam menetapkan lokasi prioritas intervensi dalam RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 secara lebih terarah, terpadu, dan berbasis bukti.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Kuadran Indikator Kemiskinan per Desa/Kelurahan di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
1	ARJASARI	Arjasari	I	II	I	I	II	I	I	II	I	I	II	II	7	5	0	0	54
2	ARJASARI	Lebakwangi	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
3	ARJASARI	Batukarut	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
4	ARJASARI	Ancolmekar	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	III	IV	IV	0	0	3	9	149
5	ARJASARI	Baros	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	10	2	0	0	15
6	ARJASARI	Mangunjaya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
7	ARJASARI	Mekarjaya	II	I	I	I	I	I	I	II	I	II	I	II	8	4	0	0	43
8	ARJASARI	Pinggirsari	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	11	1	0	0	4
9	ARJASARI	Patrolsari	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	10	2	0	0	15
10	ARJASARI	Rancakole	I	II	II	I	II	II	I	II	I	II	I	I	6	6	0	0	74
11	ARJASARI	Wargaluyu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	III	IV	0	0	4	8	130
12	BALEENDAH	Baleendah	I	II	II	I	I	I	II	I	I	I	II	II	7	5	0	0	54
13	BALEENDAH	Andir	II	II	II	II	II	I	II	I	II	II	II	I	3	9	0	0	104
14	BALEENDAH	Manggahang	I	II	I	I	I	I	II	I	II	II	II	II	6	6	0	0	74
15	BALEENDAH	Jelekong	I	II	II	I	I	I	II	I	II	II	II	II	5	7	0	0	88
16	BALEENDAH	Wargamekar	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	II	9	3	0	0	29
17	BALEENDAH	Bojongmalaka	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
18	BALEENDAH	Rancamanyar	II	II	II	II	II	I	I	I	II	II	II	II	3	9	0	0	104
19	BALEENDAH	Malakasari	III	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	III	0	0	6	6	115
20	BANJARAN	Kamasan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
21	BANJARAN	Banjaran Wetan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	11	1	0	0	4
22	BANJARAN	Banjaran	IV	IV	III	IV	IV	III	III	III	IV	IV	IV	IV	0	0	4	8	130
23	BANJARAN	Ciapus	I	II	II	II	II	I	I	I	I	II	I	I	7	5	0	0	54
24	BANJARAN	Sindangpanon	II	II	II	II	II	I	II	I	II	II	II	II	2	10	0	0	107
25	BANJARAN	Kiangroke	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
26	BANJARAN	Tarajusari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
27	BANJARAN	Mekarjaya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	11	1	0	0	4
28	BANJARAN	Margahurip	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
29	BANJARAN	Neglasari	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
30	BANJARAN	Pasirmulya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	IV	IV	0	0	3	9	149
31	BOJONGSOANG	Lengkong	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
32	BOJONGSOANG	Bojongsoang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
33	BOJONGSOANG	Buahbatu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
34	BOJONGSOANG	Cipagalo	III	IV	III	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	4	8	130
35	BOJONGSOANG	Bojongsari	I	II	II	I	II	I	II	I	II	II	II	I	5	7	0	0	88
36	BOJONGSOANG	Tegalluar	I	II	II	I	II	I	II	II	II	II	II	II	3	9	0	0	104
37	CANGKUANG	Cangkuang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
38	CANGKUANG	Ciluncat	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	0	0	2	10	187
39	CANGKUANG	Nagrak	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
40	CANGKUANG	Bandasari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	III	0	0	3	9	149
41	CANGKUANG	Pananjung	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
42	CANGKUANG	Jatisari	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
43	CANGKUANG	Tanjungsari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
44	CICALENGKA	Cicalengka Kulon	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
45	CICALENGKA	Cicalengka Wetan	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
46	CICALENGKA	Babakanpeuteuy	I	II	II	I	I	I	I	II	II	II	II	II	5	7	0	0	88
47	CICALENGKA	Cikuya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
48	CICALENGKA	Dampit	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	III	0	0	3	9	149
49	CICALENGKA	Margaasih	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
50	CICALENGKA	Narawita	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
51	CICALENGKA	Panenjoan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
52	CICALENGKA	Tanjungwangi	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
53	CICALENGKA	Tenjolaya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
54	CICALENGKA	Waluya	III	IV	IV	IV	III	III	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	6	6	115
55	CICALENGKA	Nagrog	III	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	0	0	4	8	130
56	CIKANCUNG	Mandalasari	I	II	II	I	I	II	II	II	I	II	II	I	5	7	0	0	88
57	CIKANCUNG	Cikancung	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	III	IV	III	0	0	4	8	130
58	CIKANCUNG	Cikasungka	I	II	I	II	I	I	I	II	I	II	II	I	7	5	0	0	54
59	CIKANCUNG	Cihanyir	I	II	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	9	3	0	0	29
60	CIKANCUNG	Ciluluk	I	II	I	I	I	I	II	II	I	I	II	I	8	4	0	0	43
61	CIKANCUNG	Hegarmanah	I	II	I	I	I	I	II	II	II	II	II	I	6	6	0	0	74
62	CIKANCUNG	Mekarlaksana	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	11	1	0	0	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
63	CIKANCUNG	Tanjunglaya	I	II	I	I	II	I	I	II	II	II	I	I	7	5	0	0	54
64	CIKANCUNG	Srirahayu	I	I	II	I	I	I	II	I	I	I	I	I	10	2	0	0	15
65	CILENGKRANG	Jatiendah	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
66	CILENGKRANG	Cilengkrang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
67	CILENGKRANG	Cipanjalu	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
68	CILENGKRANG	Melatiwangi	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
69	CILENGKRANG	Ciporeat	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
70	CILENGKRANG	Girimekar	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	0	0	3	9	149
71	CILEUNYI	Cileunyi Kulon	II	II	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	4	8	0	0	101
72	CILEUNYI	Cileunyi Wetan	II	II	I	I	I	I	II	I	II	I	II	I	7	5	0	0	54
73	CILEUNYI	Cimekar	II	II	II	II	II	I	I	II	II	II	II	II	2	10	0	0	107
74	CILEUNYI	Cinunuk	II	II	I	I	I	I	II	I	II	II	II	II	5	7	0	0	88
75	CILEUNYI	Cibiru Hilir	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
76	CILEUNYI	Cibiru Wetan	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
77	CIMAUNG	Cimaung	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
78	CIMAUNG	Jagabaya	I	II	II	I	I	I	II	II	II	II	II	I	5	7	0	0	88
79	CIMAUNG	Pasirhuni	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
80	CIMAUNG	Campakamulya	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
81	CIMAUNG	Cipinang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	III	III	0	0	4	8	130
82	CIMAUNG	Mekarsari	I	I	I	I	I	II	I	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
83	CIMAUNG	Sukamaju	II	I	II	I	II	II	I	I	I	I	I	II	7	5	0	0	54

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
84	CIMAUNG	Cikalong	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
85	CIMAUNG	Malasari	I	I	II	II	II	II	I	II	II	II	II	I	4	8	0	0	101
86	CIMAUNG	Warjabakti	IV	III	III	IV	IV	IV	III	IV	III	III	III	IV	0	0	6	6	115
87	CIMENYAN	Padasuka	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	0	0	3	9	149
88	CIMENYAN	Cibeunying	II	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	6	6	0	0	74
89	CIMENYAN	Cimenyan	II	II	I	II	II	I	II	II	II	II	II	II	2	10	0	0	107
90	CIMENYAN	Mandalamekar	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
91	CIMENYAN	Cikadut	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
92	CIMENYAN	Ciburial	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
93	CIMENYAN	Sindanglaya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
94	CIMENYAN	Mekarsaluyu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
95	CIMENYAN	Mekarmanik	IV	III	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	0	0	4	8	130
96	CIPARAY	Ciparay	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
97	CIPARAY	Gunungleutik	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
98	CIPARAY	Mekarsari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
99	CIPARAY	Cikoneng	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
100	CIPARAY	Ciheulang	I	II	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II	5	7	0	0	88
101	CIPARAY	Pakutandang	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	I	II	7	5	0	0	54
102	CIPARAY	Sumbersari	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	8	4	0	0	43
103	CIPARAY	Manggungharja	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	6	6	0	0	74
104	CIPARAY	Sagaracipta	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	IV	III	III	0	0	6	6	115

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
105	CIPARAY	Sarimahi	III	IV	III	III	III	III	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	7	5	113
106	CIPARAY	Serangmekar	I	II	I	I	I	II	I	II	II	II	I	I	7	5	0	0	54
107	CIPARAY	Babakan	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	III	III	III	III	0	0	6	6	115
108	CIPARAY	Bumiwangi	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	7	5	0	0	54
109	CIPARAY	Mekarlaksana	I	II	II	I	I	II	I	II	II	II	II	I	5	7	0	0	88
110	CIWIDEY	Lebakmuncang	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	11	1	0	0	4
111	CIWIDEY	Ciwidey	II	II	II	I	I	I	I	II	II	II	II	I	5	7	0	0	88
112	CIWIDEY	Nengkelan	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
113	CIWIDEY	Panundaan	IV	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	4	8	130
114	CIWIDEY	Panyocokan	I	II	I	I	II	I	II	I	II	II	II	I	6	6	0	0	74
115	CIWIDEY	Rawabogo	IV	III	III	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	III	0	0	6	6	115
116	CIWIDEY	Sukawening	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	11	1	0	0	4
117	DAYEUHKOLOT	Pasawahan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
118	DAYEUHKOLOT	Dayeuhkolot	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
119	DAYEUHKOLOT	Cangkuang Wetan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
120	DAYEUHKOLOT	Cangkuang Kulon	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
121	DAYEUHKOLOT	Sukapura	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
122	DAYEUHKOLOT	Citeureup	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
123	IBUN	Ibun	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	0	0	4	8	130
124	IBUN	Laksana	II	I	I	II	I	II	II	II	I	II	I	II	5	7	0	0	88
125	IBUN	Dukuh	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III	0	0	6	6	115

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
126	IBUN	Talun	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
127	IBUN	Pangguh	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	9	3	0	0	29
128	IBUN	Lampegan	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	2	10	0	0	107
129	IBUN	Neglasari	I	I	II	I	I	II	I	II	I	I	II	I	8	4	0	0	43
130	IBUN	Mekarwangi	II	I	I	II	II	II	I	II	I	I	II	I	6	6	0	0	74
131	IBUN	Sudi	I	II	I	II	I	II	I	II	II	II	I	I	6	6	0	0	74
132	IBUN	Tanggulun	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
133	IBUN	Cibeet	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	III	III	0	0	4	8	130
134	IBUN	Karyalaksana	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	0	0	3	9	149
135	KATAPANG	Sangkanhurip	II	II	II	II	II	I	II	II	II	II	II	I	2	10	0	0	107
136	KATAPANG	Katapang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
137	KATAPANG	Gandasari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
138	KATAPANG	Sukamukti	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
139	KATAPANG	Cilampeni	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
140	KATAPANG	Pangauban	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
141	KATAPANG	Banyusari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
142	KERTASARI	Sukapura	I	I	II	I	I	II	II	II	I	II	I	II	6	6	0	0	74
143	KERTASARI	Cibeureum	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	9	3	0	0	29
144	KERTASARI	Santosa	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
145	KERTASARI	Tarumajaya	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	11	1	0	0	4
146	KERTASARI	Neglawangi	III	III	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	5	7	124

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
147	KERTASARI	Cihawuk	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	II	7	5	0	0	54
148	KERTASARI	Cikembang	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	II	5	7	0	0	88
149	KERTASARI	Resmi Tingal	I	I	II	I	I	II	II	II	II	II	II	II	4	8	0	0	101
150	KUTAWARINGIN	Jelegong	I	I	II	I	I	I	II	I	II	II	II	I	7	5	0	0	54
151	KUTAWARINGIN	Jatisari	IV	III	III	III	IV	III	IV	III	III	III	IV	IV	0	0	7	5	113
152	KUTAWARINGIN	Pameuntasan	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
153	KUTAWARINGIN	Kopo	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
154	KUTAWARINGIN	Cibodas	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	III	III	0	0	5	7	124
155	KUTAWARINGIN	Sukamulya	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	I	9	3	0	0	29
156	KUTAWARINGIN	Padasuka	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
157	KUTAWARINGIN	Buninagara	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
158	KUTAWARINGIN	Gajahmekar	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	4	8	130
159	KUTAWARINGIN	Cilame	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	IV	0	0	4	8	130
160	KUTAWARINGIN	Kutawaringin	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
161	MAJALAYA	Majalaya	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	4	8	130
162	MAJALAYA	Wangisagara	I	II	I	I	I	II	II	II	I	II	I	I	7	5	0	0	54
163	MAJALAYA	Biru	I	II	I	I	I	I	II	II	II	II	II	I	6	6	0	0	74
164	MAJALAYA	Padamulya	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	0	0	4	8	130
165	MAJALAYA	Bojong	I	II	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	7	5	0	0	54
166	MAJALAYA	Majasetra	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
167	MAJALAYA	Majakerta	III	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	III	0	0	5	7	124

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
168	MAJALAYA	Sukamaju	I	II	I	II	II	I	II	I	II	II	I	I	6	6	0	0	74
169	MAJALAYA	Padaulun	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	8	4	0	0	43
170	MAJALAYA	Neglasari	I	I	II	I	I	I	II	I	I	II	I	I	9	3	0	0	29
171	MAJALAYA	Sukamukti	II	II	II	II	II	I	II	I	I	II	I	I	5	7	0	0	88
172	MARGAASIH	Margaasih	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
173	MARGAASIH	Lagadar	I	II	II	I	I	I	II	I	II	II	II	I	6	6	0	0	74
174	MARGAASIH	Nanjung	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	4	8	130
175	MARGAASIH	Mekar Rahayu	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	4	8	130
176	MARGAASIH	Rahayu	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
177	MARGAASIH	Cigondewah Hilir	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
178	MARGAHAYU	Sulaeman	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
179	MARGAHAYU	Margahayu Tengah	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
180	MARGAHAYU	Margahayu Selatan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
181	MARGAHAYU	Sukamenak	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
182	MARGAHAYU	Sayati	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV	0	0	3	9	149
183	NAGREG	Nagreg	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	IV	III	IV	III	0	0	6	6	115
184	NAGREG	Bojong	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
185	NAGREG	Ciaro	I	I	II	I	I	I	II	II	I	II	I	II	7	5	0	0	54
186	NAGREG	Ciherang	I	I	II	I	I	I	II	II	II	II	II	I	6	6	0	0	74
187	NAGREG	Citaman	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
188	NAGREG	Mandalawangi	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
189	NAGREG	Nagreg Kendan	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
190	NAGREG	Ganjar Sabar	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
191	PACET	Cipeujeuh	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	0	0	1	11	218
192	PACET	Cikitu	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	9	3	0	0	29
193	PACET	Cinanggela	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	II	8	4	0	0	43
194	PACET	Maruyung	I	II	I	I	I	I	II	II	II	I	I	I	8	4	0	0	43
195	PACET	Sukarame	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	I	I	9	3	0	0	29
196	PACET	Nagrak	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	11	1	0	0	4
197	PACET	Cikawao	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	0	0	0	1
198	PACET	Mekarjaya	I	I	II	I	I	II	II	II	I	I	I	II	7	5	0	0	54
199	PACET	Pangauban	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
200	PACET	Mandalahaji	I	I	II	I	I	I	I	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
201	PACET	Girimulya	I	I	II	I	I	I	II	II	I	I	I	I	9	3	0	0	29
202	PACET	Tanjungwangi	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
203	PACET	Mekarsari	I	II	I	I	I	I	II	I	I	II	I	I	9	3	0	0	29
204	PAMEUNGPEUK	Sukasari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
205	PAMEUNGPEUK	Bojongmanggu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
206	PAMEUNGPEUK	Rancatungku	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
207	PAMEUNGPEUK	Bojongkunci	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
208	PAMEUNGPEUK	Rancamulya	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
209	PAMEUNGPEUK	Langonsari	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
210	PANGALENGAN	Pangalengan	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	10	2	0	0	15
211	PANGALENGAN	Margaluyu	I	I	I	I	I	I	II	II	II	I	II	I	8	4	0	0	43
212	PANGALENGAN	Warnasari	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	9	3	0	0	29
213	PANGALENGAN	Sukamanah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	0	0	0	1
214	PANGALENGAN	Lamajang	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	11	1	0	0	4
215	PANGALENGAN	Margamukti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	10	2	0	0	15
216	PANGALENGAN	Margamulya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	0	0	0	1
217	PANGALENGAN	Banjarsari	I	I	II	I	I	I	I	I	I	II	II	II	8	4	0	0	43
218	PANGALENGAN	Sukaluyu	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	II	I	10	2	0	0	15
219	PANGALENGAN	Tribaktimulya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	10	2	0	0	15
220	PANGALENGAN	Pulosari	I	I	II	I	I	I	II	I	II	II	II	II	6	6	0	0	74
221	PANGALENGAN	Wanasuka	I	I	II	I	I	I	I	I	II	II	II	II	7	5	0	0	54
222	PANGALENGAN	Margamekar	I	I	I	I	I	I	II	I	II	II	II	II	7	5	0	0	54
223	PASEH	Cigentur	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	III	IV	III	0	0	5	7	124
224	PASEH	Cipedes	I	II	I	I	I	I	II	I	I	II	I	I	9	3	0	0	29
225	PASEH	Loa	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	I	I	8	4	0	0	43
226	PASEH	Cijagra	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	III	IV	0	0	3	9	149
227	PASEH	Cipaku	I	II	II	I	I	I	II	I	I	II	I	II	7	5	0	0	54
228	PASEH	Sindangsari	I	II	I	I	I	I	II	I	I	II	I	I	9	3	0	0	29
229	PASEH	Drawati	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	11	1	0	0	4
230	PASEH	Sukamanah	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
231	PASEH	Sukamantri	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
232	PASEH	Karangtunggal	II	II	I	II	II	II	II	I	I	II	I	I	5	7	0	0	88
233	PASEH	Mekarpawitan	III	IV	III	IV	III	III	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	6	6	115
234	PASEH	Tangsimekar	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
235	PASIRJAMBU	Pasirjambu	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
236	PASIRJAMBU	Cibodas	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	0	0	4	8	130
237	PASIRJAMBU	Cikoneng	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	0	0	2	10	187
238	PASIRJAMBU	Cukanggenteng	IV	III	IV	IV	III	IV	III	III	IV	III	IV	IV	0	0	5	7	124
239	PASIRJAMBU	Cisondari	II	I	I	II	I	II	II	I	I	I	I	II	7	5	0	0	54
240	PASIRJAMBU	Margamulya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	III	IV	IV	0	0	3	9	149
241	PASIRJAMBU	Mekarsari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
242	PASIRJAMBU	Mekarmaju	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
243	PASIRJAMBU	Sugihmukti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	11	1	0	0	4
244	PASIRJAMBU	Tenjolaya	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	II	9	3	0	0	29
245	RANCABALI	Patengan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	IV	0	0	3	9	149
246	RANCABALI	Sukaresmi	II	I	I	II	I	I	II	I	I	I	I	II	8	4	0	0	43
247	RANCABALI	Indragiri	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	III	IV	0	0	3	9	149
248	RANCABALI	Cipelah	I	I	II	I	I	I	II	I	I	I	I	I	10	2	0	0	15
249	RANCABALI	Alamendah	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	10	2	0	0	15
250	RANCAEKEK	Rancaekek Kencana	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
251	RANCAEKEK	Rancaekek Wetan	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
252	RANCAEKEK	Rancaekek Kulon	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
253	RANCAEKEK	Bojongsalam	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
254	RANCAEKEK	Bojongloa	II	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II	I	2	10	0	0	107
255	RANCAEKEK	Jelegong	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
256	RANCAEKEK	Linggar	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
257	RANCAEKEK	Cangkuang	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
258	RANCAEKEK	Haurpugur	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	0	0	2	10	187
259	RANCAEKEK	Sukamanah	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
260	RANCAEKEK	Sukamulya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	0	0	2	10	187
261	RANCAEKEK	Tegalsumedang	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
262	RANCAEKEK	Sangiang	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
263	RANCAEKEK	Nanjungmekar	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
264	SOLOKAN JERUK	Rancakasumba	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
265	SOLOKAN JERUK	Solokanjeruk	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	1	11	218
266	SOLOKAN JERUK	Cibodas	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	III	0	0	4	8	130
267	SOLOKAN JERUK	Panyadap	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
268	SOLOKAN JERUK	Bojongemas	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
269	SOLOKAN JERUK	Padamukti	III	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
270	SOLOKAN JERUK	Langensari	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	III	IV	0	0	2	10	187
271	SOREANG	Soreang	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
272	SOREANG	Sadu	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ketenagakerjaan			Pendidikan		Kesehatan		Infrastruktur Dasar				Pangan	JUMLAH				PEMERINGKATAN
			Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah	Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian	Jumlah Keluarga Ada Disabilitas	Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja	Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar	Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan	Prevalensi Stunting berdasarkan BPB	Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni	Sumber Air Tidak Terlindung	Tidak Ada Fasilitas BAB	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	KUADRAN I	KUADRAN II	KUADRAN III	KUADRAN IV	
273	SOREANG	Panyirapan	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	III	0	0	4	8	130
274	SOREANG	Sukajadi	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
275	SOREANG	Pamekaran	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	0	0	3	9	149
276	SOREANG	Karamatmulya	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	0	0	2	10	187
277	SOREANG	Sukanagara	IV	IV	III	IV	IV	IV	III	IV	III	III	IV	III	0	0	5	7	124
278	SOREANG	Cingcin	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
279	SOREANG	Parungserab	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	0	0	0	12	259
280	SOREANG	Sekarwangi	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	0	0	1	11	218
TOTAL		KUADRAN I	91	62	74	93	91	89	42	48	64	50	65	64					
		KUADRAN II	21	50	38	19	21	23	70	64	48	62	47	48					
		KUADRAN III	16	20	44	12	11	17	57	54	22	24	22	92					
		KUADRAN IV	152	148	124	156	157	151	111	114	146	144	146	76					

Sumber: Hasil analisis, 2025

Selanjutnya terhadap hasil analisis kuadran—berdasarkan penyandingan indikator kemiskinan (jumlah keluarga desil 1) dengan indikator spesifik pada masing-masing bidang—dilakukan pemeringkatan terhadap desa/kelurahan yang tergolong Kuadran I. Dari pemeringkatan tersebut, diperoleh 112 desa/kelurahan yang menjadi fokus prioritas utama untuk intervensi penanggulangan kemiskinan. Desa/kelurahan ini kemudian dikelompokkan secara bertahap ke dalam empat tahun pelaksanaan, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, jumlah indikator yang menempatkan desa/kelurahan tersebut pada Kuadran I, serta kapasitas penanganan lintas sektor.

Pada tahun pertama, ditetapkan 28 desa/kelurahan sebagai prioritas awal, karena desa/kelurahan tersebut menunjukkan derajat kerentanan paling tinggi, tercermin dari posisinya yang konsisten berada pada Kuadran I di berbagai indikator analisis sehingga membutuhkan penanganan segera. Pada tahun kedua, dialokasikan 25 desa/kelurahan, disusul 34 desa/kelurahan pada tahun ketiga, dan 25 desa/kelurahan pada tahun keempat. Pentahapan ini dilakukan untuk memastikan penanganan yang lebih terencana, proporsional, dan memungkinkan optimalisasi sumber daya yang tersedia, sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan program pada setiap bidang intervensi. Daftar lengkap desa/kelurahan yang menjadi lokasi prioritas berdasarkan tahapan intervensi dan bidang yang menempatkannya dalam Kuadran I disajikan pada tabel berikut.

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH KUADRAN I	RANKING
	TAHAP 1															
1	PACET	Cikawao	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	1
2	PANGALENGAN	Sukamanah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	1
3	PANGALENGAN	Margamulya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12	1
4	ARJASARI	Pinggirsari	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		11	4
5	BANJARAN	Banjaran Wetan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		11	4
6	BANJARAN	Mekarjaya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		11	4
7	CIKANCUNG	Mekarlaksana	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	11	4
8	CIWIDEY	Lebakmuncang	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	11	4
9	CIWIDEY	Sukawening	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	11	4
10	KERTASARI	Tarumajaya	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	11	4
11	PACET	Nagrak	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	11	4
12	PANGALENGAN	Lamajang	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		11	4
13	PASEH	Drawati	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	11	4
14	PASIRJAMBU	Sugihmukti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		11	4
15	ARJASARI	Baros	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I		10	15
16	ARJASARI	Patrolsari	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			10	15
17	CICALENGKA	Tanjungwangi	I	I	I	I	I		I		I	I	I	I	10	15
18	CIKANCUNG	Srirahayu	I	I		I	I	I		I	I	I	I	I	10	15
19	CIMAUNG	Campakamulya	I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	10	15
20	CIMAUNG	Mekarsari	I	I	I	I	I		I		I	I	I	I	10	15
21	PACET	Pangauban	I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	10	15
22	PACET	Mandalahaji	I	I		I	I	I	I		I	I	I	I	10	15

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH KUADRAN I	RANKING
23	PANGALENGAN	Pangalengan	I	I	I	I	I	I	I		I	I	I		10	15
24	PANGALENGAN	Margamukti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			10	15
25	PANGALENGAN	Sukaluyu	I	I	I	I	I	I		I	I	I		I	10	15
26	PANGALENGAN	Tribaktimulya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			10	15
27	RANCABALI	Cipelah	I	I		I	I	I		I	I	I	I	I	10	15
28	RANCABALI	Alamendah	I	I	I	I	I	I			I	I	I	I	10	15
	TAHAP 2															
1	BALEENDAH	Wargamekar	I		I	I	I	I		I	I	I	I		9	29
2	CIKANCUNG	Cihanyir	I		I	I	I		I		I	I	I	I	9	29
3	IBUN	Pangguh	I	I	I	I	I	I			I	I	I		9	29
4	KERTASARI	Cibeureum	I	I	I	I	I	I			I	I	I		9	29
5	KUTAWARINGIN	Sukamulya	I	I	I	I	I				I	I	I	I	9	29
6	MAJALAYA	Neglasari	I	I		I	I	I		I	I		I	I	9	29
7	PACET	Cikitu	I	I	I	I	I	I			I	I	I		9	29
8	PACET	Sukarame	I	I	I	I	I	I	I				I	I	9	29
9	PACET	Girimulya	I	I		I	I	I			I	I	I	I	9	29
10	PACET	Mekarsari	I		I	I	I	I		I	I		I	I	9	29
11	PANGALENGAN	Warnasari	I	I	I	I	I	I			I	I	I		9	29
12	PASEH	Cipedes	I		I	I	I	I		I	I		I	I	9	29
13	PASEH	Sindangsari	I		I	I	I	I		I	I		I	I	9	29
14	PASIRJAMBU	Tenjolaya	I	I	I	I	I	I			I	I	I		9	29
15	ARJASARI	Mekarjaya		I	I	I	I	I	I		I		I		8	43
16	CIKANCUNG	Ciluluk	I		I	I	I	I			I	I		I	8	43
17	CIPARAY	Sumbersari	I	I	I	I	I	I					I	I	8	43
18	IBUN	Neglasari	I	I		I	I		I		I	I		I	8	43
19	MAJALAYA	Padaulun	I	I	I	I	I	I					I	I	8	43
20	PACET	Cinanggela	I	I	I	I	I				I	I	I		8	43
21	PACET	Maruyung	I		I	I	I	I				I	I	I	8	43
22	PANGALENGAN	Margaluyu	I	I	I	I	I	I				I		I	8	43
23	PANGALENGAN	Banjarsari	I	I		I	I	I	I	I	I				8	43
24	PASEH	Loa	I	I	I	I	I	I					I	I	8	43
25	RANCABALI	Sukaresmi		I	I		I	I		I	I	I	I		8	43
	TAHAP 3															
1	ARJASARI	Arjasari	I		I	I		I	I		I	I			7	54
2	BALEENDAH	Baleendah	I			I	I	I		I	I	I			7	54
3	BANJARAN	Ciapus	I					I	I	I	I		I	I	7	54
4	CIKANCUNG	Cikasungka	I		I		I	I	I		I			I	7	54
5	CIKANCUNG	Tanjunglaya	I		I	I		I	I				I	I	7	54
6	CILEUNYI	Cileunyi Wetan			I	I	I	I		I		I		I	7	54
7	CIMAUNG	Sukamaju		I		I			I	I	I	I	I		7	54
8	CIPARAY	Pakutandang	I		I	I	I	I	I				I		7	54
9	CIPARAY	Serangmekar	I		I	I	I		I				I	I	7	54
10	CIPARAY	Bumiwangi	I		I	I	I	I	I					I	7	54
11	KERTASARI	Cihawuk	I	I	I	I	I	I					I		7	54
12	KUTAWARINGIN	Jelegong	I	I		I	I	I		I				I	7	54
13	MAJALAYA	Wangisagara	I		I	I	I				I		I	I	7	54
14	MAJALAYA	Bojong	I		I	I	I	I					I	I	7	54
15	NAGREG	Ciaro	I	I		I	I	I			I		I		7	54

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JUMLAH KUADRAN I	RANKING
16	PACET	Mekarjaya	I	I		I	I				I	I	I		7	54
17	PANGALENGAN	Wanasuka	I	I		I	I	I	I	I					7	54
18	PANGALENGAN	Margamekar	I	I	I	I	I	I		I					7	54
19	PASEH	Cipaku	I			I	I	I		I	I		I		7	54
20	PASIRJAMBU	Cisondari		I	I		I			I	I	I	I		7	54
21	ARJASARI	Rancakole	I			I			I		I		I	I	6	74
22	BALEENDAH	Manggahang	I		I	I	I	I		I					6	74
23	CIKANCUNG	Hegarmanah	I		I	I	I	I						I	6	74
24	CIMENYAN	Cibeunying			I	I	I	I	I					I	6	74
25	CIPARAY	Manggungharja	I		I	I	I	I	I						6	74
26	CIWIDEY	Panyocokan	I		I	I		I		I				I	6	74
27	IBUN	Mekarwangi		I	I				I		I	I		I	6	74
28	IBUN	Sudi	I		I		I		I				I	I	6	74
29	KERTASARI	Sukapura	I	I		I	I				I		I		6	74
30	MAJALAYA	Biru	I		I	I	I	I						I	6	74
31	MAJALAYA	Sukamaju	I		I			I		I			I	I	6	74
32	MARGAASIH	Lagadar	I			I	I	I		I				I	6	74
33	NAGREG	Ciherang	I	I		I	I	I						I	6	74
34	PANGALENGAN	Pulosari	I	I		I	I	I		I					6	74
	TAHAP 4															
1	BALEENDAH	Jelekong	I			I	I	I		I					5	88
2	BOJONGSOANG	Bojongsari	I			I		I		I				I	5	88
3	CICALENGKA	Babakanpeuteuy	I			I	I	I	I						5	88
4	CIKANCUNG	Mandalasari	I			I	I				I			I	5	88
5	CILEUNYI	Cinunuk			I	I	I	I		I					5	88
6	CIMAUNG	Jagabaya	I			I	I	I						I	5	88
7	CIPARAY	Ciheulang	I		I	I	I	I							5	88
8	CIPARAY	Mekarlaksana	I			I	I		I					I	5	88
9	CIWIDEY	Ciwidey				I	I	I	I					I	5	88
10	IBUN	Laksana		I	I		I				I		I		5	88
11	KERTASARI	Cikembang	I	I		I	I	I							5	88
12	MAJALAYA	Sukamukti						I		I	I		I	I	5	88
13	PASEH	Karangtunggal			I					I	I		I	I	5	88
14	CILEUNYI	Cileunyi Kulon			I	I	I	I							4	101
15	CIMAUNG	Malasari	I	I					I					I	4	101
16	KERTASARI	Resmi Tingal	I	I		I	I								4	101
17	BALEENDAH	Andir						I		I				I	3	104
18	BALEENDAH	Rancamanyar						I	I	I					3	104
19	BOJONGSOANG	Tegalluar	I			I		I							3	104
20	BANJARAN	Sindangpanon						I		I					2	107
21	CILEUNYI	Cimekar						I	I						2	107
22	CIMENYAN	Cimenyan			I			I							2	107
23	IBUN	Lampegan											I	I	2	107
24	KATAPANG	Sangkanhurip						I						I	2	107
25	RANCAEKEK	Bojongloa			I									I	2	107
	TOTAL	KUADRAN I	91	62	74	93	91	89	42	48	64	50	65	64		

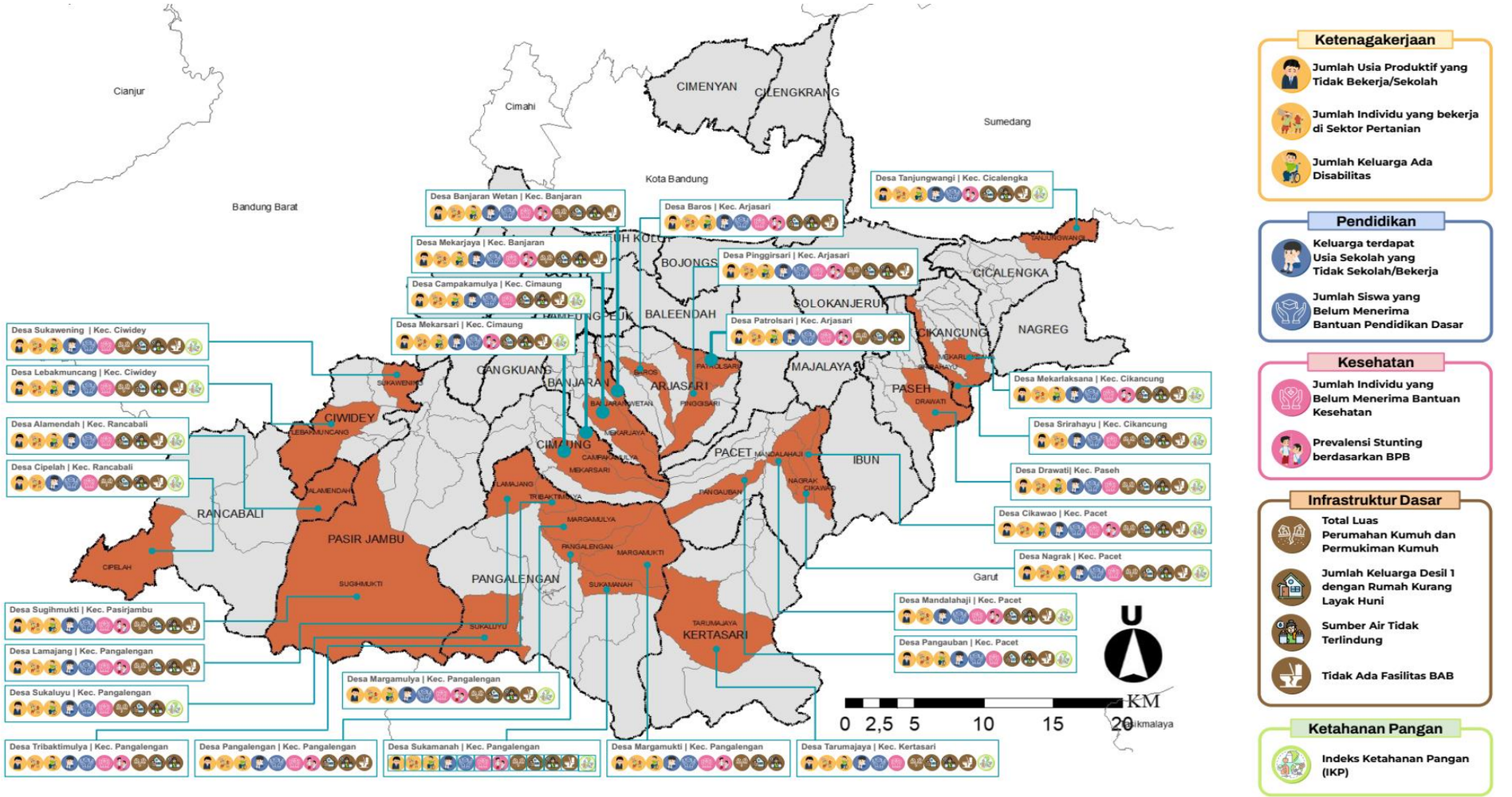
Keterangan:

1) Jumlah Usia Produktif yang Tidak Bekerja/Sekolah

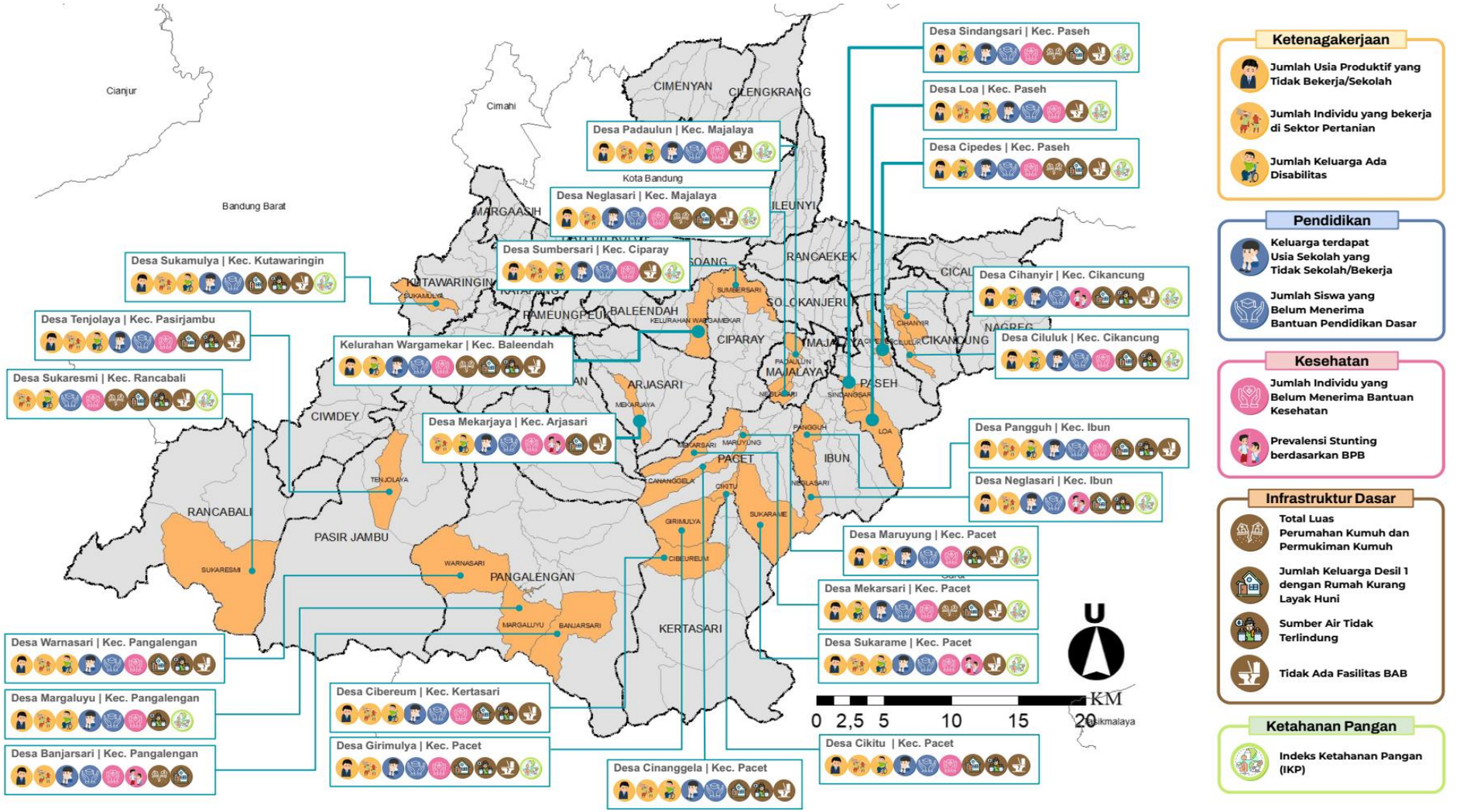
2) Jumlah Individu yang bekerja di Sektor Pertanian
3) Jumlah Keluarga Ada Disabilitas
4) Keluarga terdapat Usia Sekolah yang Tidak Sekolah/Bekerja
5) Jumlah Siswa yang Belum Menerima Bantuan Pendidikan Dasar
6) Jumlah Individu yang Belum Menerima Bantuan Kesehatan
7) Prevalensi Stunting berdasarkan BPB
8) Total Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
9) Jumlah Keluarga Desil 1 dgn Rumah Kurang Layak Huni
10) Sumber Air Tidak Terlindung
11) Tidak Ada Fasilitas BAB
12) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Sumber: Hasil analisis, 2025

Adapun peta sebaran desa/kelurahan di Kabupaten Bandung yang menjadi lokasi prioritas berdasarkan tahapan intervensi disajikan pada gambar di bawah ini.

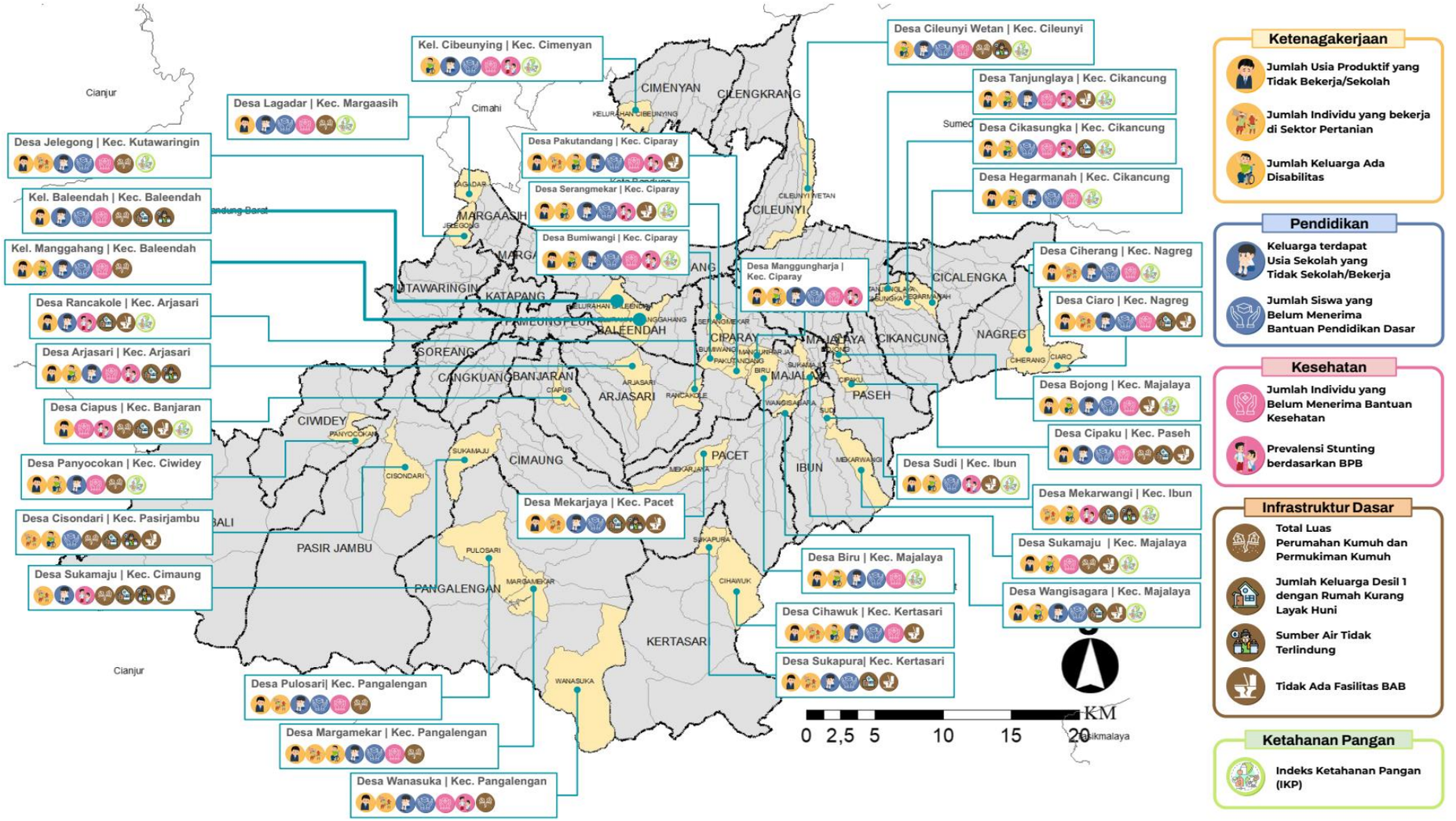


Gambar 5.13 Sebaran Wilayah Kantong Kemiskinan di Kabupaten Bandung berdasarkan Prioritas Intervensi Tahap 1 *Sumber: Hasil analisis, 2025*



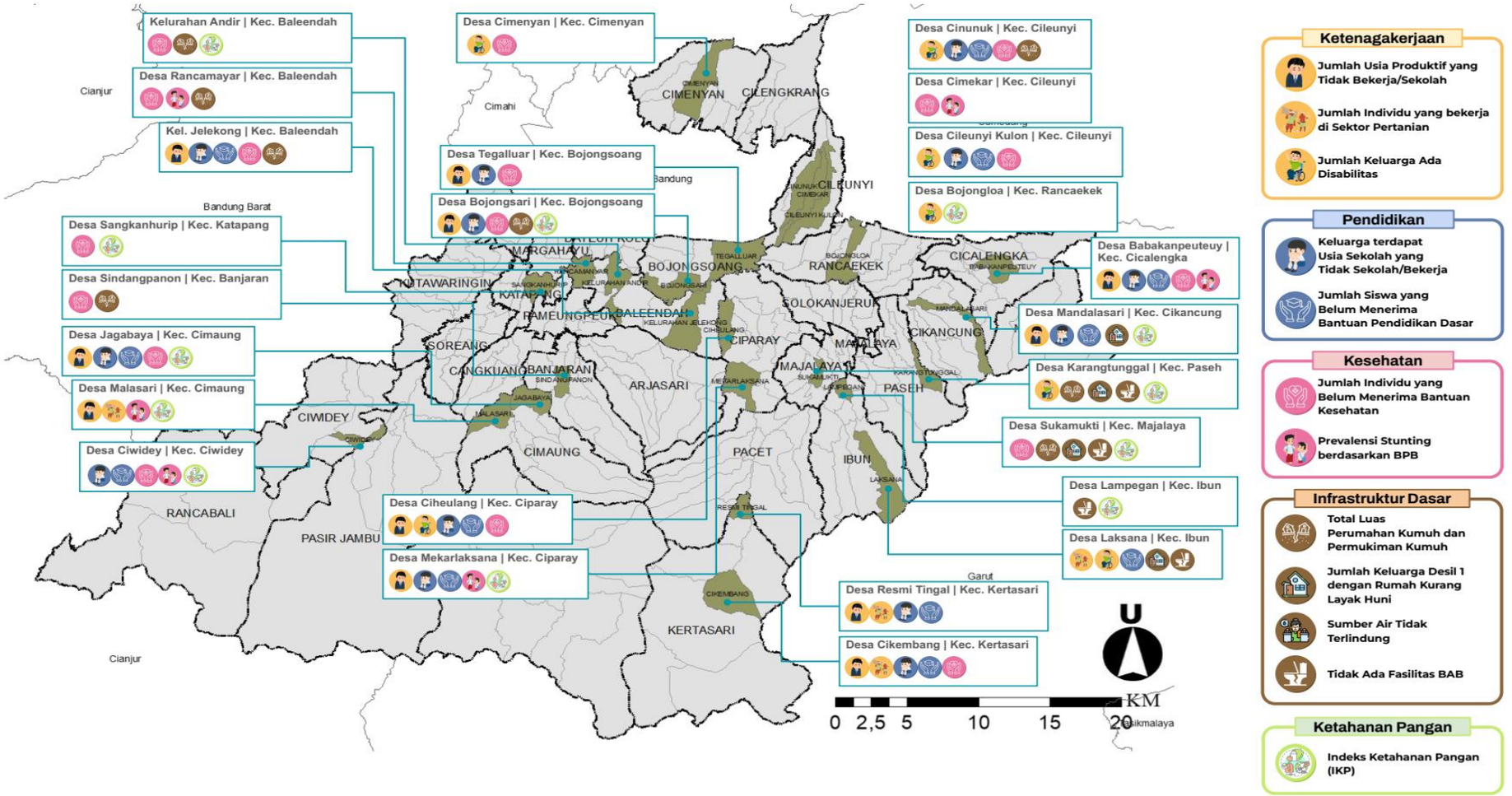
Gambar 5.14 Sebaran Wilayah Kantong Kemiskinan di Kabupaten Bandung berdasarkan Prioritas Intervensi Tahap 2

Sumber: Hasil analisis, 2025



Gambar 5.15 Sebaran Wilayah Kantong Kemiskinan di Kabupaten Bandung berdasarkan Prioritas Intervensi Tahap 3

Sumber: Hasil analisis, 2025



Gambar 5.16 Sebaran Wilayah Kantong Kemiskinan di Kabupaten Bandung berdasarkan Prioritas Intervensi Tahap 4

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB VI
PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen perencanaan strategis untuk memperkuat arah, fokus, dan keterpaduan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Secara makro, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung menunjukkan capaian yang positif, di mana tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan yang konsisten dari 7,15% pada tahun 2021 menjadi 6,19% pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Kabupaten Bandung pada posisi yang relatif lebih baik dibandingkan capaian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 (7,46%), serta berada pada peringkat ketujuh kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lain, hasil analisis kapasitas fiskal daerah menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Bandung juga mengalami penguatan. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah meningkat dari kategori rendah pada tahun 2021 menjadi kategori sedang sejak tahun 2022, dan kondisi tersebut dapat dipertahankan hingga tahun 2024. Peningkatan kapasitas fiskal ini mengindikasikan perbaikan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan, yang terutama ditopang oleh peningkatan kinerja PAD, pendapatan transfer, serta pemanfaatan SILPA. Meskipun demikian, optimalisasi pengelolaan dan diversifikasi sumber pendanaan di luar PAD tetap diperlukan guna memastikan penguatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, hasil analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bandung bersifat multidimensional. Selain itu, secara spasial kemiskinan di Kabupaten Bandung juga cenderung terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu, khususnya desa/kelurahan dengan jumlah keluarga desil 1 yang tinggi serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Analisis kuadran pada lima bidang utama determinan kemiskinan—ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan—mengungkap adanya desa/kelurahan yang secara konsisten berada pada Kuadran I, yang mencerminkan kondisi kerentanan ganda dan membutuhkan penanganan prioritas.

Melalui pengembangan logika program dengan pendekatan *Theory of Change*, RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merumuskan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan secara agregat, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan akses dan kualitas layanan dasar. Penetapan prioritas program dan lokasi intervensi dilakukan berbasis data dan analisis, termasuk melalui pemeringkatan dan pentahapan desa/kelurahan prioritas agar pelaksanaan program lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RPKD ini diharapkan menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memastikan bahwa capaian makro yang positif dapat diikuti oleh penurunan kerentanan kemiskinan secara lebih merata antarwilayah dan kelompok masyarakat.

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA